

Dinamika Ketimpangan dan Penghidupan di Perdesaan Indonesia, 2006. 2016



Nila Warda

Rachma Nurbani

Elza Elmira

Ridho Al Izzati

Mayang Rizky

*Dokumen ini telah disetujui untuk pratinjau dalam jaringan, tetapi belum melewati proses *copyediting* dan *proofreading* sehingga dapat menyebabkan perbedaan antara versi ini dan versi final. Bila Anda mengutip dokumen ini, indikasikan sebagai "draf".

KERTAS KERJA SMERU

**Dinamika Ketimpangan dan Penghidupan
di Perdesaan Indonesia, 2006. 2016**

Nila Warda

Elza Elmira

Mayang Rizky

Rachma Nurbani

Ridho Al Izzati

Editor

Budhi Adrianto

The SMERU Research Institute

November 2018



Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Internasional.

Konten SMERU dapat disalin atau disebarluaskan untuk tujuan komersial sejauh dilakukan dengan menyebutkan The SMERU Research Institute sebagai sumbernya. Jika tidak ada kesepakatan secara kelembagaan, format PDF publikasi SMERU tidak boleh diunggah dalam jaringan (daring) dan konten daring hanya bisa diakses melalui tautan ke situs web SMERU.

Temuan, pandangan, dan interpretasi dalam laporan ini merupakan tanggung jawab penulis dan tidak berhubungan dengan atau mewakili lembaga yang mendanai kegiatan dan pelaporan The SMERU Research Institute.

Untuk mendapatkan informasi mengenai publikasi SMERU, hubungi kami melalui nomor telepon 011-81936332, nomor faks 3162 31930850, atau alamat surel smeru@smeru.or.id; atau kunjungi situs web www.smeru.or.id.

Foto Sampul Dok. SMERU

UCAPAN TERIMA KASIH

Kertas kerja ini dapat selesai berkat dukungan berbagai pihak. Untuk itu, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Yayasan TIFA yang telah memfasilitasi terselenggaranya penelitian ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ir. Nono Rusono SIM, Kasubdit Bidang Pangan, Kementerian PPN/Bappenas dan Muhammad Syukri, kandidat Ph.D. dari University of Western Australia yang telah meninjau substansi hasil studi ini dan turut menyempurnakan kertas kerja ini. Ucapan terima kasih kami sampaikan pula kepada rekan-rekan pemerintah dan orngop yang telah hadir dalam kelompok diskusi terfokus studi ini dan memberikan masukan yang sangat berharga untuk perbaikan dan penajaman temuan studi.

ABSTRAK

Dinamika Ketimpangan dan Penghidupan di Perdesaan Indonesia, 2006-2016

Nila Warda, Elza Elmira, Mayang Rizky, Rachma Nurbani, dan Ridho Al Izzati

Topik ketimpangan menjadi isu yang hangat dalam perdebatan pembangunan di Indonesia, terutama di daerah perdesaan yang dalam satu dekade terakhir mengalami peningkatan ketimpangan. Studi ini bertujuan melihat berbagai faktor dalam kerangka modal penghidupan mengaitkannya dengan dinamika ketimpangan yang terjadi di wilayah perdesaan. Termasuk dalam modal penghidupan adalah sumber daya manusia, sumber daya alam, modal infrastruktur fisik, modal keuangan, dan modal sosial. Hasil analisis studi ini diharapkan memberi gambaran mengenai tantangan yang dihadapi dalam upaya pengurangan ketimpangan, terutama yang menghalangi masyarakat kelompok termiskin untuk melakukan mobilitas sosial ke tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi.

Analisis dalam studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui teknik analisis deskriptif dengan menampilkan tabulasi silang indikator-indikator yang mewakili masing-masing modal penghidupan di satu sisi dan kelompok kesejahteraan di sisi lain. Sumber data utama yang digunakan adalah, antara lain, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), Indonesia Family Life Survey (IFLS), Sensus Penduduk, Sensus Pertanian, Sensus Potensi Desa dan data Beta Kemiskinan Indonesia.

Beberapa hal yang diduga berkaitan dengan atau turut berkontribusi pada ketimpangan ekonomi perdesaan terlihat melalui studi seperti rendahnya capaian pendidikan kelompok termiskin perdesaan, dominasi kelompok terkaya dalam penguasaan lahan pertanian, pembangunan infrastruktur fisik yang lebih tersebar -desa maju-, serta ancaman kohesi sosial yang bersumber dari keberagaman identitas dan primordialisme dan berujung pada konflik sosial. Faktor-faktor ini selanjutnya akan disempurnakan pada kertas kerja kedua dan ketiga dengan menguji kekuatan kontribusi masing-masing faktor dan membandingkan besarnya dalam menjelaskan perubahan ketimpangan perdesaan. Berdasarkan temuan ketiganya kerja tersebut implikasi kebijakan yang lebih baik dapat diformulasikan.

Kata kunci: ketimpangan, modal penghidupan, perdesaan

DAFTAR ISI

UCAPAN TERIMA KASIH	i
ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM	vii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi Umum Ketimpangan	1
1.2 Mengapa Penting Melihat Ketimpangan di Perdesaan di Indonesia?	3
1.3 Gambaran Studi	5
II. KETIMPANGAN DAN PERKEMBANGAN PENGHIDUPAN DI DESA	10
2.1 Wilayah Perdesaan di Indonesia Makin Sejahtera namun Makin Timpang	10
2.2 Struktur Ekonomi Desa yang Telah Berubah	14
2.3 Transisi Penghidupan Masyarakat Perdesaan	15
III. SUMBER DAYA MANUSIA PERDESAAN	20
3.1 Tantangan Demografi: Urbanisasi dan Rasio Beban Ketergantungan yang Tinggi	20
3.2 Pendidikan Masyarakat Perdesaan: Akses yang Lebih Baik dan Tantangan Capaian Pendidikan Tinggi	22
3.3 Kualitas Kesehatan Masyarakat Perdesaan: Paritas dalam Keluhan Kesehatan dan Akses Layanan Kesehatan Dasar, namun Disparitas dalam Capaian Gizi	26
IV. SUMBER DAYA ALAM PERDESAAN	32
4.1 Kesejahteraan dan Ketimpangan antardesa dengan Tipologi Wilayah yang Berbeda	33
4.2 Pemanfaatan Sumber Daya Alam Desa: Ketimpangan Akses Lahan Pertanian dan Kebutuhan akan Pengelolaan Irigasi yang Baik	37
V. INFRASTRUKTUR FISIK DAN PENDUKUNG PEREKONOMIAN PERDESAAN	40
5.1 Jalan, Komunikasi, dan Listrik yang Membuka Kesempatan sekaligus Risiko Kembangkan Ketimpangan	41
5.2 Diskrepansi Infrastruktur Pendukung Perekonomian Perdesaan	44
VI. MODAL SOSIAL MASYARAKAT DESA: PARTISIPASI, TOLERANSI, POLA RELASI	47
6.1 Partisipasi Sosial yang Tinggi, namun Kepercayaan Sosial yang Rendah	48
6.2 Hubungan Tidak Linier antara Keberagaman Identitas Sosial dan Ketimpangan Ekonomi	53
6.3 Dukungan Sosial antara Masyarakat Perdesaan Tidak Lebih Tinggi daripada Masyarakat Perkotaan	55
6.4 Hubungan Dua Arah antara Konflik Sosial dan Ketimpangan Ekonomi	56
VII. KESIMPULAN DAN STUDI LANJUTAN	59
DAFTAR ACUAN	61

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Indikator Modal Penghidupan	8
Tabel 2. Komposisi Tenaga Kerja Menurut Sektor Pertanian di Wilayah Perdesaan Indonesia, 2006 dan 2016	14
Tabel 3. Ratarata Usia Petani, 2006 dan 2015	15
Tabel 4. Prevalensi Masalah Gizi antarkelompok Wilayah dan Masyarakat Indonesia, 2006 dan 2013	28
Tabel 5. Tipologi Desa	33
Tabel 6. Penguasaan Lahan Nasional, 2013	37
Tabel 7. Penguasaan Lahan Pertanian di Setiap Wilayah, 2013	38
Tabel 8. Persentase dan Jumlah Desa dengan Jaringan Irigasi yang Mengalami Kerusakan berdasarkan Kondisi Topografi, 2011 dan 2014	40
Tabel 9. Jenis Konflik berdasarkan Wilayah	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Ketimpangan (indeks Gini) dan Kemiskinan di Indonesia (Desa dan Kota) Tahun 1999-2017	2
Gambar 2. Pertumbuhan Pengeluaran Menurut Persentil di Wilayah Perdesaan Indonesia (harga konstan), 2006-2016	3
Gambar 3. Tingkat Kemiskinan (P0), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahan kemiskinan (P2) Menurut Wilayah (Desa, Kota, dan Desa+Kota) Tahun 1999-2016	4
Gambar 4. Ketimpangan Menurut Wilayah, 1999-2017	5
Gambar 5. Ketimpangan (Indeks Gini) dan Kemiskinan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 dan 2016	11
Gambar 6. Perubahan Ketimpangan (Indeks Palma), 2006 dan 2016	12
Gambar 7. Pertumbuhan Pengeluaran Menurut Persentil di Berbagai Wilayah Perdesaan Indonesia (harga konstan), 2006-2016	13
Gambar 8. Komposisi Tenaga Kerja Menurut Subsektor Pertanian di Wilayah Perdesaan Indonesia, 2014	15
Gambar 9. Perpindahan Lokasi Tempat Tinggal diantara Pekerja dan Pertumbuhan Pendapatannya (Riil)	16
Gambar 10. Perubahan Sektor Bekerja diantara Pekerja yang Menetap di Perdesaan dan Pertumbuhan Pendapatannya (Riil)	18
Gambar 11. Komposisi Penduduk Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2006 dan 2016	21
Gambar 12. Piramida Penduduk	21

Gambar 13	Rasio Beban Ketergantungan antarkelompok Pendapatan di Perdesaan, 2006 dan 2016	24
Gambar 14	Angka Partisipasi Kasar berdasarkan Kelompok Kesejahteraan, 2006 dan 2016	24
Gambar 15	Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni berdasarkan Kelompok Kesejahteraan dan Gender, 2006 dan 2016	25
Gambar 16	Tingkat Pendidikan Tertinggi di Perkotaan dan Perdesaan Berdasarkan Kuintil Pengeluaran, 2006 dan 2016 (dalam persen)	26
Gambar 17	Perbandingan Proporsi Keluhan Kesehatan Penduduk Usia Produktif (15-64) di Perkotaan dan Perdesaan berdasarkan Kuintil Pengeluaran Per Kapita, 2006 dan 2014	27
Gambar 18	Prevalensi Masalah Gizi antar kelompok Kesejahteraan di Perdesaan Indonesia, 2013	29
Gambar 19	Perbandingan Proporsi Kelahiran dibantu Tenaga Kesehatan di Perdesaan, 2006 dan 2016	30
Gambar 20	Perbandingan Proporsi Cakupan Imunisasi Lengkap Anak Usia 12 di Perdesaan, 2006 dan 2016	31
Gambar 21	Perbandingan Proporsi Keluarga dengan Jaminan Kesehatan di Perdesaan, 2006 dan 2016	32
Gambar 22	Kuintil Distribusi Rata-rata Pengeluaran Per kapita Penduduk Desa dan Kuintil Gini Desa, Menurut Topografi Wilayah 2014	34
Gambar 23	Kuintil Distribusi Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Penduduk Desa dan Kuintil Gini Desa, Menurut Lokasi Desa terhadap Laut 2014	35
Gambar 24	Kuintil Distribusi Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Penduduk Desa dan Kuintil Gini Desa, Menurut Lokasi Desa terhadap Hutan 2014	36
Gambar 25	Desa yang Ada di dalam/sekitar hutan menurut Fungsi, 2014	36
Gambar 26	Distribusi Penguasaan Lahan di Rumah Tangga Sektor Pertanian	39
Gambar 27	Persentase Desa yang Memiliki Infrastruktur Jalan dengan Kondisi Baik pada 2011 dan Kelompok Kesejahteraannya pada 2015	41
Gambar 28	Hubungan antara Proporsi Desa dengan Kualitas Sinyal Komunikasi yang Baik pada 2011 dengan Tingkat Kesejahteraannya pada 2015	42
Gambar 29	Proporsi Desa yang Memiliki Infrastruktur Jalan dan Komunikasi yang Kondisinya Baik (dalam persen) Berdasarkan Kuintil Indeks Gini, 2014	43
Gambar 30	Akses Listrik Berdasarkan Kelompok Kesejahteraan di Desa, 2006 dan 2016	43
Gambar 31	Persentase Desa Tanpa Aliran Listrik, 2014	44
Gambar 32	Proporsi Desa yang Memiliki Infrastruktur Finansial 2011 Berdasarkan Kelompok Pendapatan Desa 2014 (dalam Persen)	45
Gambar 33	Keberadaan Komplek Pertokoan dan Pasar 2011 berdasarkan Kelompok Pendapatan Desa 2014 (dalam Persen)	46
Gambar 34	Partisipasi di Setidaknya Satu Jenis Kegiatan Kemasyarakatan Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan dan Gender, 2007 dan 2014	49
Gambar 35	Masyarakat yang Menggunakan Hak Pilihnya Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan dan Gender, 2007 dan 2014	50

Gambar 36	Preferensi dalam Memilih Pemimpin/wakil rakyat Rakyat Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan dan Gender, 2007 dan 2014	51
Gambar 37	Sikap tidak Percaya kepada Orang dengan Agama/Etnis Berbeda Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan dan Gender, 2007 dan 2014	52
Gambar 38	Fitted Line antara Ethnic Fracturalization Index dan Indeks Gini	54
Gambar 39	Fitted Line antara Religion Fracturalization Index dan Indeks Gini	55
Gambar 40	Distribusi dan Prevalen atas Dukungan Informal dari Masyarakat 2014	56
Gambar 41	Insiden konflik per Provinsi 2011 dan 2014 (Persentase dari total Konflik)	57
Gambar 42	Desa yang Mengalami Konflik 2011 Berdasarkan Kelompok Ketimpangan Desa 2015 (%)	58

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

ADB	Asian Development Bank (Bank Pembangunan Asia)
APK	angka partisipasi kasar
APM	angka partisipasi murni
ASEAN	Association of Southeast Asian Nations (Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara)
Askeskin	Asuransi Kesehatan Keluarga Miskin
Balitbangkes	Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
BCG	bacillus Calmette-Guérin
BPJS	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPJS PBI	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Penerima Bantuan Iuran
BPR	Bank Perkreditan Rakyat
BPS	Badan Pusat Statistik
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
DPT	diphtheria, pertussis, tetanus
ERF	Ethnic Fractionalization Index
ERFe	Ethnic Fractionalization Index (Ethnics)
ERFr	Ethnic Fractionalization Index (Religion)
ETA	Euskadi Ta Askatasuna
FAO	Food and Agriculture Organization (Organisasi Pangan dan Pertanian)
IFLS	Indonesian Family Life Survey
Jamkesmas	Jaminan Kesehatan Masyarakat
KB	Keluarga Berencana
KBBI	Kamus Besar Bahasa Indonesia
LANDac	Netherlands Academy on Land Governance
NTB	Nusa Tenggara Barat
NTT	Nusa Tenggara Timur
PDB	Pendapatan Domestik Bruto
PNPM	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
Podes	pendataan Potensi Desa
Poskamling	poskeamanan keliling
Risikesdas	Riset Kesehatan Dasar
SAE	<i>small area estimation</i>
SD	Sekolah Dasar

SMA	sekolah menengah atas
SMP	sekolah menengah pertama
Supas	Survei Penduduk Antar-sensus
Susenas	Survei Sosial Ekonomi Nasional
UNCTAD	United Nations Conference on Trade and Development
UNDP	United Nation Development Program
UNU WIDER	United Nations University World Institute for Development Econ Research
UU	Undang-undang

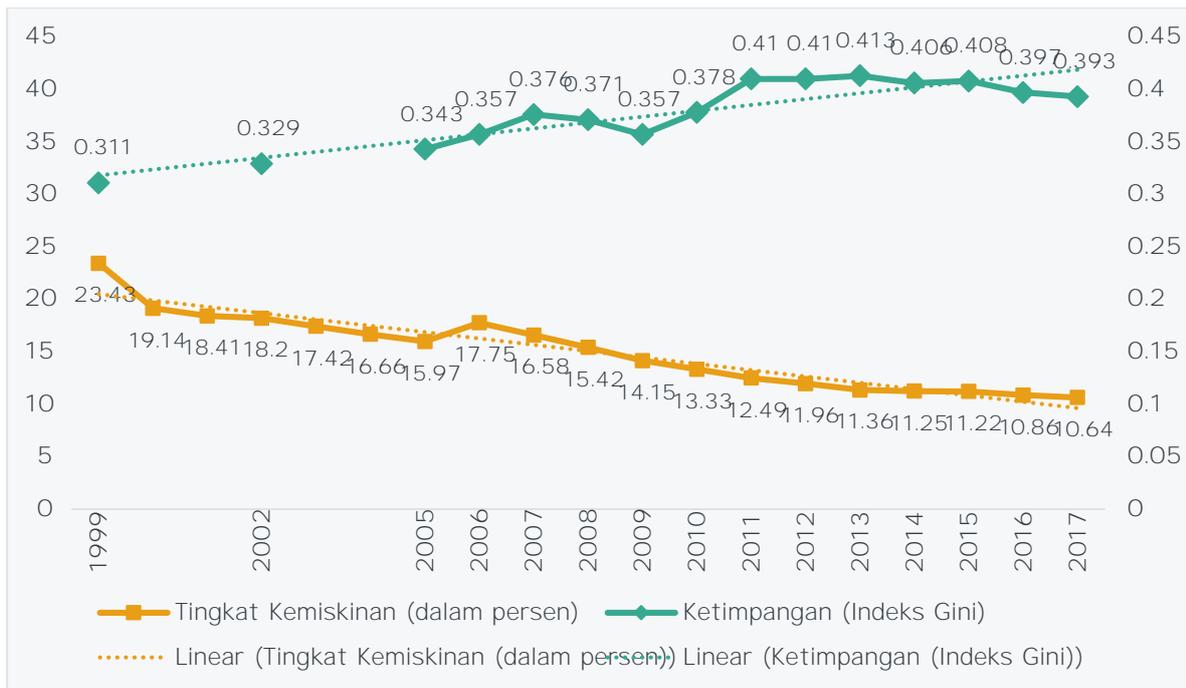
I. PENDAHULUAN

Capaian ekonomi yang impresif diraih oleh Indonesia dalam dua dekade terakhir, namun ketimpangan masih menjadi pekerjaan besar yang harus diselesaikan, terutama di perdesaan. Tingkat kemiskinan yang tinggi, dominasi sektor pertanian berproduktivitas rendah, dan keterbatasan infrastruktur layanan dasar menjadi hambatan laten bagi wilayah ini untuk memperkecil jurang pertumbuhan pendapatan antara kelompok termiskin dengan kelompok kesejahteraan di atasnya. Penurunan ketimpangan di perdesaan adalah sebuah urgensi dan pemahaman mengenai ketimpangan di perdesaan menjadi hal yang penting untuk mendukung upaya pemberdayaan desa yang saat ini tengah secara masif didorong oleh pemerintah dan mitra pembangunan. Kertas kerja ini disusun berdasarkan Studi Dinamika Ketimpangan di Perdesaan Indonesia yang akan memberi gambaran tentang dinamika ketimpangan pendapatan masyarakat di wilayah perdesaan Indonesia dalam kurun waktu terakhir (2006-2016).

1.1 Kondisi Umum Ketimpangan

Lepas dari Krisis Keuangan Asia 1997/1998 Indonesia mampu mempertahankan pertumbuhan ekonominya pada kisaran 5-6% dan berhasil menurunkan tingkat kemiskinan hingga lebih dari separuhnya (The World Bank, 2015). Peningkatan kesejahteraan agregat diraih dengan pendapatan perkapita yang naik hingga menempatkan negara dalam kelompok negara berpendapatan menengah bawah (Fantom dan Serajuddin, 2016; The World Bank, 2014). Namun, perlambatan laju penurunan kemiskinan yang dialami oleh Indonesia beberapa tahun terakhir ini menimbulkan pertanyaan terhadap pemerataan manfaat pembangunan ekonomi yang telah diraih tersebut. Sebelum Krisis Keuangan Asia (1976 hingga 1996), penurunan kemiskinan Indonesia mencapai rata-rata tahunan 1,44, namun berkurang hingga hanya 0,61 pada periode 2003-2010 (Sunyaga dan Hadiwidjaja, dan Sumarto, 2012). Sepanjang 2010-2014 tingkat kemiskinan Indonesia tidak beranjak jauh dari kisaran 10-12%. Bahkan, penurunan kemiskinan Indonesia antara 2010-2012 hanya sebesar 50 poin dan merupakan penurunan terkecil dalam satu dekade terakhir (The World Bank, 2014). Hingga 2017 masih terdapat sekitar 28 atau 10% penduduk Indonesia yang masih perlu diungkit kesejahteraannya, sebagian besarnya berada di perdesaan (Badan Pusat Statistik, 2017).

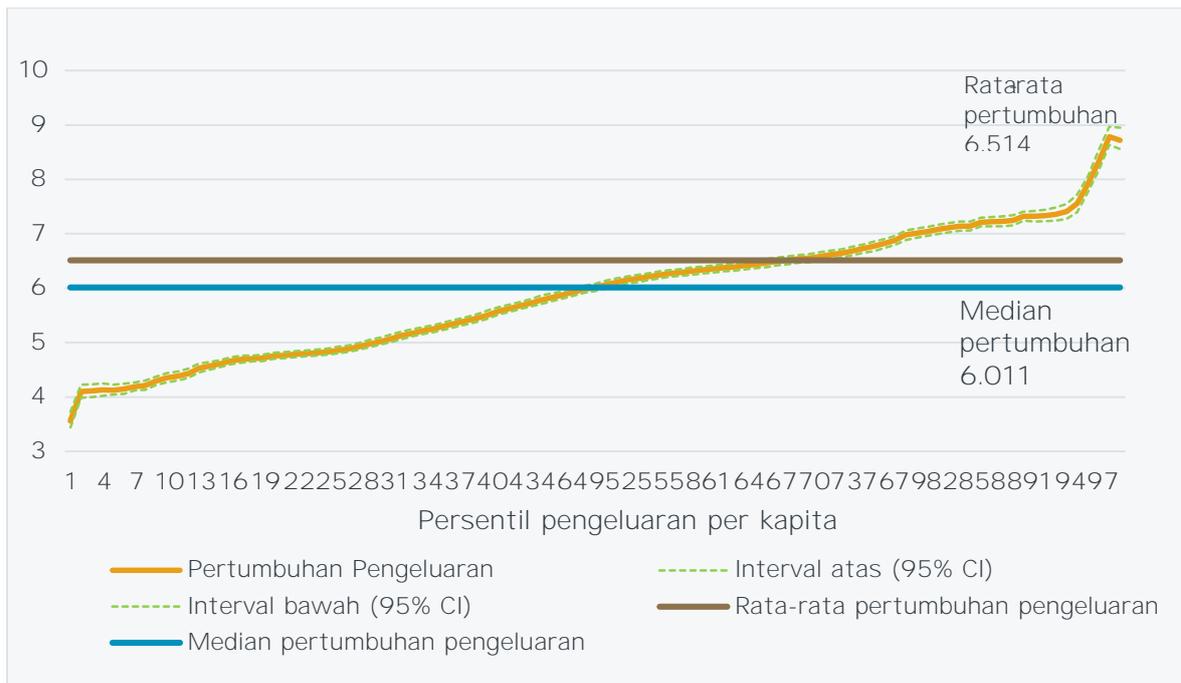
Perlambatan laju penurunan kemiskinan terjadi bersamaan dengan stagnasi penurunan ketimpangan. Setelah Krisis Keuangan Asia 1997/1998, pada waktu 1999 hingga 2011 ketimpangan Indonesia naik sebanyak 32% dengan peningkatan indeks Gini dari 0,311 menjadi 0,410. Sejak itu, ketimpangan memang cenderung tidak naik namun terus mengalami stagnasi, dengan kisaran Gini yang tidak beranjak turun dari 0,4. Baru pada Oktober 2017, Gini menurun sedikit ke angka 0,397 dan 0,393 (Gambar 1). Indeks Gini yang menyentuh kisaran 0,4, selain mengindikasikan ketimpangan di dalam negara yang tinggi, juga menjadikan Indonesia salah satu negara dengan ketimpangan tertinggi di antara negara-negara Kawasan Asia Tenggara (ASEAN) dan di antara negara-negara kelompok pendapatan menengah-bawah dunia (The World Bank, 2016).



Gambar 1. Ketimpangan (indeks Gini) dan Kemiskinan di Indonesia (Desa dan Kota) Tahun 1999-2017

Sumber: Badan Pusat Statistik, berbagai tahun.

Ketimpangan di Indonesia dapat dijelaskan oleh pertumbuhan penghasilan yang tidak seimbang antara kelompok termiskin dan kelompok terkaya. Pertumbuhan pengeluaran rata-rata penduduk terkaya Indonesia secara umum lebih tinggi dibandingkan kelompok penduduk miskin dan termiskin. Kecenderungan yang sama juga ditunjukkan oleh wilayah perdesaan dan pertumbuhan (*growth incidence curve* (GIC) yang memperlihatkan pertumbuhan pengeluaran menurut kelompok kesejahteraan perdesaan berbagai periode tahun menjelaskan hal ini (Gambar 2). Dalam kurun waktu 2006 hingga 2017 orang terkaya di perdesaan yang jumlahnya kurang dari 5% dari total penduduk perdesaan, pendapatannya tumbuh pada kisaran 7% hingga lebih dari 9%, jauh meninggalkan kelompok lainnya, yang pertumbuhan pendapatan rata-ratanya hanya berkisar 6,5% per tahun. Sementara 40% penduduk termiskin desa mengalami pertumbuhan yang lebih kecil lagi, antara 3,5% hingga 5,5%. Mereka yang berada di kelompok 40% termiskin ini adalah orang yang mengalami kemiskinan struktural, dengan pertumbuhan pendapatan kurang dari 4% saja.



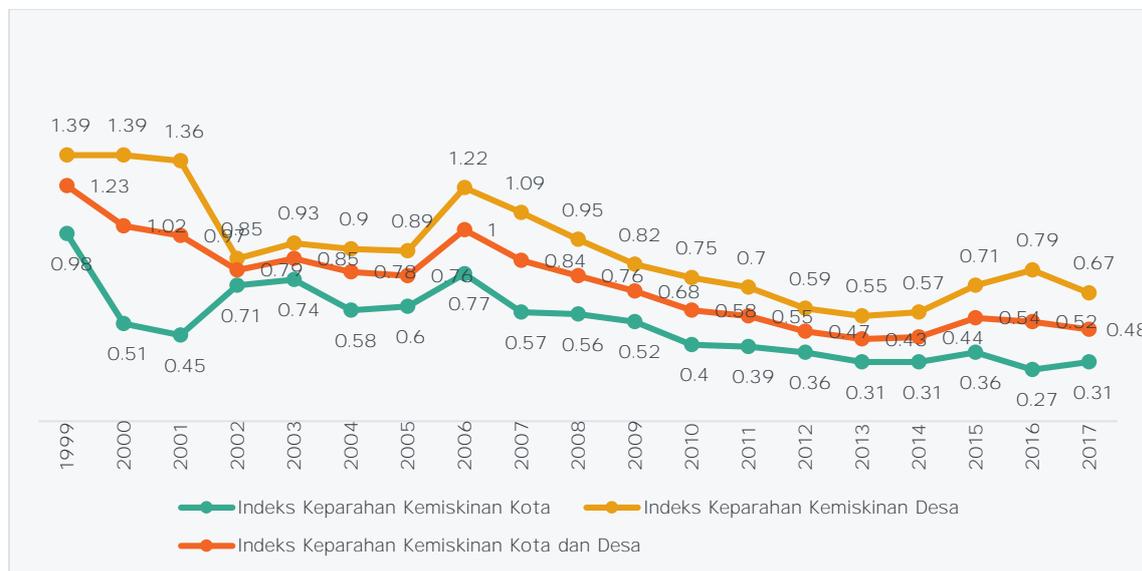
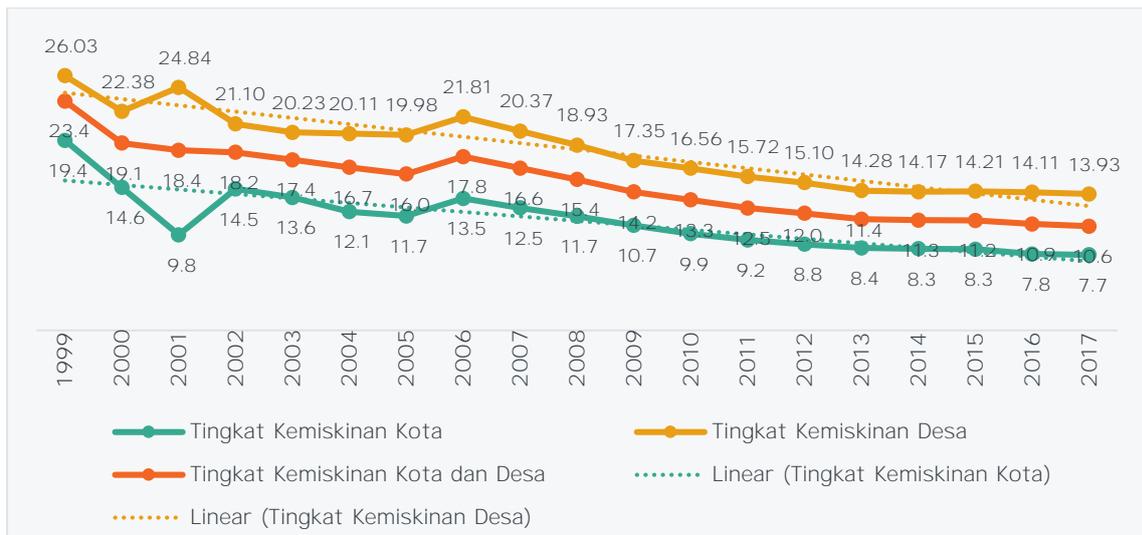
Gambar 2. Pertumbuhan Pengeluaran Menurut Persentil di Wilayah Perdesaan Indonesia (harga konstan), 2006 – 2016

Sumber: Diolah dari Susenas 2006 dan 2016.

Perbedaan tingkat pertumbuhan pendapatan antarkelompok kesejahteraan tersebut bisa dijelaskan, antara lain, oleh penguasaan modal dan kualitas sumber daya manusia yang berbeda-beda antarkelompok kesejahteraan, terutama antara kelompok kesejahteraan terkaya dan kelompok menengah. Para pemilik modal yang merupakan kelompok terkaya adalah yang paling banyak menikmati keuntungan ekonomi yang diraih Indonesia, salah satunya yang berasal dari *commodity boom* (Yusuf, Sumner, dan Rumong, 2015; Tabor, 2015). Sementara kelompok terkaya merasakan peningkatan pendapatan yang terbanyak, kelompok kesejahteraan di bawahnya terutama menghadapi hambatan untuk meningkatkannya dengan *skill gap* dan *technology* sehingga tenaga kerja berketerampilan rendah sulit untuk memasuki pasar tenaga kerja (Dahl-Norris *et al.*, 2015). Sebuah tantangan bagi wilayah perdesaan Indonesia yang merupakan sektor terbesar penyerap tenaga kerja yang sebagian besar adalah tenaga kerja berketerampilan rendah (Suryahadi, dan Tyers, 2001).

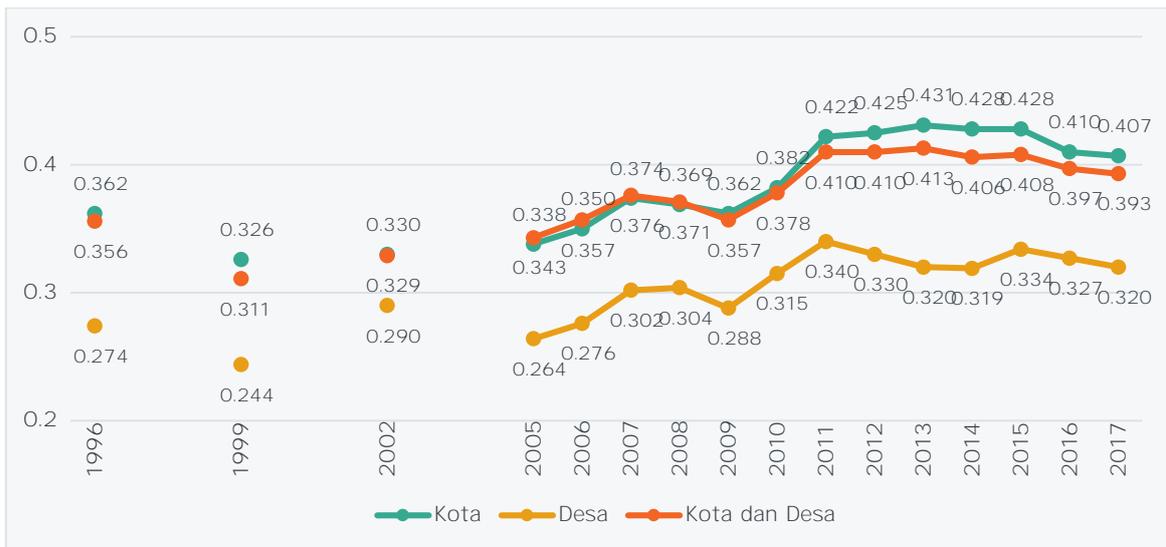
1.2 Mengapa Penting Melihat Ketimpangan di Perdesaan di Indonesia?

Ketimpangan yang terbesar masih berada di perkotaan, namun tingkat ketimpangan di pedesaan (P1) dan keparahan kemiskinan (P2) di pedesaan yang tingkatnya semakin naik dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan ketimpangan ekonomi di dalam wilayah perdesaan merupakan masalah yang harus diperhatikan (Gambar 4). Seperti kecenderungan nasional, peningkatan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan tersebut terjadi bersamaan dengan ketimpangan di wilayah perdesaan yang dibandingkan dengan masa sebelum dan sesudah krisis keuangan Asia (Gambar 4).



Gambar 3. Tingkat Kemiskinan (P0), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahan kemiskinan (P2) Menurut Wilayah (Desa, Kota, dan Desa+Kota) 1999 - 2017

Sumber: Badan Pusat Statistik, berbagai tahun.



Gambar 4. Ketimpangan Menurut Wilayah, 1996–2017

Sumber: Badan Pusat Statistik, berbagai tahun.

Penurunan ketimpangan menjadi upaya penting dalam mengentaskan kemiskinan (UNCTAD, 2013; UNDP, 2015). Mengingat kenyataan bahwa kemiskinan di Indonesia identik dengan wilayah perdesaan, maka upaya penurunan ketimpangan di perdesaan akan berkontribusi berharga terhadap penurunan kemiskinan nasional. Saat ini pemerintah dan mitra pembangunan secara masif mendorong berbagai program pembangunan dan pemberdayaan di perdesaan. Salah satu yang terbesar adalah Kebijakan Dana Desa yang merencanakan implementasi dari UU. 6/2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah No. 60/2014 tentang Dana Desa. Undang-undang Desa mengamatkan pembangunan desa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa, yang pada akhirnya dapat mengurangi kesenjangan pembangunan nasional. Perhatian pemerintah untuk menurunkan ketimpangan secara eksplisit tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang menargetkan ketimpangan (ketidaksamarataan) turun hingga 0,36 pada 2019 (UNDP, 2015). Namun, berbagai upaya pengurangan ketimpangan yang dicanangkan belum banyak yang menyentuh ketimpangan di perdesaan. Ketimpangan di perdesaan masih luput dari banyak pembahasan mengenai ketimpangan. Perhatian terhadap kawasan perdesaan masih didominasi upaya untuk meningkatkan pertumbuhan yang diasumsikan akan mengurangi kemiskinan. Tidak banyak disadari bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan ketimpangan bersifat linier dalam artian bahwa pertumbuhan ekonomi tidak akan secara otomatis mengurangi ketimpangan dan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi inklusiflah yang dapat mendukung pengurangan kemiskinan (de Haan & Thorat, 2013; Filmer, 2010). Oleh sebab itu, keberhasilan pengurangan kemiskinan membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang didukung kebijakan sosial yang baik yang bisa menjamin distribusi pendapatan yang lebih merata (Sumarto, Vothknech, 2014). Wijaya,

1.3 Gambaran Studi

Hasil Studi Dinilai Ketimpangan di Perdesaan di Indonesia ditampilkan melalui kertas kerja ini. Secara khusus studi bertujuan untuk melihat berbagai faktor di dalam kerangka modal penghidupan dan mengaitkannya dengan dinamika ketimpangan pendapatan yang terjadi di wilayah perdesaan. Data dan informasi yang tersaji akan menjadi bekal bagi pemerintah dan mitra pembangunan untuk meningkatkan pemahaman mengenai faktor-faktor yang terkait dengan ketimpangan dan mendukung upaya mereka dalam menanggulangnya

Kertas kerja ini merupakan keluaran pertama dari studi tentang ketimpangan perdesaan yang dilakukan oleh The SMERU Research Institute dengan didukung oleh Yayasan TIFA. Untuk melengkapi informasi yang disajikan pada kertas kerja ini, akan ada kertas lain (Kertas Kerja 2 dan 3). Kertas 2 dan 3 merupakan hasil dari dua studi lanjutan yang melihat secara lebih dalam Determinan Ketimpangan Perdesaan dan Tingkat Desa Kontribusi Faktor Perubahan Ketimpangan di Perdesaan

1.3.1 Kerangka Konseptual

Ketimpangan adalah sebuah konsep yang menggambarkan kondisi tidak setara, terutama dalam hal status, hak, dan kesempatan (United Nations, 2015). Berbeda dengan kemiskinan yang diukur berdasarkan nilai batas yang ditetapkan, ketimpangan melihat perbedaan standar hidup antara orang/kelompok di dalam masyarakat (McKay, 2002). Ketimpangan bisa dilihat secara moneter dan nonmoneter. Ketimpangan moneter diukur menggunakan data distribusi pendapatan/pengeluaran (lihat Cowell, 2007; Doris et al., 2015). Sementara itu, yang dilihat dalam ketimpangan nonmoneter adalah dimensi pendapatan/pengeluaran, seperti pendidikan dan keterampilan, kesehatan, kesempatan, kepemilikan aset, dan bahkan pencapaian (Heshmati, 2004).

Terdapat banyak cara untuk mengukur ketimpangan moneter, namun yang paling luas digunakan adalah Indeks Gini di mana nilai indeks Gini 0 berarti sepenuhnya setara dan 1 berarti sepenuhnya tidak setara (The World Bank, 2016). Indeks Gini merupakan indikator yang secara formal dipakai oleh Pemerintah Indonesia untuk melihat ketimpangan moneter. Selain Gini, cara untuk mengukur ketimpangan lainnya yang juga banyak digunakan adalah Palma dan Indeks Theil. Ketimpangan yang akan dilihat dalam kerangka ini adalah ketimpangan moneter sebagian besar menggunakan prinsip perhitungan indeks Palma dan sebagian lainnya menggunakan Indeks Gini sebagai indikator (lihat bagian 1.3.2).

Perdesaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai daerah (kawasan) desa. Perdesaan merupakan turunan dari kata *desa* yang di huni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa); (ii) kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesukatan atau dusun (dalam arti pedalaman sebagai lawan kota) (Kotak pedesaan M" " @ oleh kondisi tanah, iklim, dan air sebagai syarat penting bagi terwujudnya pola kehidupan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (M k @ V Mk @32/2004), definisi yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal dan adat

Mengingat sebagian besar data yang akan digunakan dalam studi ini dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS), maka definisi desa dan identifikasi desa mengikuti kriteria yang ditentukan oleh BPS. Menurut BPS, perdesaan adalah status suatu wilayah administrasi setingkat desa/kelurahan yang belum memenuhi kriteria klasifikasi wilayah perkotaan (dalam hal kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian, dan keberadaan/akses pada fasilitas perkotaan). Dalam definisi BPS, desa adalah wilayah administrasi terendah dalam hierarki pembagian wilayah

administrasi Indonesia di bawah kementerian (BPS, 2010). Berdasarkan kategori wilayah desa yang dipakai dalam survei Potensi Desa (Podes), BPS, status desa di Indonesia terbagi dalam desa perkotaan dan desa perdesaan. Desa perdesaan adalah yang menjadi fokus pada penelitian ini. Hingga 2014, dari sekitar 76 ribu desa di Indonesia, diantaranya sekitar 60 ribu desa termasuk dalam kategori desa perdesaan, dan 20% sekitar 15 ribu desa termasuk dalam kategori desa perkotaan.

Kondisi penghidupan dalam studi ini ditangkap melalui kerangka modal penghidupan (*asset*). Ketimpangan yang pada dasarnya adalah perbedaan tingkat pendapatan antar kelompok kesejahteraan, sebagaimana sudah ditunjukkan melalui Gambar 2, merupakan produk dari perbedaan penguasaan modal penghidupan. Selain itu, modal penghidupan juga merupakan aspek kunci dari kerangka kehidupan berkelanjutan yang kepemilikan atau penguasaannya dapat menjadi bekal awal masyarakat untuk menentukan jenis strategi penghidupan untuk mencapai keluaran penghidupan yang diinginkan (IDFD, 1999). Modal juga berfungsi sebagai sumber daya untuk mempertahankan penghidupan dan untuk meningkatkan kesejahteraan (Moser dan Dani, 2008).

Modal penghidupan masyarakat ini dikategorikan dalam lima kelompok: (1) sumber daya manusia (2) sumber daya alam, (3) modal infrastruktur (fisik), (4) modal keuangan dan (5) modal sosial politik (Scoones 1998; dan Morse, McNamara, dan Achol, 2009). Dari aspek tersebut, dalam studi ini, digunakan untuk mengetahui dinamika penghidupan yang terjadi di wilayah perdesaan dan bagaimana keterkaitannya dengan salah satu keluaran penghidupan, yakni ketimpangan. Dalam kerangka penghidupan berkelanjutan, interaksi modal tersebut dengan struktur dan relasi sosial yang berlaku di masyarakat secara simultan menggambarkan kapasitas individu/masyarakat untuk menghasilkan kesejahteraan (Saragih, Lassa, dan Ramli, 2008; dan Alevizou Alexiou, dan Zamenopoulos, 2016). Meskipun demikian dalam studi ini tidak dianalisis semua aspek dari kerangka kehidupan berkelanjutan, namun hanya menggunakan lima modal penghidupan, yang merupakan aspek kunci dari kerangka kehidupan berkelanjutan tersebut.

Dalam kerangka modal penghidupan, ketimpangan di wilayah perdesaan dinilai sebagai kondisi lebar nya kesenjangan antara penduduk termiskin dan terkaya di desa, keadaan tidak optimalnya aset penghidupan dalam menunjang penghidupan yang layak bagi seluruh masyarakatnya. Untuk itu, meskipun pengukuran keluaran berupa penurunan ketimpangan didasarkan pada tingkat kesejahteraan moneter, analisis tetap dilakukan melalui penilaian kondisi kelima aset penghidupan yang pada akhirnya akan menentukan kemampuan masyarakat untuk melakukan mobilitas sosial, yang pada gilirannya dapat mengurangi ketimpangan di wilayah perdesaan.

Bagaimana modal penghidupan ini diukur dapat dilihat pada daftar indikator masing-masing modal yang tersedia di Tabel 1. Sumber manusia terdiri dari kondisi pendidikan dan kesehatan. Sumber daya alam mencakup tipologi wilayah secara geografis dan pemanfaatan lahan sebagai aspek alam paling penting untuk penghidupan masyarakat perdesaan yang masih didominasi oleh usaha pertanian. Modal infrastruktur fisik diwakili oleh ketersediaan infrastruktur dasar. Karena keterbatasan data sekunder yang tersedia, modal keuangan didekati dengan infrastruktur fisik pendukung perekonomian, termasuk di dalamnya infrastruktur keuangan dan infrastruktur kegiatan perdagangan. Terakhir modal sosial akan merangkul beberapa aspek yang turut mendorong atau mengancam kohesi sosial.

Tabel 1. Indikator Modal Penghidupan

Jenis Sumber Daya/Modal Penghidupan	Indikator
Sumber Daya Manusia	Rasio Ketergantungan APK/APM Tingkat pendidikan tertinggi Keluhan kesehatan Masalah gizi Kelahiran dibantu tenaga kesehatan Cakupan imunisasi lengkap Perlindungan Jaminan Kesehatan Masyarakat
Sumber Daya Alam	Tipologi wilayah berdasarkan topografi dan perbatasan dengan hutan dan laut Ketimpangan lahan
Infrastruktur Fisik	Kualitas jalan, Sarana telekomunikasi, Cakupan listrik
Infrastruktur Pendukung Perekonomian	Ketersediaan lembaga keuangan di desa Ketersediaan kompleks pertokoan dan pasar permanen
Modal Sosial	Partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial dan pemilihan umum Primordialisme Keberagaman identitas (etnis dan agama) Konflik sosial

1.3.2 Metodologi

Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Tujuannya adalah menangkap dinamika ketimpangan dan penghidupan di perdesaan dengan lebih terukur dan dapat diperbandingkan antarwaktu, antarlokasi, dan antaraspek modal penghidupan. Sebagai tahap awal dari serangkaian kertas kerja tentang kondisi ketimpangan perdesaan, kertas kerja ini lebih berperan sebagai dasbor untuk menyajikan kondisi modal penghidupan dan bagaimana itu terkait dengan ketimpangan di perdesaan antar waktu. Oleh karena itu, teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan menampilkan tabulasi silang yang menunjukkan indikator-indikator yang mewakili masing-masing modal penghidupan pada satu sisi dan kelompok kesejahteraan pada sisi lain.

Secara umum, analisis dilakukan di tingkat individu/rumah tangga, kecuali modal sumber daya alam serta infrastruktur fisik dan keuangan. Di kedua modal penghidupan tersebut, analisis dilakukan di tingkat desa. Hal ini terkait dengan keterbatasan ketersediaan data yang tidak bisa menyajikan akses atau utilitas masyarakat terhadap kedua modal tersebut. Akibatnya, informasi yang disajikan lebih pada ketersediaannya di level desa. Sekalipun tidak bisa menunjukkan akses masyarakat, setidaknya variasi ketersediaannya ini dapat menggambarkan ada atau tidaknya hambatan struktural masyarakat dalam menjangkau kedua modal tersebut.

Ketimpangan moneter dan kondisi modal penghidupan dibandingkan menurut level analisisnya. Pada analisis di level mikro (individu/rumah tangga), ketimpangan dapat bervariasi kondisi modal penghidupan antar kelompok kesejahteraan. Secara spesifik, seluruh masyarakat perdesaan akan dikelompokkan menjadi lima tingkat menurut pengukurannya. Kondisi modal penghidupan yang dimiliki oleh 20% kelompok terkaya akan disandingkan dengan kelompok 20% kelompok termiskin. Ketimpangan diidentifikasi ketika kondisi modal penghidupan di antara

masyarakat perdesaan di 20% kelompok terkaya jauh lebih baik dibandingkan dengan yang ada di antara masyarakat di 20% terbawahnya merupakan cara pengukuran ketimpangan yang cukup kasarnya hanya bisa menggambarkan ketimpangan secara umum saja. Namun, melihat ketimpangan dengan membandingkan yang terkaya dan termiskin saja dan mengabaikan distribusi masyarakat di kelompok menengah merupakan cara perhitungan indikator ketimpangan Atkinson (Indeks Palma) indikator ini, yang juga familiar disebut sebagai *Dispersion Ratio* dibangun dengan membagi pengeluaran (pendapatan) masyarakat di desil terkaya dengan yang desil termiskin (Hughton dan Khandker 2009).

Pada analisis di level desa, ketimpangan diamati dari pengelompokan kesejahteraan di suatu desa juga pengelompokan ketimpangan di tingkat dengan pengelompokan kesejahteraan di level mikro, di sini desa perdesaan di seluruh Indonesia dikelompokkan dan dibandingkan menurut rata-rata pengeluaran per kapitanya. Namun cara ini lebih menggambarkan ketimpangan antar desa perdesaan Indonesia di alih antar masyarakat di dalam desa. Oleh karena itu, cara ini tidak dilengkapi dengan pengelompokan tingkat ketimpangan sebagai upaya untuk melihat keterkaitan antara kondisi modal penghidupan desa dengan tingkat ketimpangan desa tersebut. Perlu diperhatikan bahwa tingkat ketimpangan level desa di indeks Gini. Berikut adalah formula perhitungan indeks Gini:

—

di mana $\frac{Y}{N}$ adalah proporsi pengeluaran kumulatif individu dalam suatu populasi dalam hal ini adalah populasi desa indeks Gini ini bernilai antara 0 (merata sempurna) (tidak timpang sempurna). Dengan kata lain, semakin mendekati indeks Gini sebuah desa, semakin timpang kesejahteraan masyarakat di dalam desa tersebut. Berdasarkan indeks Gini inilah desa perdesaan dikelompokkan menjadi lima kuintil.

1.3.3 Sumber Data

Data yang digunakan pada analisis ini terdiri dari data (a) survei dan data sensus (penduduk/individu, rumah tangga dan usaha perdesaan). Di antara data survei yang digunakan adalah:

- 1) Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
- 2) Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas)
- 3) Indonesia Family Life Survey (IFLS)

Sedangkan data sensus yang digunakan adalah:

- 1) Sensus Penduduk Nasional (SP)
- 2) Sensus Pertanian
- 3) Sensus Potensi Desa (Podes)

Khusus untuk mendapatkan data koefisien desa, analisis ini juga memanfaatkan Peta Kemiskinan Indonesia yang dibangun oleh The SMERU Research Institute. Peta Kemiskinan adalah data yang menjadi sumber untuk Peta Kemiskinan SMERU yang berupa indikator kemiskinan (tingkat kemiskinan, kedalaman, dan keparahan) serta ketimpangan (untuk setiap desa/kelurahan dan kecamatan). Indikator kemiskinan dan ketimpangan dalam data Kemiskinan merupakan hasil estimasi berdasarkan metode *small area estimation* (SAE) atau estimasi wilayah keSAE yang digunakan untuk menghasilkan estimasi indikator kemiskinan dan

ketimpangan dalam data Peta Kemiskinan merupakan metode SAE yang dikembangkan oleh Filmer, Lanjouw, dan Lanjouw (2003) dengan memanfaatkan sumber data dari BPS Susenas dan SP. Susenas digunakan karena memiliki informasi terkait pengeluaran rumah tangga yang dijadikan sebagai variabel dasar untuk penghitungan kemiskinan dan ketimpangan SP digunakan karena cakupan observasinya yang menyeluruh (semua populasi). Sumber data selain SP yang digunakan untuk mendukung penghitungan indikator kemiskinan dan ketimpangan dalam data Peta Kemiskinan adalah Podes. Podes dapat menghasilkan variabel agregat tingkat desa/kelurahan, selain dari variabel agregat tingkat desa/kelurahan yang diperoleh dari SP. Variabel agregat tingkat desa/kelurahan digunakan untuk mengukur *regional effect* yang dapat berpengaruh terhadap galat standar hasil estimasi yang menggunakan metode SAE.

Peta Kemiskinan pertama kali dibuat SMERU pada tahun 2003 dengan memanfaatkan SP 2000, Susenas 1999, dan Podes 2000. Peta tersebut menyediakan data tingkat kemiskinan dan ketimpangan hingga tingkat desa di seluruh Indonesia. Seiring dengan dirilisnya SP 2010, peta kemudian diperbaharui pada tahun 2012. Sebanyak 627 desa diestimasi tingkat kemiskinan dan ketimpangannya pada peta kemiskinan 2010. Pada tahun 2015, peta kembali diperbaharui untuk mengakomodasi perubahan yang terjadi selama 2010 hingga 2015.

Karena informasi ketimpangan di tingkat desa menggunakan Peta Kemiskinan maka jumlah observasi data yang dianalisis mengikuti jumlah desa yang tersedia di Peta Kemiskinan 2010 dan 2015. Total sebanyak 627 desa tersebut terdiri dari 575 di perdesaan dan 692 di perkotaan, atau sekitar 78% bersifat perdesaan dan 21% bersifat perkotaan. Proporsi ini masih sebanding dengan proporsi desa menurut BPS, 80% dan 60% deskripsi lebih jelas atas data lain yang digunakan dalam analisis utama studi ini disajikan dalam Lampiran 1 Tabel A1.

1.3.4 Keterbatasan Studi

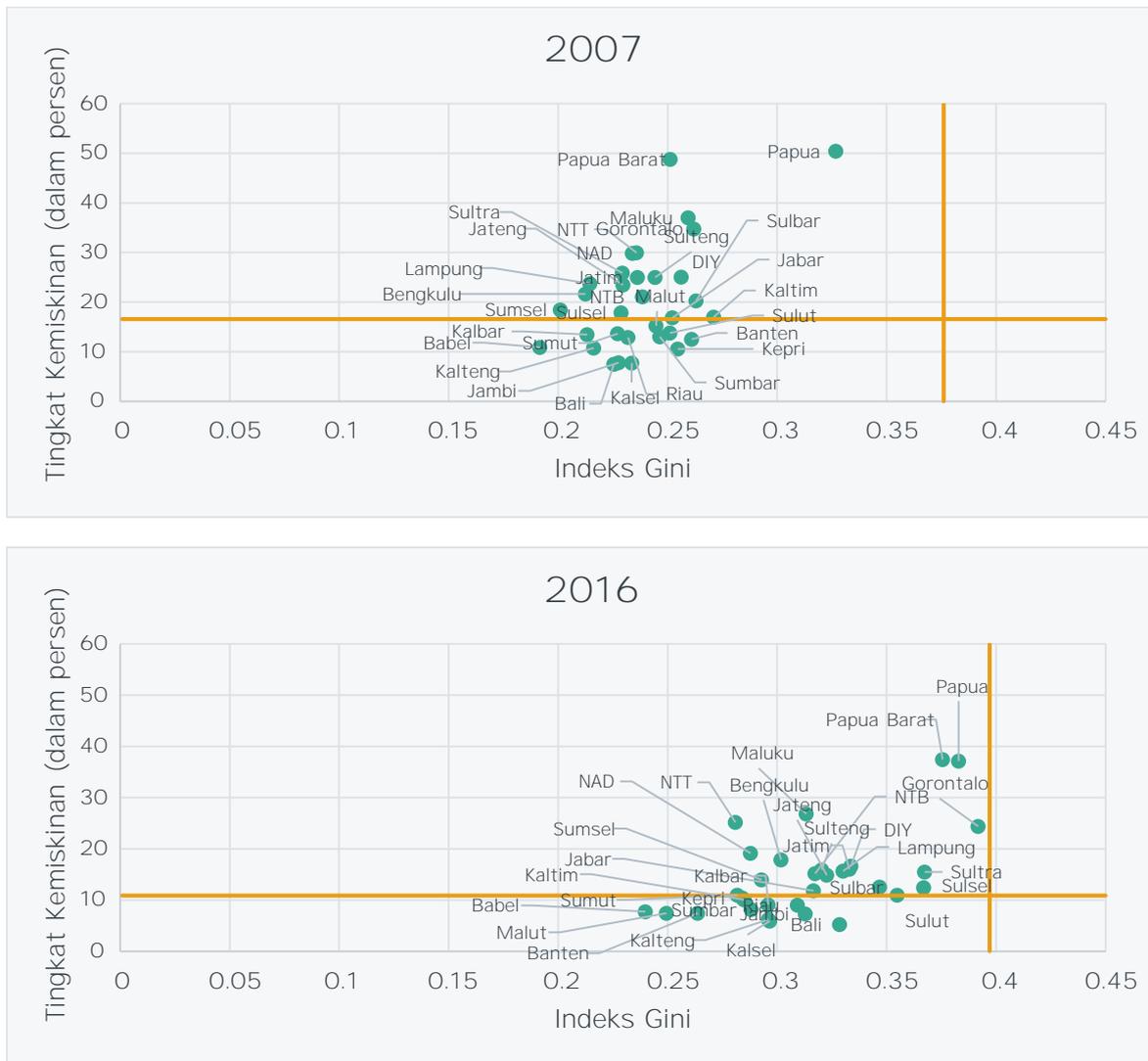
Studi Dinamika Ketimpangan dan Penghidupan di Perdesaan Indonesia menjadi salah satu upaya awal untuk menyediakan bukti yang komprehensif tentang kondisi ketimpangan dan penghidupan di perdesaan Indonesia. Beberapa hal yang menjadi keterbatasan studi disebabkan masih terbatasnya data yang bisa mewakili level desa dan data terdistribusi deskriptif yang disajikan oleh instansi terkait yang menyediakan gambaran tentang aspek modal penghidupan yang didugakan berkaitan dengan ketimpangan moneter yang dihadapi masyarakat perdesaan. Namun, tidak dapat ditarik kesimpulan seberapa kuat asosiasi capaian atau distribusi modal penghidupan tersebut dalam menghasilkan atau mereduksi ketimpangan (moneter). Hal inilah yang akan dijawab dalam Kerja2 yang secara khusus akan membahas faktor yang memengaruhi ketimpangan perdesaan di Indonesia.

II. KETIMPANGAN DAN PERKEMBANGAN PENGHIDUPAN DI DESA

2.1 Wilayah Perdesaan di Indonesia Makin Sejahtera namun Makin Timpang

Wilayah perdesaan di Indonesia makin sejahtera namun makin timpang, dengan ketimpangan terbesar dialami oleh desa di Indonesia Timur. Peningkatan kesejahteraan wilayah perdesaan

ditunjukkan oleh penurunan kemiskinan wilayah tersebut di berbagai provinsi di Indonesia antara 2007 dan 2016. Sementara itu, indikator ketimpangan perdesaan semakin mendekati rata-rata ketimpangan nasional pada 2016. Wilayah perdesaan Papua dan Papua Barat adalah yang paling miskin dan paling timpang antara semua provinsi di Indonesia. Sementara itu, wilayah perdesaan di Bangka Belitung dan Bali adalah yang paling tidak miskin dan paling tidak timpang, baik pada 2007 maupun 2016 (Gambar 5).



Gambar 5. Ketimpangan (Indeks Gini) dan Kemiskinan Perdesaan Menurut Provinsi, 2007 dan 2016

Sumber: Diolah dari Susenas 2007 dan 2016.

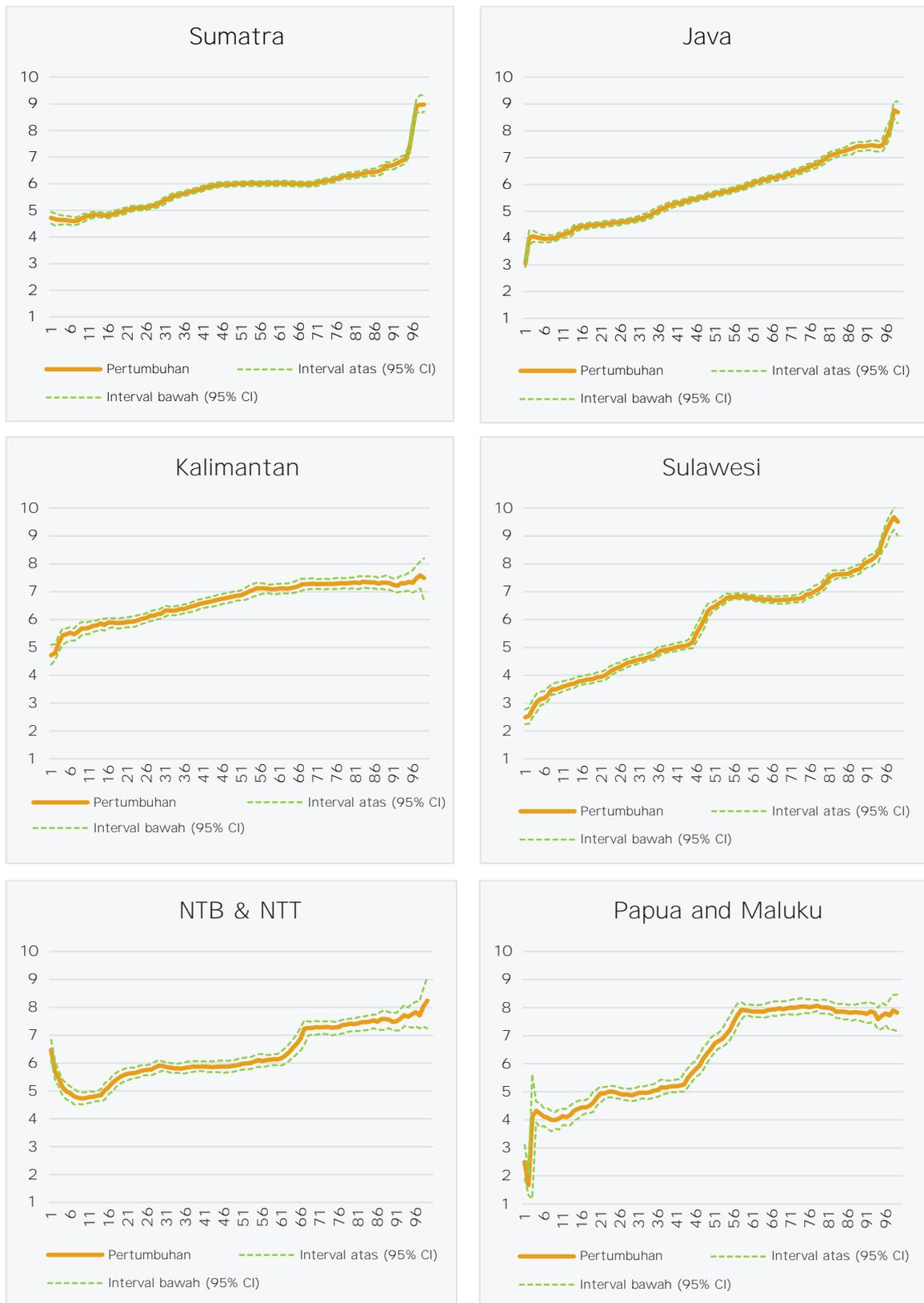
Kecenderungan yang dapat dilihat oleh perhitungan perubahan ketimpangan menggunakan Indeks Palma (2016), yang menunjukkan bahwa desa di Papua, Papua Barat, dan Gorontalo masuk ke dalam kelompok desa dengan ketimpangan terburuk, baik pada 2007 maupun 2016. Sebaliknya, perkembangan yang baik ditunjukkan oleh Nusa Tenggara Timur yang pada 2007 masuk ke dalam kelompok provinsi dengan ketimpangan tertinggi namun pada 2016 masuk ke dalam kelompok dengan ketimpangan terendah (Gambar 6).

		2006				
		Q1 Palma <1.29	Q2 Palma <1.42	Q3 Palma <1.56	Q4 Palma <1.76	Q5 Palma >1.98
2016	Q1 Palma <1.58	Sumatera Utara Bali Kalimantan Selatan	Banten	Kepulauan Bangka Belitung DI Yogyakarta		Nusa Tenggara Timur
	Q2 Palma <1.68	Bengkulu Jawa Tengah Jawa Timur		Jawa Barat Maluku Utara	Kalimantan Timur	
	Q3 Palma <1.91		Sumatera Barat Jambi Kepulauan Riau Sulawesi Tengah	Kalimantan Barat	Maluku	
	Q4 Palma <2.20		Lampung		Aceh Riau Nusa Tenggara Barat	Kalimantan Tengah Sulawesi Barat
	Q5 Palma >2.63			Sulawesi Utara Sulawesi Tenggara	Sulawesi Selatan	Gorontalo Papua Barat Papua

Gambar 6. Perubahan Ketimpangan (Indeks Palma), 2006 dan 2016

Sumber: Diolah dari Susenas 2006 dan 2016.

Ketimpangan menjadi indikasi bahwa pembangunan ekonomi suatu daerah tidak dinikmati secara merata oleh berbagai kelompok kesejahteraan. Ketimpangan pertumbuhan menunjukkan kondisi ketimpangan perdesaan yang berbeda-beda di setiap wilayah Indonesia. Ketimpangan perbedaan pertumbuhan pendapatan antara kelompok terkaya dengan kelompok paling miskin secara berurutan dialami oleh wilayah perdesaan di Sulawesi, Jawa, Papua dan Maluku dan Sumatra. Di Sumatra ketimpangan didorong oleh pendapatan kelompok terkaya yang tumbuh dengan sangat tinggi. Di Papua dan Maluku, pendapatan kelompok miskin tumbuh dengan sangat lambat bahkan kelompok termiskin pertumbuhan pendapatannya hanya $\approx 2\%$ saja. Sebaliknya di NTB (Nusa Tenggara Barat) dan NTT (Nusa Tenggara Timur) pendapatan kelompok termiskin tumbuh dengan sangat tinggi, bahkan menjadi yang paling tinggi dibanding wilayah lain di Indonesia. Ketimpangan yang relatif landai diperlihatkan oleh desa di Kalimantan. Kecenderungan lain yang juga terlihat adalah lonjakan pertumbuhan pendapatan kelompok menengah di desa di Sulawesi (Gambar 7).



Gambar 7. Pertumbuhan Pengeluaran Menurut Persentil di Berbagai Wilayah Perdesaan Indonesia (harga konstan), 2006 – 2016

Sumber: Diolah dari Susenas 2006-2016.

2.2 Struktur Ekonomi Desa yang Telah Berubah

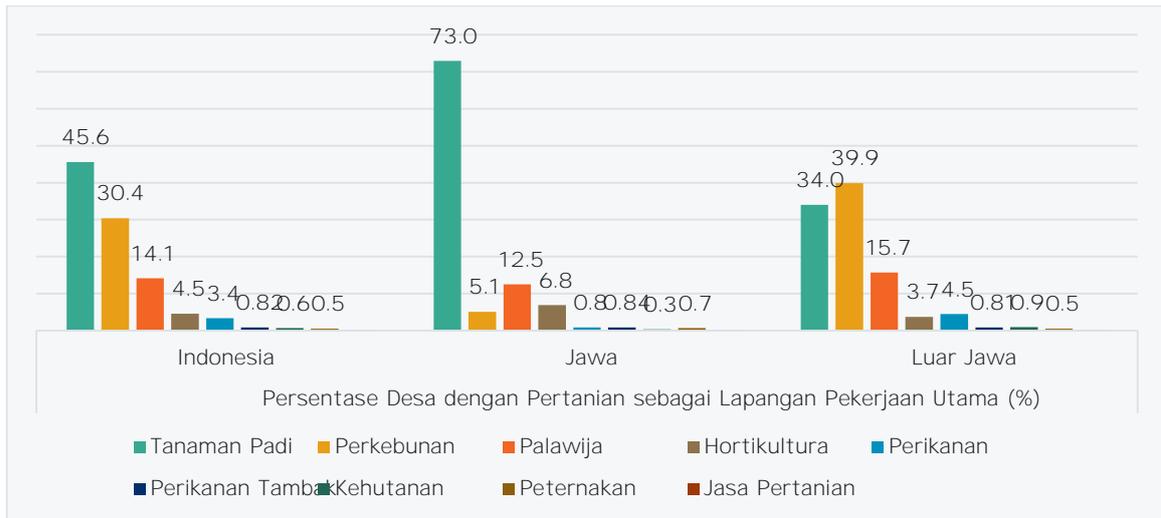
Struktur perekonomian desa di Indonesia berubah seiring dengan pembangunan yang dialami negara ini dalam beberapa dekade terakhir. Data komposisi tenaga kerja menurut sektor di perdesaan menggambarkan hal tersebut. Kontribusi sektor pertanian yang merupakan sumber penghidupan utama masyarakat perdesaan semakin menurun bersamaan dengan meningkatnya kontribusi sektor jasa dan industri. Hingga 2016 sebagian besar tenaga kerja di desa masih diserap oleh sektor pertanian, dengan komposisi rata-rata mencapai 55%. Namun persentase tenaga kerja di sektor jasa dan industri meningkat hingga persentasenya mencapai 29,1% pada 2016. Kontribusi sektor pertanian dalam penyerapan tenaga kerja terbesar ditunjukkan oleh desa di wilayah luar Pulau Jawa dengan rata-rata serapan sebesar 68% dibandingkan di wilayah Jawa yang rata-rata serapannya hanya berkisar pada 2016 (Tabel 2)

Tabel 2. Komposisi Tenaga Kerja Menurut Sektor Pekerjaan di Wilayah Perdesaan Indonesia, 2006 dan 2016

	Pertanian			Industri			Jasa		
	2006	2016		2006	2016		2006	2016	
Jawa	50.82	47.52	-6.5%	14.05	20.96	49.2%	35.13	31.53	-10.2%
Luar Jawa	71.39	62.62	-12.3%	6.96	10.34	48.6%	21.65	26.04	20.3%
Sumatra	71.79	63.51	-11.5%	6.3	9.87	56.7%	21.91	26.62	21.5%
Jawa	50.82	47.52	-6.5%	14.05	20.96	49.2%	35.13	31.53	-10.2%
Kalimantan	70.45	60.32	-14.4%	8.03	13.27	65.3%	21.52	26.41	22.7%
Sulawesi	67.63	58.69	-13.2%	6.52	11.67	79.0%	25.86	29.65	14.7%
NTT, NTB, Papua Barat, Papua	74.88	71.23	-4.9%	8.52	8.11	-4.8%	16.6	20.66	24.5%

Sumber: Diolah dari Susenas 2006 dan 2016.

Sebagian besar pekerja sektor pertanian bekerja pada subsektor pertanian tanaman pangan, terutama sebagai petani padi, diikuti oleh petani perkebunan dan petani palawija. Jika dilihat per wilayah, sebagian besar petani di Jawa adalah petani padi, diikuti oleh petani palawija, hortikultura, dan tanaman perkebunan. Corak yang berbeda ditunjukkan oleh komposisi pekerjaan subsektor pertanian yang digeluti oleh petani di luar Jawa, yang didominasi oleh petani perkebunan, diikuti oleh petani padi, palawija, perikanan, dan hortikultura (Gambar 8)



Gambar 8. Komposisi Tenaga Kerja Menurut Subsektor Pertanian di Wilayah Perdesaan Indonesia, 2014

Sumber: Podes, 2014.

Transisi penghidupan perdesaan memiliki kontribusi sektor pertanian menurun seiring dengan pembangunan ekonomi bukannya fenomena unik Indonesia. Fenomena ini berlangsung di berbagai belahan dunia dan sudah dimulai sejak beberapa dekade lalu (Anderson, 1987; dan Martin dan Warr, 1990). Penyerapan tenaga kerja yang cukup besar masih ditemukan di sektor pertanian. Jumlah tenaga kerja maupun kontribusinya dalam total pendapatan terus mengalami penurunan. Fenomena ini salah satunya bisa dijelaskan oleh penuaan tenaga kerja sektor pertanian (Tabel 3).

Tabel 3. Rata-rata Usia Petani, 2006 dan 2015

	Laki-laki			Perempuan		
	2006	2015		2006	2015	
Nasional	41	43	↑	41	44	↑
Sumatera	38	40	↑	39	42	↑
Jawa	44	47	↑	44	48	↑
Kalimantan	38	40	↑	37	41	↑
Sulawesi	39	40	↑	39	42	↑
NTB, NTT, Maluku, dan Papua	38	39	↑	36	38	↑

Sumber: Diolah dari Susenas, 2006 dan 2015.

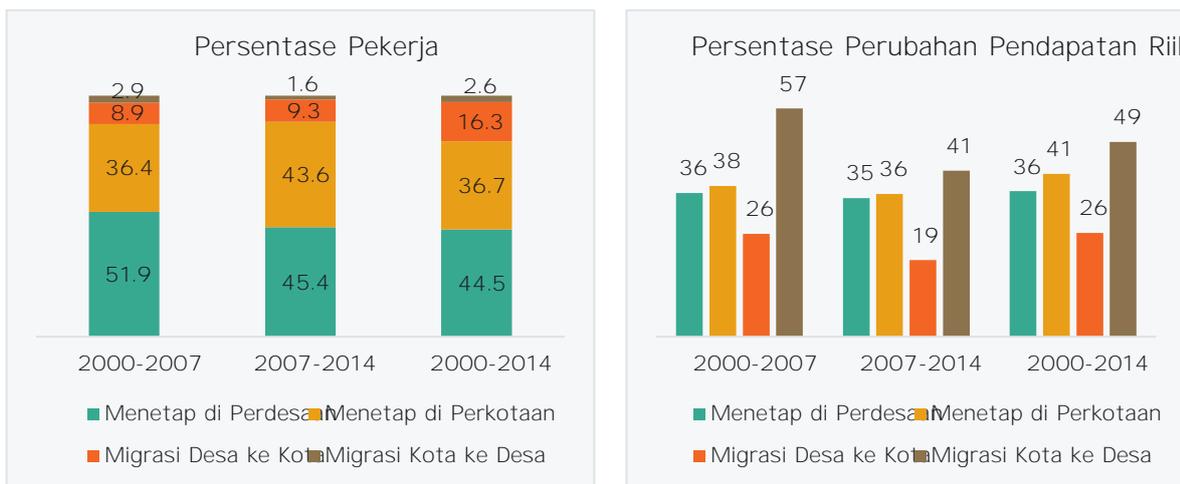
2.3 Transisi Penghidupan Masyarakat Perdesaan

2.3.1 Migrasi keluar desa dan harapan akan kesejahteraan yang lebih baik

Migrasi dari desa ke kota semakin menjadi strategi utama untuk keluar dari kemiskinan di desa. Orang yang bermigrasi antara provinsi menikmati pekerjaan, pendapatan, dan kesejahteraan yang setidaknya sama atau lebih baik daripada orang yang tidak bermigrasi (Memig 2010). Keluarga yang ditinggalkan juga ikut menikmati remitan yang dikirimkan oleh anggota keluarganya yang bermigrasi (Démurger dan Wang, 2016). Melalui remitan, migrasi desa ke kota berdampak pada

pembangunan perekonomian desa. Di tengah besarnya hambatan mengakses modal finansial di desa, remitansi bisa menjadi sumber keuangan untuk keluarga yang ditinggalkan mereka dapat menjalankan usaha pertanian, memitigasi dan meningkatkan daya beli (World Bank, 2007)

Mengamati data individu longitudinal Indonesia, dapat diketahui mobilitas para pekerja dari desa ke kota atau sebaliknya pada periode waktu yang ditunjukkan pada Gambar 9. Walaupun menempati proporsi tertinggi dibandingkan dengan tipe mobilitas lainnya, migrasi desa ke kota, dan migrasi kota ke desa, persentase individu bekerja di desa yang memutuskan tetap dan bekerja di desa semakin menurun. Dari 7,88 individu bekerja yang diamati proporsi yang menetap dan bekerja di desa turun dari 5% pada 2000-2007 menjadi hanya 4% pada 2007-2014. Hal ini semakin diperkuat oleh kecenderungan perpindahan individu bekerja dari desa ke kota yang lebih besar dibandingkan dari kota ke desa, baik dalam jangka sedang antara 2000-2007 dan 2007-2014, maupun dalam jangka panjang antara 2000-2014. Dalam jangka sedang sekitar 9% dari individu yang bekerja di desa memutuskan berpindah lokasi tempat tinggal ke kota. Persentase individu yang bekerja di desa yang memutuskan untuk berpindah dari ke kota meningkat dalam jangka panjang sekitar 16%. Sebaliknya, individu bekerja di kota yang memutuskan untuk berpindah lokasi tempat tinggal jumlahnya sangat kecil, hanya berkisar antara 1% hingga 2% saja dalam jangka sedang maupun panjang.



Gambar 9. Perpindahan Lokasi Tempat Tinggal di antara Pekerja dan Pertumbuhan Pendapatannya (Riil)

Sumber: Diolah dari IFLS 2000, 2007, dan 2014

Dikaitkan dengan pertumbuhan pendapatannya secara periode waktu, perbaikan kesejahteraan lebih banyak dirasakan oleh individu bekerja di kota yang memilih untuk menetap di kota, dibandingkan dengan individu bekerja di desa yang memilih untuk menetap di desa, dengan perbedaan yang tidak terlalu jauh terutama dalam jangka sedang. Dalam jangka sedang antara 2000-2007, individu bekerja di kota yang menetap di kota yang kesejahterannya membaik sebanyak 38%, sementara di desa 36%. Perbedaan yang tidak terlalu jauh juga ditunjukkan

¹Longitudinal yang dimaksudkan di sini adalah orang yang sama disurvei dari waktu ke waktu sehingga diketahui dinamika kehidupannya

²Pertumbuhan pendapatan riil yang dimaksudkan adalah pendapatan antarperiode yang sudah dikoreksi dengan inflasi dihitung dengan membagi nilai pendapatan tahun tersebut dengan indeks harga konsumen tahun yang sama, tetapi dengan tahun dasar 2000 (Widyadarmasari, 2009)

jangka sedang antara 2007-2014, yaitu individu bekerja di kota yang kesejahteraannya membaik sebesar 35% sementara di desa 36% sekaligus menjelaskan bahwa secara umum terjadi sedikit penurunan persentase individu baik di desa maupun di kota yang tingkat kesejahteraannya membaik. Perbedaan yang lebih signifikan ditunjukkan dalam jangka panjang, ditunjukkan oleh persentase individu bekerja di kota yang menetap yang kesejahteraannya membaik mencapai 41, sementara yang menetap di desa hanya 36% (Gambar 9)

Sementara itu, antara individu bekerja yang melakukan migrasi, kesejahteraan yang lebih baik ditunjukkan oleh individu bekerja di kota yang memilih untuk pindah ke desa dibandingkan sebaliknya, dengan perbedaan yang sangat mencolok dalam jangka sedang maupun panjang. Sebagai gambaran, individu bekerja di kota yang memilih untuk pindah ke desa kesejahteraannya membaik dalam jangka sedang (antara 2007 dan antara 2014) mencapai 37 dan 4%, sementara individu bekerja di desa yang memilih untuk pindah ke kota yang kesejahteraannya membaik dalam jangka sedang di periode yang sama hanya mencapai 26 dan 19%. Pola yang sama ditunjukkan oleh kecenderungan yang ditunjukkan dalam jangka panjang antara 2007-2014 (Gambar 9)

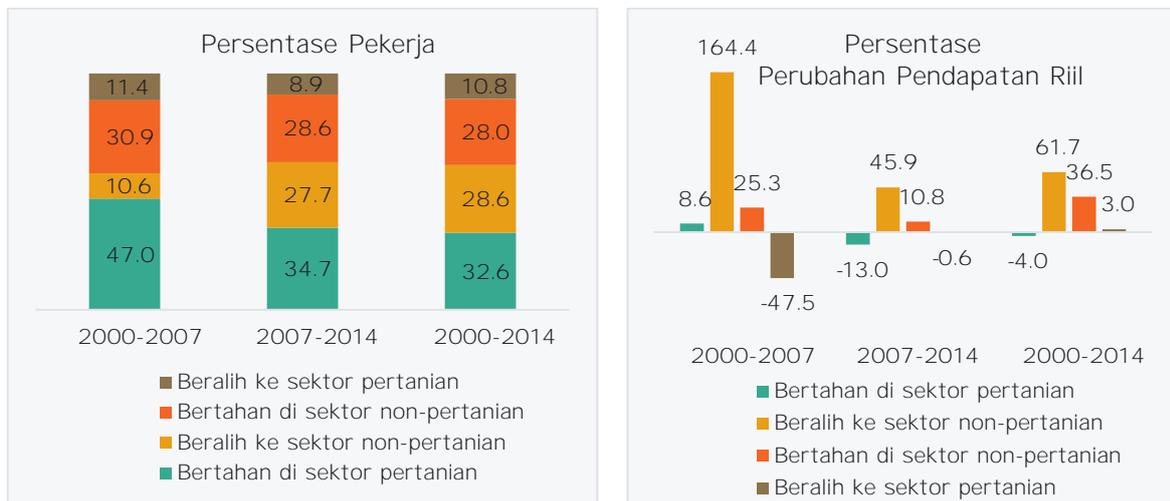
Pengaruh migrasi terhadap ketimpangan dan kemiskinan salah satunya dijelaskan oleh remigrasi. Sebagian ahli berpendapat bahwa migrasi dan remigrasi bisa menurunkan kemiskinan dan ketimpangan (Bloom dan Khanna, 2007), dan sebaliknya yang menentang kontribusi positif migrasi dan remigrasi terhadap kemiskinan dan ketimpangan adalah Lipton (1980) melalui penelitiannya yang mengambil studi kasus di perdesaan yang menemukan bahwa migrasi merupakan hal mahal hingga hanya orang dari kelompok kesejahteraan atas saja yang lebih banyak bisa mengatasinya. Pada akhirnya ini akan mendorong peningkatan ketimpangan di perdesaan (Lipton, 1980). Seperti halnya Lipton, Mollers dan Meyer melihat adanya hambatan yang dihadapi orang dari rumah tangga menengah bawah untuk mengakses kesempatan bermigrasi. Studi yang dilakukannya di perdesaan Kosovo bahkan memperlihatkan bahwa yang melakukan migrasi, orang dari kelompok kesejahteraan atas adalah yang paling banyak menikmati hasilnya (Mollers dan Meyer, 2014). Hasil yang berbeda didapat oleh studi yang dilakukan menggunakan dataset yang meliputi 71 negara berkembang, yang membuktikan bahwa migrasi dan remigrasi secara signifikan berkontribusi terhadap penurunan, tingkat, kedalaman, dan keparahan kemiskinan namun dengan catatan bahwa migrasi yang dilakukan adalah migrasi internasional (Adams Jr. dan Page, 2005)

Beberapa literatur mencoba mencari penjelasan mengenai hubungan remigrasi dengan ketimpangan dan kemiskinan dengan melihat kontribusi remigrasi terhadap perubahan kesejahteraan rumah tangga. Salah satunya ditemukan bahwa kontribusi remigrasi terhadap kesejahteraan ditentukan oleh beberapa faktor, seperti jumlah yang menerima remigrasi, jumlah remigrasi dan siapa anggota keluarga yang melakukan migrasi (Mollers dan Meyer, 2014). Hubungan antara migrasi desa ke kota dengan ketimpangan bisa dijelaskan baik dari sisi penawaran maupun sisi permintaan. Dengan tingkat ketimpangan perkotaan yang lebih tinggi dibandingkan perdesaan, urbanisasi akan mendorong peningkatan ketimpangan secara keseluruhan (Akita, Lukman, dan Yan, 1999). Terlebih, jika penduduk desa yang bermigrasi ke perkotaan adalah mereka yang produktif dari kelompok kesejahteraan bawah (Eastwood dan Lipton, 2005). Serupa dengan partisipasi pada pekerjaan migrasi berfungsi sebagai strategi bertahan hidup dan alternatif sumber penghasilan di tengah kondisi lapangan pekerjaan nonpertanian di desa yang umumnya terbatas pada banyak kasus orang bermigrasi ke daerah yang lebih maju melakukan berbagai pekerjaan nonpertanian.

2.3.2 Pekerjaan nonpertanian menjadi pilihan bagi masyarakat yang menetap di perdesaan untuk memperoleh kesejahteraan lebih baik

Di antara orang-orang yang menetap di desa, bentuk strategi penghidupan lain yang dilakukan adalah menetap di sektor pertanian namun meningkatkan produktivitasnya atau berpindah dari sektor pertanian ke sektor nonpertanian. Pekerja sektor pertanian dan nonpertanian perdesaan saling terkait erat sehingga keduanya bersifat *countercyclical*. Peningkatan tenaga kerja di sektor nonpertanian turut dipengaruhi oleh menurunnya keterlibatan tenaga kerja di sektor pertanian, misalnya karena musim tani yang sudah selesai. Pekerja nonpertanian di perdesaan selain berkontribusi dalam menunjang pendapatan/pengeluaran juga berfungsi sebagai penyangga ketika menghadapi guncangan. Sektor nonpertanian biasanya berskala kecil, bersifat informal, dilakukan di rumah, dan kontribusinya terhadap perekonomian desa linear dengan serapan terhadap kelebihan tenaga kerja di luar masa panen (Carletta et al., 2007).

Transformasi struktural ditandai dengan dua fakta umum, yaitu menurunnya kontribusi sektor pertanian dalam PDB dan dalam jumlah pekerja. Semakin melebarnya perbedaan di antara keduanya (The World Bank, 2007). Dua hal ini sangat nyata terjadi di Indonesia selama dua dekade terakhir. Pada tahun 1980, kontribusi sektor pertanian dalam PDB adalah 54%. Pada tahun 2014, kontribusi sektor pertanian dalam PDB adalah 13,3% dan 3,4% (BPS, berbagai tahun). Dengan kata lain, rasio kontribusi pertanian dalam PDB terhadap kontribusi pertanian dalam jumlah pekerja menurun sangat tajam dalam periode tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun terjadi pertumbuhan pesat di sektor nonpertanian, realokasi pekerja dari sektor pertanian ke sektor nonpertanian terjadi lambat. Hal ini diduga menjelaskan stagnasi dalam penurunan kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir (Suryahadi, Marsud, dan Hidayat, 2018). Selain itu, hal ini juga menunjukkan bahwa orang-orang miskin masih terkonsentrasi di area perdesaan dan di sektor pertanian (The World Bank, 2007).



Gambar 10. Perubahan Sektor Bekerja di antara Pekerja yang Menetap di Perdesaan dan Pertumbuhan Pendapatannya (Riil)

Sumber: Diolah dari IFLS, 2000, 2007, dan 2014.

Terjadi peningkatan cukup tajam proporsi pekerja yang meninggalkan sektor pertanian secara makro realokasinya. Masih dominannya proporsi pekerja yang bertahan di sektor pertanian dalam periode pengamatan jangka panjang menunjukkan bahwa peluang kerja di sektor nonpertanian direspndangan lambat. Hal ini dijelaskan pada Gambar 10 yang

memperlihatkan transformasi struktur pekerjaan yang terjadi dipada jangka sedang dan panjang. Pada periode 2000-2007 sebanyak 10,6% dari total proporsi pekerjaan adalah mereka yang beralih ke sektor nonpertanian. Proporsi ini meningkat lebih dari dua kali menjadi 27,7% pada periode tujuh tahun berikutnya antara 2007-2014. Namun, jika dilihat dalam jangka panjang dari tahun 2000 ke 2014, persentase pekerja yang beralih sektor ke nonpertanian adalah 28,6%. Angka ini tidak terpaut jauh dari 32,6% yang merupakan proporsi pekerja yang bertahan di sektor pertanian.

Proporsi pekerja yang bekerja di sektor pertanian terus tak lepas dari semakin berkurangnya minat terhadap pekerjaan di sektor pertanian. Perkiraan minat pekerja bekerja di sektor pertanian di perdesaan salah satunya disebabkan oleh kemudahan investasi di sektor lain. Panel sebelah kanan di Gambar 10 menunjukkan pekerja yang beralih ke sektor pertanian mengalami penurunan pendapatan dalam periode menengah 2000 dan 2007-2014. Kenaikan pendapatan dialami dalam jangka panjang, namun dengan persentase kenaikan yang sangat kecil 3% dalam periode 2000-2014. Kecenderungan yang serupa dialami oleh pekerja yang bertahan di sektor pertanian. Walau mengalami kenaikan sebesar 6,1% di jangka sedang pertama pada 2007, nilai tersebut jauh lebih kecil dibanding kenaikan pendapatan yang dialami oleh pekerja yang beralih ke sektor nonpertanian yang pendapatannya meningkat drastis sebesar 164,4 persen di periode yang sama. Bisa jadi karena pengaruh negatif Keuangan AS 2008, keuntungan investasi atau upah dari bekerja di sektor nonpertanian lebih rendah pada periode 2007-2014 menjadi 4,9% atau dalam jangka panjang (2000-2014) sebesar 61,7%. Keuntungan investasi sektor pertanian yang lebih tinggi menjadikan perpindahan dari pertanian ke nonpertanian di perdesaan sebagai strategi dengan kemungkinan keuntungan paling besar, bahkan lebih dari migrasi desa ke kota. Hal ini ditunjukkan di Gambar 11. Namun, perlu diperhatikan bahwa sangat mungkin *self-selection bias* yang menyebabkan perkiraan dampak positif dari transisi dari sektor pertanian lebih besar dari yang sebenarnya terjadi.

Masih diragukan apakah dampak positif transisi dari pertanian ke nonpertanian di perdesaan benar karena strategi transisi yang dilakukan seseorang atau karena modal penghidupannya sebelum transisi dilakukan. Besar kemungkinan modal penghidupannya yang sanggup melakukan transisi sektoral ini lebih besar dari orang yang bertahan di sektor pertanian yang sebenarnya tertarik untuk berpindah sektor tetapi tidak mampu akses terhadap peluang pekerjaan/usaha di sektor nonpertanian yang menguntungkan terkait sangat kuat dengan kepemilikan yang lebih tinggi atas sumber daya manusia, akses terhadap finansial, dan berbagai bentuk modal penghidupan lain (Bayer et al 2017). Pun demikian, mengidentifikasi kausalitas antara transisi ke sektor pertanian dan kesejahteraan sejauh ini masih sulit dilakukan (The World Bank, 2017).

Implikasi pekerjaan nonpertanian terhadap kemiskinan dan ketimpangan ditentukan oleh akses orang miskin terhadapnya dan oleh potensi penghasilan yang bisa dihasilkannya. Pada umumnya orang-orang miskin menghadapi hambatan sumber daya manusia yang mencegah mereka mengakses pekerjaan pertanian yang berkualitas. Pada akhirnya, sektor pertanian lebih banyak berfungsi sebagai mekanisme bertabung (saja ketimbang sebagai sumber penghasilan yang layak untuk keluar dari kemiskinan (Carter 2007). Sebagian ahli mendukung peran pekerjaan pertanian dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan di perdesaan, dengan argumen bahwa partisipasi di pekerjaan pertanian justru mendorong produktivitas sektor pertanian yang pada akhirnya berdampak pada kemiskinan dan ketimpangan. Sebuah studi yang menggunakan data survei rumah tangga dari sebuah provinsi di China membuktikan bahwa orang yang hanya menggeluti pekerjaan pertanian secara murni tanpa melakukan redivikasi ke pekerjaan lain tidak memperlihatkan peningkatan produktivitas atas pekerjaan pertaniannya, dan sebaliknya (Sadoulet, dan Zhu, 2005). Studi lain dengan konteks Indonesia, tidak menjelaskan kausalitas, menemukan

indikasi bahwa keterikatan pada pekerjaan nonpertanian sebagai langkah penting untuk keluar dari kemiskinan (McCulloch, Weisbord, dan Timmer, 2007).

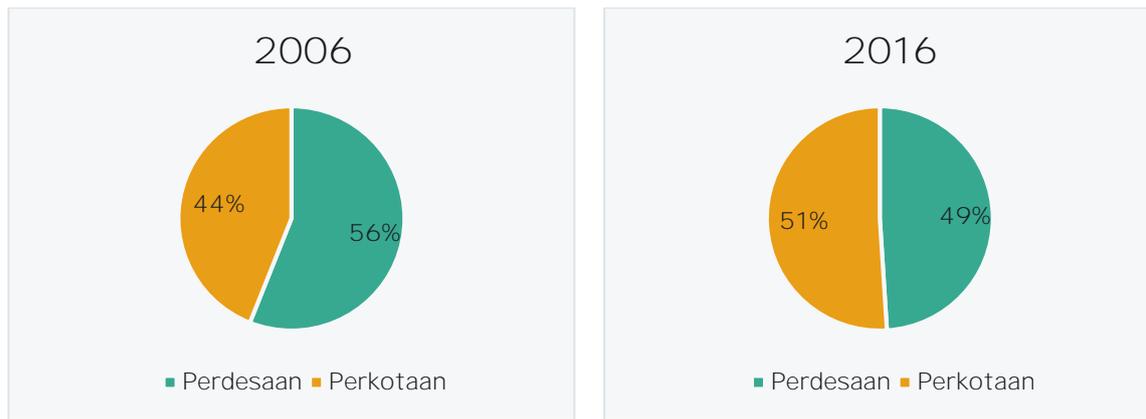
III. SUMBER DAYA MANUSIA PERDESAAN

Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam pembangunan suatu wilayah, termasuk perdesaan (Niritescu, Balan, dan Bucur, 2015). Kualitas sumber daya manusia suatu wilayah akan menjelaskan kekuatan dan daya tahan masyarakatnya dalam menghadapi guncangan dan perubahan yang memengaruhi keberlangsungan pembangunan (Larsen, 2011). Kaitan antara kualitas sumber daya manusia dengan ketimpangan ekonomi bisa dijelaskan dalam dua arah. Pertama, kualitas sumber daya manusia yang timpang dipercaya menjadi hambatan tercapainya pembangunan ekonomi yang merata. Kedua, daerah yang pendapatannya masyarakat timpang memiliki risiko lebih besar mengalami hambatan dalam investasi di bidang pembangunan manusia seperti pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas (Kilwa, Kennedy, dan Lochner, 1997).

Bagian ini akan menjelaskan aspek sumber daya manusia, seperti rasio beban ketergantungan, akses dan capaian pendidikan serta akses dan capaian kesehatan. Seperti kecenderungan ketimpangan ekonomi, ketimpangan kualitas sumber daya manusia perdesaan dan perkotaan semakin mengecil didorong oleh semakin baiknya akses dan capaian pendidikan, serta peningkatan status kesehatan dan akses terhadap layanan kesehatan di wilayah perdesaan. Sebaliknya, kesenjangan capaian pendidikan dan kesehatan yang besar masih terjadi antara kelompok kesejahteraan dan antar gender di dalam perdesaan. Ini merupakan sebuah pekerjaan rumah yang cukup menantang untuk diselesaikan mengingat berbagai tantangan perbaikan tersebut harus dijawab perdesaan di tengah tingginya urbanisasi dan tingginya rasio beban ketergantungan pada rumah tangga dari kelompok kesejahteraan terbawah.

3.1 Tantangan Demografi: Urbanisasi dan Rasio Beban Ketergantungan yang Tinggi

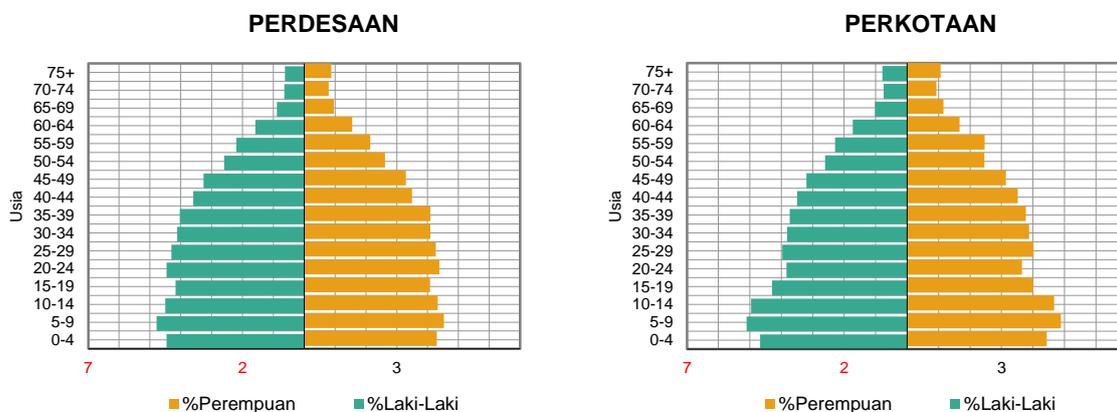
Penduduk perdesaan adalah fitur dominan dalam struktur kependudukan Indonesia, setidaknya semenjak awal 80-an ketika arus urbanisasi mulai berlangsung secara cepat. Indonesia merupakan salah satu negara dengan kecepatan urbanisasi yang tinggi, bahkan melebihi negara-negara yang kini menjadi negara maju pada saat mereka melewati proses industrialisasi (Meng dan Manning, 2012). Puncaknya adalah pada 2014, sebagian besar penduduk Indonesia sudah lebih banyak yang bermukim di wilayah perkotaan dibandingkan dengan perdesaan (Hugo, 2014). Perhitungan menggunakan data Susenas memperlihatkan perubahan demografi cukup signifikan terjadi dalam sepuluh tahun terakhir, dari 2006 hingga 2016. Dalam waktu tersebut, jumlah penduduk Indonesia bertambah dari 221 juta jiwa menjadi 257 juta jiwa, atau meningkat sebesar 16%. Peningkatan terbesar terjadi di wilayah perkotaan karena dalam dekade yang sama komposisi penduduk perdesaan berkurang cukup signifikan dari 56% hingga hanya 49% dari total penduduk Indonesia.



Gambar 11. Komposisi Penduduk Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2006 dan 2016

Sumber: Diolah dari Susenas 2006 dan 2016.

Perpindahan penduduk dari perdesaan ke perkotaan adalah faktor utama urbanisasi. Pemuda dan penduduk usia produktif adalah yang paling banyak melakukan migrasi ke daerah perkotaan. Untuk kasus Indonesia, hal ini didorong oleh penghidupan di perdesaan yang semakin dirasa kurang berprospek seiring dengan semakin sulitnya mengakses kepemilikan lahan dan sangat bergantungnya pekerjaan pertanian terhadap faktor musim. Di lain pihak, daerah perkotaan menawarkan berbagai pekerjaan di sektor informal yang bisa didapat dengan cukup mudah, terlepas dari upah yang rendah (Hugd, 1982). Implikasinya dapat dilihat dari struktur penduduk perdesaan yang menua dan tingginya rasio ketergantungan perdesaan.

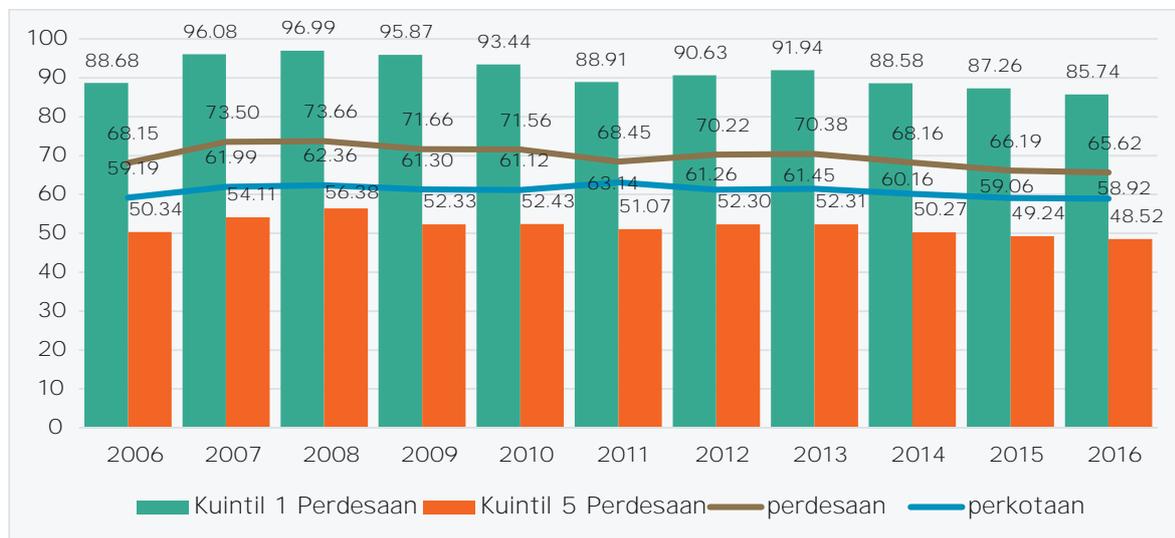


Gambar 12. Piramida Penduduk

Sumber: BPS, 2015.

Rasio beban ketergantungan menggambarkan beban potensial yang harus ditanggung oleh kelompok usia produktif. Rasio beban ketergantungan dihitung dengan membagi jumlah penduduk usia nonproduktif (>15 tahun dan <15 tahun) dengan jumlah penduduk berusia produktif (15-64 tahun). Berdasarkan Survei Penduduk Antarjawa (Suras) 2015 jumlah penduduk kelompok usia produktif memang lebih banyak perdesaan (Gambar 2). Walaupun begitu, peningkatan kelompok penduduk lansia dan anak yang tidak diimbangi peningkatan angkatan kerja berisiko memperlambat pertumbuhan ekonomi (Santacreu, 2016). Dapat dilihat pada Gambar 13 bahwa komposisi penduduk usia lanjut dan anak di perdesaan memutar beban ketergantungan di wilayah ini menjadi lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Selain itu, di antara anggota kelompok kesejahteraan terendah di perdesaan, rasio beban ketergantungan secara

konsisten ditemukan sangat tinggi dari tahun ke tahun. Hal ini mengkhawatirkan karena walaupun lansia dapat tetap berdaya secara ekonomi dan memiliki peran pengasuhan, tanpa diikuti skenario kerja bagi lansia dan jaminan hari tua, kehadiran mereka akan menjadi beban tersendiri bagi penduduk usia kerja di dalam rumah tangga, terutama rumah tangga (Ingghamisk, Chirijevskis, dan Carmichael, 2009).



Gambar 13. Rasio Beban Ketergantungan antarkelompok Pendapatan di Perdesaan, 2006-2016

Sumber: Diolah dari Susenas 2006-2016.

3.2 Pendidikan Masyarakat Perdesaan: Akses yang Lebih Baik dan Tantangan Capaian Pendidikan Tinggi

Pendidikan merupakan aspek sumber daya manusia yang memiliki pengaruh sangat terhadap penurunan ketimpangan. Dengan pendidikan yang tinggi, seseorang mampu pindah dari status ekonomi yang lebih rendah ke yang lebih tinggi dan keluar kemiskinan (Nakamura dan Murayama, 2012). Dalam studi di 50 negara, investasi pada sektor pendidikan dapat menurunkan ketimpangan dalam suatu negara yang digambarkan dengan indeks Gini (Sylwester 2000). Di lain pihak, ketimpangan dalam pendidikan memiliki korelasi dengan ketimpangan dalam pasar kerja dan juga dengan ketimpangan pendapatan. Hal ini dijelaskan oleh pengembalian modal yang akan semakin tinggi seiring dengan meningkatnya pendidikan (An et al., 2009). Perbedaan tingkat pendidikan akan memengaruhi tingkat kemampuan bekerja, pengetahuan, dan informasi yang memengaruhi produktivitas kerja seseorang dan pada akhirnya per (Castello dan Doménech, 2002)

Berbagai studi banyak membahas hubungan ketimpangan dengan pendidikan dengan penekanan pada peningkatan partisipasi masyarakat pada pendidikan (Berthoin dan Fink, 2009; Annabi, Harvey, dan Lan, 2011; Sylwester, 2000; Yang dan. Aika, 2016). Di daerah perkotaan dan perdesaan di Indonesia ketimpangan akses pendidikan telah terjadi sejak pendidikan dasar. Perbedaan kualitas sumber daya manusia ini dapat menjelaskan adanya ketimpangan ekonomi antara daerah perdesaan dan perkotaan (Prang dan Qiu, 2016; Nakamura dan Murayama, 2012).

Di level keluarga, akses terhadap pendidikan sendirilah yang menjadi penjas terhadap peningkatan ekonomi (Pieters, 2011). Pada era pertumbuhan ekonomi yang pesat, orang tua dengan kondisi sosial dan ekonomi yang dialami oleh seseorang sepanjang hidupnya dapat mempengaruhi akses terhadap pendidikan yang layak (Nolan et al., 2009). Investasi yang relatif lebih kecil oleh orang tua yang miskin menyebabkan perbedaan keluaran kualitas pendidikan masa depan walaupun anak memiliki kemampuan yang sama (Yang dan Qiu, 2016). Lebih lanjut lagi dengan tingginya akses pendidikan penduduk pada kelompok kesejahteraan teratas dan ketimpangan kelompok kesejahteraan terbawah, biaya pendidikan tinggi diprediksi akan semakin tinggi dan menyebabkan orang miskin semakin sulit mengakses pendidikan tinggi dan semakin memperburuk ketimpangan (Nakajima dan Nakamura, 2009). Dengan demikian, perbaikan akses terhadap pendidikan menengah ke atas di area perdesaan, terutama bagi yang berasal dari keluarga termiskin, menjadi faktor yang penting untuk mengatasi masalah ketimpangan. Catatan bahwa perbaikan akses terhadap pendidikan dikawal oleh sistem ketata pemerintahan yang baik (Baker et al., 2008; Annabi, Harvey dan Lan, 2011).

3.2.1 Ketimpangan pendidikan antar kelompok kesejahteraan ditengah semakin membaiknya akses pendidikan di perdesaan

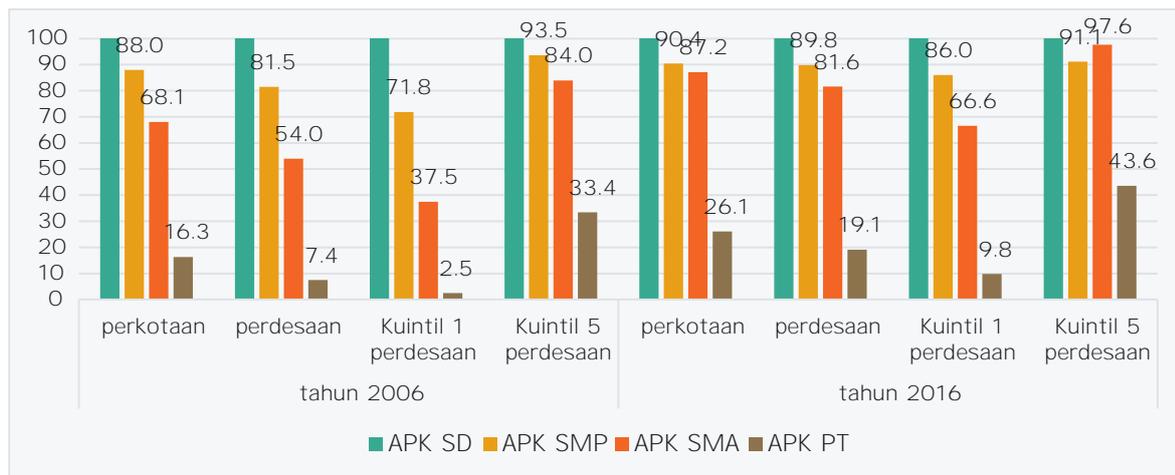
Sekalipun rata-rata lama sekolah di perkotaan lebih tinggi daripada di perdesaan, keduanya mengalami peningkatan selama sepuluh tahun terakhir (2006-2016). Dengan pertumbuhan tercepat dialami oleh penduduk perdesaan. Tahun 2006, rata-rata lama sekolah di perkotaan 1,3 kali rata-rata lama sekolah di perdesaan, sedangkan pada tahun 2016 perbandingan tersebut menyempit menjadi 1,24; kali rata-rata lama pendidikan perdesaan telah mencapai 207 tahun, sementara di perkotaan mencapai 261 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor pendidikan di perdesaan sedang mengejar ketertinggalannya dari di perkotaan, sebagaimana disampaikan oleh Takahiro (2017) bahwa dalam hal ini, rata-rata lama pendidikan di perdesaan Indonesia meningkat dari 5,1 tahun pada 1997 menjadi 6,3 tahun pada 2011.

Perbaikan akses pendidikan di perdesaan dan kesenjangan yang semakin dikurangi dengan kondisi perkotaan secara konsisten ditunjukkan oleh data partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) yang semakin membaik. Berdasarkan data APK dan APM, akses terhadap semua tingkat pendidikan di Indonesia secara umum meningkat dalam 20 tahun terakhir³. Secara umum di Indonesia, tingkat pendidikan yang APK mencapai 100% adalah tingkat pendidikan sekolah dasar diikuti oleh pendidikan tingkat SMP yang mencapai 80% partisipasi masyarakat usia sekolah. Hal ini menunjukkan akses usia 15 tahun ke pendidikan dasar yang lebih baik dibandingkan dengan tingkat pendidikan lainnya. Di perdesaan perbaikan APK dan APM terutama pada jenjang pendidikan dasar (Sekolah Dasar) yang ditunjukkan oleh APK dan APM untuk jenjang pendidikan tersebut di wilayah perdesaan nilainya sedikit lebih baik dibandingkan perkotaan. Untuk jenjang menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas APK dan APM desa mengalami kenaikan yang cukup tinggi, namun tetap saja secara absolut capaiannya masih jauh di bawah kota.

Ketika disparitas pendidikan di perdesaan dan perkotaan semakin mengecil, ketimpangan justru terlihat di dalam perdesaan itu sendiri. Penduduk dengan pengeluaran terendah memiliki lama pendidikan yang lebih rendah jika dibandingkan dengan penduduk dengan pengeluaran tertinggi. Pada tahun 2006, lama pendidikan penduduk kuintil bawah dan teratas adalah 5,95 dan 8,

³APK menunjukkan penduduk usia 7-24 tahun yang bersekolah sesuai dengan tingkat pendidikannya. APM menunjukkan penduduk yang bersekolah pada usia tertentu yang sesuai dengan jenjang pendidikannya. API digunakan untuk mengetahui akses terhadap pembangunan program pendidikan. APM lebih spesifik lagi mengukur kesesuaian usia pendidikan dengan tingkat pendidikan. Selisih antara APK dan APM menunjukkan jumlah penduduk yang menduduki tingkat pendidikan yang tidak sesuai dengan usianya.

sedangkan pada tahun 2016 dan antara dua kuintil tersebut membesar menjadi 635 dan 888. Perbedaan lama pendidikan yang meningkat dari tahun 2006 ke 2016 menjelaskan persistennya ketimpangan akses pendidikan oleh penduduk di kuintil terbawah di perdesaan. Di antar kelompok kesejahteraan di perdesaan, kenaikan tertinggi dialami oleh kelompok penduduk termiskin, namun secara absolut capaiannya masih kelompok penduduk terkaya. Terdapat ketimpangan pencapaian yang cukup tinggi kelompok kesejahteraan di dalam desa, tak hanya pada jenjang pendidikan (SMA dan perguruan tinggi) namun juga pada jenjang pendidikan menengah (SMP). Ini sekaligus mengindikasikan bahwa perbaikan pencapaian pendidikan tingkat SMP, SMA, dan perguruan tinggi paling banyak dialami oleh kelompok kesejahteraan tertingginya.



Gambar 14. Angka Partisipasi Kasar berdasarkan Kelompok Kesejahteraan, 2006 dan 2016

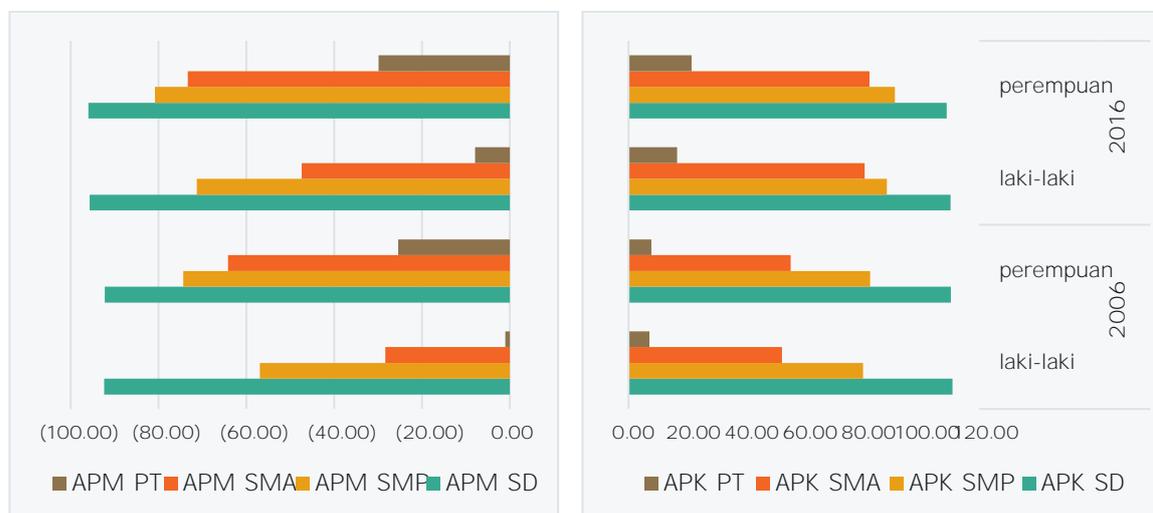
Sumber: Diolah dari Susenas 2006 dan 2016.

3.2.2 Akses perempuan terhadap pendidikan yang lebih baik

Melihat lebih dalam lagi pada masing-masing kelompok kesejahteraan, terlihat adanya perbaikan akses perempuan perdesaan terhadap pendidikan. Pada kelompok kesejahteraan termiskin di perdesaan ternyata perempuan menunjukkan capaian pendidikan yang lebih baik dibandingkan laki-laki, terutama untuk jenjang pendidikan menengah dan atas (SMP, SMA, dan perguruan tinggi). Di kelompok kesejahteraan terkaya di perdesaan perempuan lebih unggul partisipasinya hanya pada jenjang pendidikan perguruan tinggi.

Peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan di perdesaan sejalan dengan kecenderungan nasional yang ditunjukkan oleh rasio partisipasi sekolah anak perempuan laki-laki yang secara umum semakin mendekati paritas, terutama pada tingkat SMP dan SMA. Terdapat banyak hal yang bisa menjelaskan hal ini salah satunya adalah peningkatan partisipasi perempuan di pasar kerja yang semakin meningkat seiring dengan peningkatan upah tenaga kerja berpendidikan. Penjelasan lainnya adalah pertumbuhan sektor jasa yang sudah melebihi sektor industri sem Indonesia pulih dari krisis keuangan Asia dengan banyaknya kebutuhan di sektor inter terhadap tenaga kerja lulusan pendidikan kejuruan yang banyak dipilih oleh perempuan (Alison dan Divya 2013) Walau demikian perbaikan akses pendidikan bervariasi arah yang berbedaketika akses perempuan yang lebih baik lebih banyak ditunjukkan oleh daerah di Pulau Jawad dan Devasahaya (2015) menggarisbawahi tiga tantangan utama yang masih dihadapi Indonesia dalam meningkatkan akses pendidikan terhadap perempuan, yakni

pernikahan dini, ketersediaan sarana pendidikan tinggi ke pelosok wilayah, dan juga ketersediaan lapangan pekerjaan. Terkait hal ini, tantangan terbesar tentu dihadapi oleh daerah perdesaan. Selain akses infrastruktur pembangunan ekonomi yang lebih terbatas dibandingkan dengan perkotaan, daerah perdesaan juga menghadapi angka pernikahan dini yang tinggi. Pada 2013 tingkat pernikahan dini perempuan hingga usia 18 tahun berada di 40%



Gambar 15. Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni berdasarkan Kelompok Kesejahteraan dan Gender, 2006 dan 2016

Sumber: Susenas 2006 dan 2016

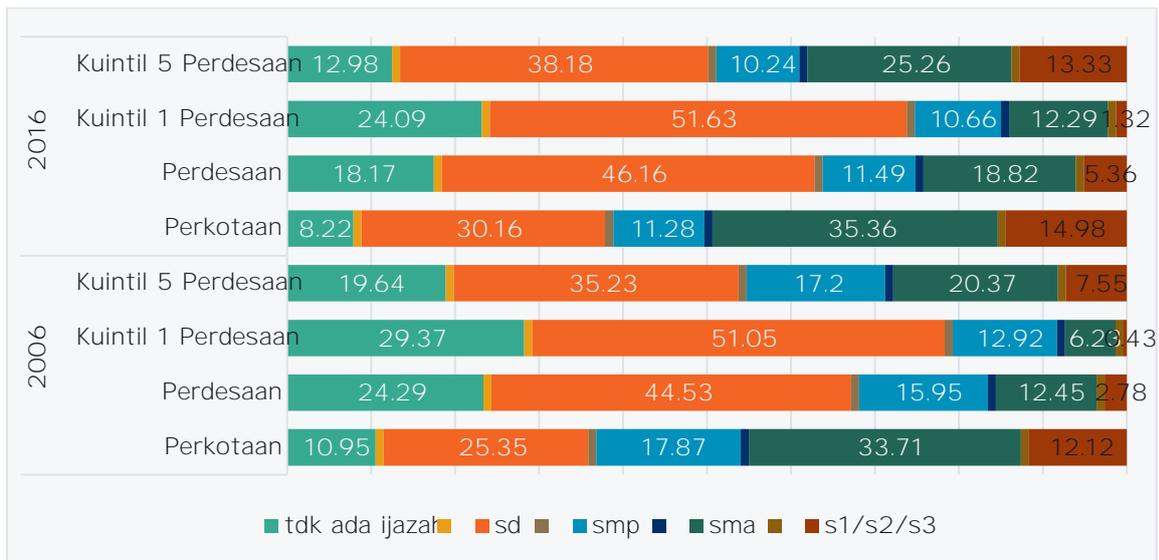
*PT = perguruan tinggi; SMA = sekolah menengah atas; SMP = sekolah menengah pertama; SD = sekolah dasar

**GER = gross enrolment rate/angka partisipasi kasar

***NER = net enrolment rate/angka partisipasi murni

3.2.3 Walaupun akses pendidikan mengalami peningkatan, tetapi capaian pendidikan penduduk miskin di perdesaan masih tergolong rendah

Hubungan nyata pendidikan dengan kesejahteraan dan pekerjaan yang akan diraih seseorang dengan lebih baik digambarkan oleh ijazah yang diraih. Capaian pendidikan penduduk perdesaan yang masih rendah tergambar oleh lebih banyak penduduknya yang tidak memiliki ijazah dan hanya lulusan SD. Perkembangan yang cukup baik terjadi dalam kurun waktu sepuluh tahun dari 2006 hingga 2016 terjadi penurunan komposisi penduduk perdesaan tanpa ijazah yang diiringi oleh kenaikan komposisi penduduk perdesaan yang memiliki ijazah SD dan SMA. Jika dilihat lebih jauh, di antara kelompok-kelompok kesejahteraan di perdesaan, orang-orang tanpa ijazah dan/atau orang-orang yang hanya berijazah SD lebih banyak didominasi oleh penduduk termiskin. Pada 2016, 24% dari penduduk termiskin di perdesaan tidak memiliki ijazah, dan 52% lainnya hanya mengantongi ijazah SD saja. Hanya 11% dan 12% saja yang sudah memiliki ijazah SMP dan SMA. Angka yang jauh lebih kecil merupakan penduduk yang hanya mencapai 3,2%. Capaian pendidikan kelompok termiskin perdesaan berbeda jauh dari kelompok terkaya yang hanya 1% saja yang tidak memiliki ijazah, 38% dengan ijazah SD, 10% dan 2% memiliki ijazah SMP dan SMA, dan sebanyak 49% sudah memiliki ijazah perguruan tinggi (Gambar 16)



Gambar 16. Tingkat Pendidikan Tertinggi di Perkotaan dan Perdesaan Berdasarkan Kuintil Pengeluaran, 2006 dan 2016 (dalam persen)

Sumber: Susenas 2006 dan 2016.

3.3 Kualitas Kesehatan Masyarakat Perdesaan: Paritas dalam Keluhan Kesehatan dan Akses Layanan Kesehatan Dasar, namun Disparitas dalam Capaian Gizi

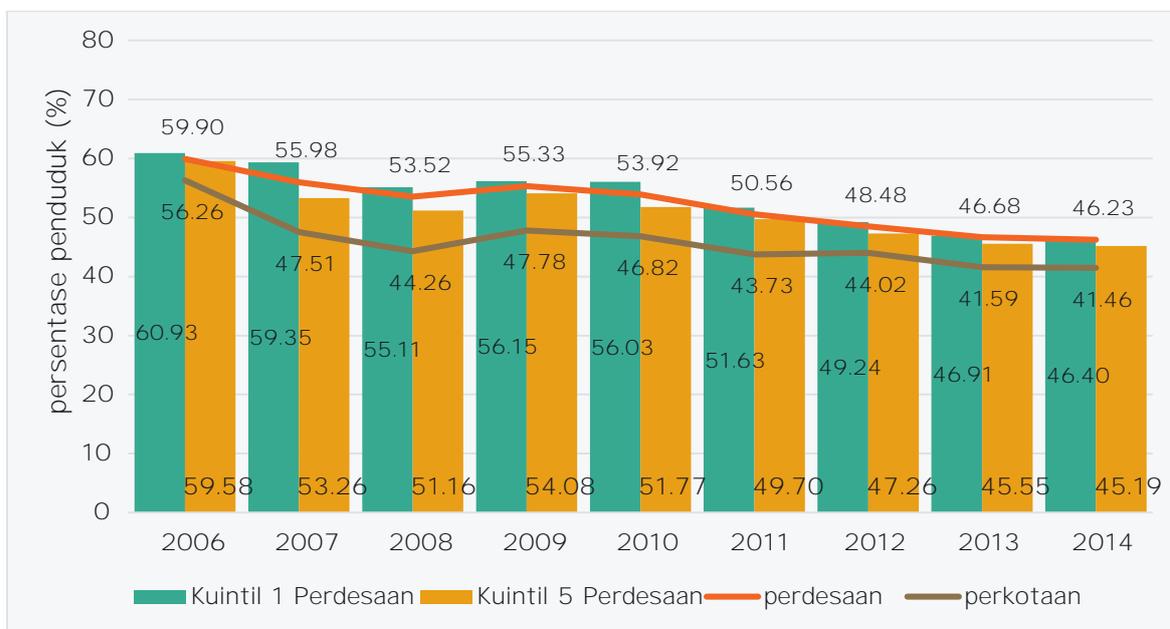
Berdasarkan berbagai studi, hubungan antara kualitas kesehatan dan ketimpangan ekonomi ditemukan dapat bersifat dua arah. Kualitas kesehatan seseorang dapat menjadi determinan posisi sosial seseorang melalui perbedaan pendapatan, produktivitas, dan pendapatan. Sebaliknya adanya ketimpangan ekonomi baik secara absolut maupun relatif ditemukan memiliki dampak terhadap kondisi kesehatan masyarakat yang diukur melalui angka kematian, angka kesuburan, keluhan sakit, dan lain-lain (Nolan et al 2009)

Aspek lain yang juga perlu diperhatikan adalah hubungan ketimpangan ekonomi dengan kualitas kesehatan masyarakat terutama bergantung pada kohesi sosial masyarakat yang digambarkan memburuk dengan adanya ketimpangan (Widjandana, 2002). Semakin timpang suatu masyarakat secara ekonomi, maka semakin lemah pula kohesi sosial yang ada di dalam masyarakat itu sehingga menyebabkan munculnya stigmatisasi, ketimpangan akses terhadap pelayanan kesehatan, dan persepsi masyarakat terhadap kesehatan sendiri (Garthwaite dan Bambra, 2017). Semuanya dapat memperburuk derajat kesehatan masyarakat miskin, yang mengakibatkan ketimpangan kualitas kesehatan antara masyarakat terkaya dan terbawah (Garthwaite dan Bambra, 2017; Vriens, Forns, dan Stafström, 2018). Grafik berikut ini adalah hasil penghitungan terhadap beberapa proksi kualitas kesehatan masyarakat

3.3.1 Kelompok Termiskin Perdesaan Lebih Banyak Mengeluhkan Kondisi Kesehatan daripada Kelompok Terkaya, tetapi dengan Selisih yang Semakin Mengecil seiring dengan Waktu

Secara umum masyarakat perdesaan lebih banyak mengeluhkan menderita penyakit seperti batuk, pilek, demam, diare, dan lain-lain dibandingkan dengan penduduk perkotaan. Proporsi masyarakat yang mengeluhkan gangguan kesehatan menurun sebanyak 7,1% di perdesaan dan 8,4% di

perkotaan dalam satu dekade terakhir. Hal ini dapat menunjukkan perbaikan kualitas dan pengetahuan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Tidak ditemukan yang lebih besar antara kualitas kesehatan masyarakat di pendapatan kuintil teratas dan terbawah berdasarkan laporan keluhan kesehatan. Walaupun demikian, pada daerah perdesaan, persentase masyarakat perdesaan yang mengeluhkan gangguan kesehatan pada kelompok pendapatan 20% terbawah sedikit lebih tinggi dibandingkan kelompok masyarakat dengan pendapatan 20% (Gambar 17)



Gambar 17. Perbandingan Proporsi Keluhan Kesehatan Penduduk Usia Produktif (15-65 tahun) di Perkotaan dan Perdesaan berdasarkan Kuintil Pengeluaran Per Kapita, 2006-2014

Sumber: Diolah dari Susenas, 2006-2014.

3.3.2 Tantangan Pemerataan Capaian Gizi Masyarakat Perdesaan dan Perbaikan Akses Kesehatan Dasar

Terdapat banyak perdebatan terkait hubungan derajat kesehatan yang diukur melalui capaian gizi dengan ketimpangan ekonomi. Alur yang sering dilihat adalah bagaimana kualitas gizi dan juga masalah kesehatan seseorang memengaruhi produktivitas kerjanya pada akhirnya berdampak pada kemampuan meraih pendapatan (Net al. 2009). Angka anak pendek menjadi salah satu proksi penting yang paling banyak dipakai, selain angka kematian, untuk melihat kualitas kesehatan masyarakat secara keseluruhan, sebagian besar ditemukan memiliki korelasi yang erat dengan ketimpangan (Net al. 2009). Penelitian lain menemukan hubungan kuat antara nutrisi dengan produktivitas. Hal ini mendorong perlunya intervensi nutrisi sejak usia dini bahkan sejak masa kehamilan dan masa remaja percapaian untuk mengurangi risiko kesehatan dan mendukung produktivitas di masa depan (Martorell, 2009). Selain itu, beberapa juga melihat asosiasi antara intervensi gizi di usia dini terhadap penghasilan yang lebih tinggi pada kelompok kuintil (Haddinnott, Maluccio, Bean, Flores, dan Martorell, 2008).

Ketimpangan capaian gizi di Indonesia terlihat jelas tak hanya antara kelompok kesejahteraan, namun juga antara wilayah perkotaan dengan pedesaan dan berbagai wilayah kepulauan,

dan juga antara laki dan perempuan. Secara umum, untuk indikator kekurangan gizi (anak pendek, sangat pendek, kurus, dan sangat kurus) rendah tingkat kesejahteraan maka besar prevalensinya, sebaliknya untuk angka kelebihan gizi (gemuk). Prevalensi kurang gizi di wilayah perdesaan jauh lebih besar dibandingkan dengan wilayah perkotaan namun juga sebaliknya untuk kelebihan gizi antar wilayah kepulauan, kekurangan gizi paling besar prevalensinya di Indonesia yakni wilayah Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, disusul oleh Maluku, Papua, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, dan Bali (Tabel 4).

Sementara itu, berdasarkan jenis kelamin, prevalensi kekurangan dan kelebihan gizi lebih besar ditunjukkan oleh kelompok laki daripada perempuan. Hal ini pun ditemukan di studi lain di negara berkembang. Beberapa alasan yang dikemukakan meningkatkan faktor risiko pada anak laki adalah kerentanan bayi laki secara biologis dan faktor kultural (Wahana, 2007). Temuan ini sedikit bertolak belakang dengan di negara lain yang mendapati status kesehatan anak perempuan cenderung lebih buruk di rumah tangga miskin karena adanya favoritisme terhadap anak laki (Dey dan Chaudhuri, 2008; Najnin, Bennett, dan Luby, 2011).

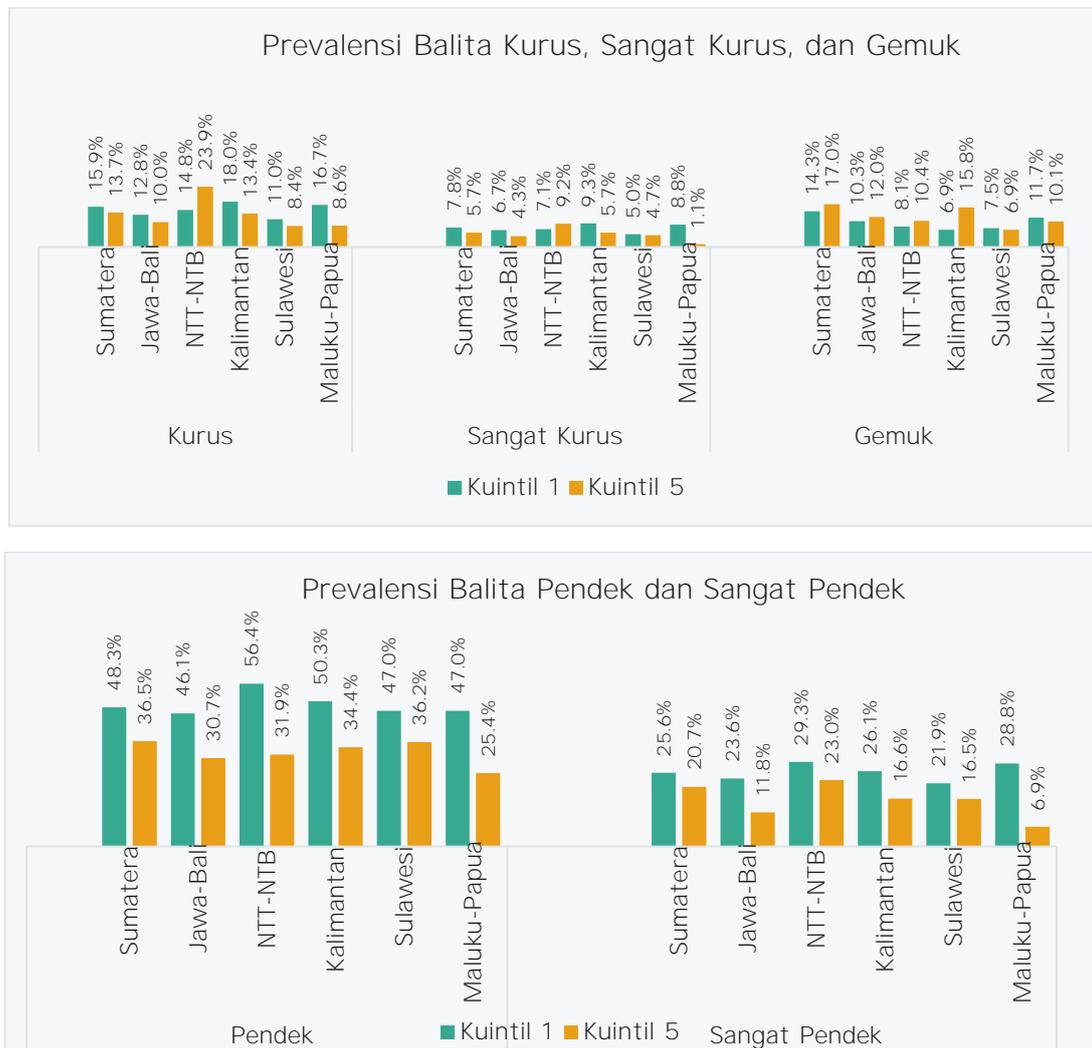
Tabel 4. Prevalensi Masalah Gizi antarkelompok Wilayah dan Masyarakat Indonesia, 2013

	Pendek (%)	Sangat Pendek (%)	Kurus (%)	Sangat Kurus (%)	Gemuk (%)
Kuintil 1	48.4	25.2	14.1	6.9	10.3
Kuintil 2	42.5	20.2	13.0	5.5	11.3
Kuintil 3	38.5	17.9	11.7	5.2	11.6
Kuintil 4	32.3	15.1	11.9	5.1	11.4
Kuintil 5	29.0	14.4	10.6	4.2	13.9
Perdesaan	42.1	20.9	12.8	6.0	11.7
Perkotaan	32.5	15.2	11.4	4.6	11.8
Indonesia	37.2	18.0	12.1	5.3	11.8
Sumatra	42.6	48.3	25.6	15.9	7.8
Jawa-Bali	39.9	44.2	24.5	14.4	7.0
NTT-NTB	50.3	41.9	22.5	12.6	5.7
Kalimantan	42.8	39.0	21.2	14.4	7.3
Sulawesi	43.6	36.5	20.7	13.7	5.7
Maluku-Papua	44.3	46.1	23.6	12.8	6.7
Laki-laki	38.1	18.8	12.8	5.7	12.1
Perempuan	36.3	17.1	11.4	4.9	11.5

Sumber: Diolah dari Riskesdas, 2013.

Melihat lebih dalam di wilayah perdesaan, pencapaian gizi kelompok kesejahteraan di dalam perdesaan terlihat mencolok di berbagai wilayah di Indonesia. Secara umum, untuk berbagai indikator kurang gizi, kelompok termiskin adalah yang terbesar dalam prevalensi anak pendek, sangat pendek, kurus, dan sangat kurus. Angka gizi kronis (anak pendek dan sangat pendek) sangat menjadi ukuran keparahan masalah gizi di antara berbagai kelompok di wilayah yang berbeda, anak-anak di bawah usia tahun (balita) dari kelompok termiskin di perdesaan adalah yang paling besar prevalensi anak pendek (54%). Sementara itu, untuk indikator kelebihan gizi (anak gemuk), anak balita dari kelompok terkaya di perdesaan di Sumatra dan Kalimantan

adalah yang paling banyak mengalami kegemukan dengan prevalensi masing-masing 7% dan 1% (Gambar 18)



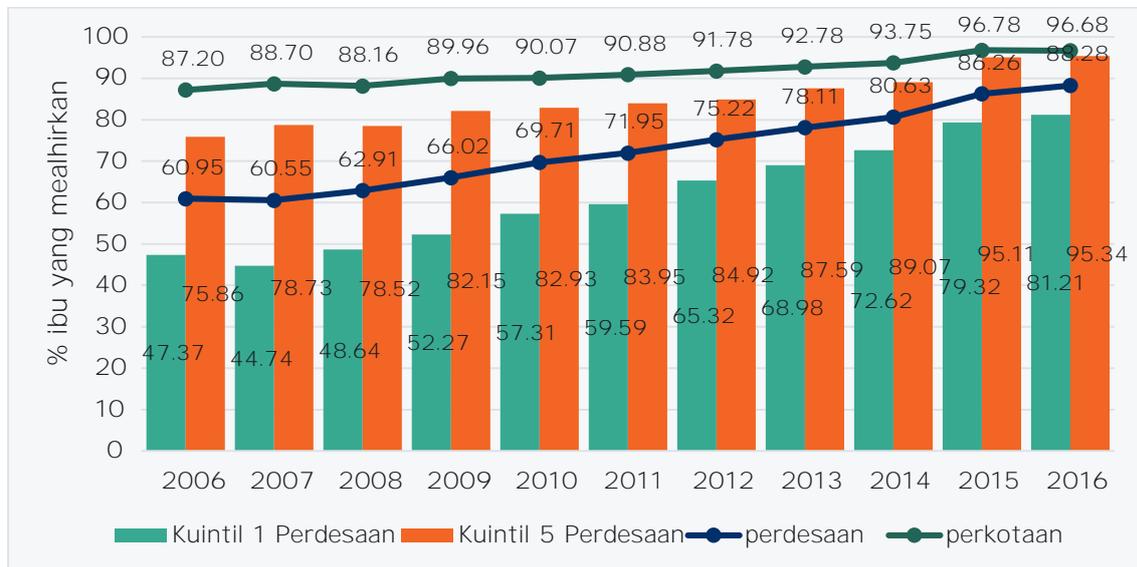
Gambar 18. Prevalensi Masalah Gizi antarkelompok Kesejahteraan di Perdesaan Indonesia, 2013

Sumber: Diolah dari Riskesdas, 2013.

Selain mengukur ketimpangan kesehatan masyarakat, observasi terhadap ketimpangan dalam akses masyarakat terhadap layanan kesehatan juga telah dilakukan. Akses kesehatan dasar yang seharusnya bersifat menyeluruh adalah pelayanan pemeriksaan kehamilan dan pemeriksaan faskes, akses perempuan terhadap KB dan cakupan imunisasi dasar. Pemeriksaan kehamilan seharusnya dilakukan di fasilitas kesehatan dengan nilai minimum empat kali selama kehamilan, sedangkan persalinannya ditolong oleh tenaga kesehatan dan dilakukan di fasilitas kesehatan. Imunisasi dasar yang lengkap seharusnya mencakup 1 kali imunisasi BCG (bacillus Calmette-Guérin), 3 kali imunisasi polio, 1 kali imunisasi hepatitis B, dan 1 kali imunisasi campak antara bulan 12

Secara umum terlihat perbaikan akses terhadap tenaga kesehatan yang nyata di daerah perdesaan. Perbedaan presentase akses di kuintil teratas dan terbawah semakin mengecil

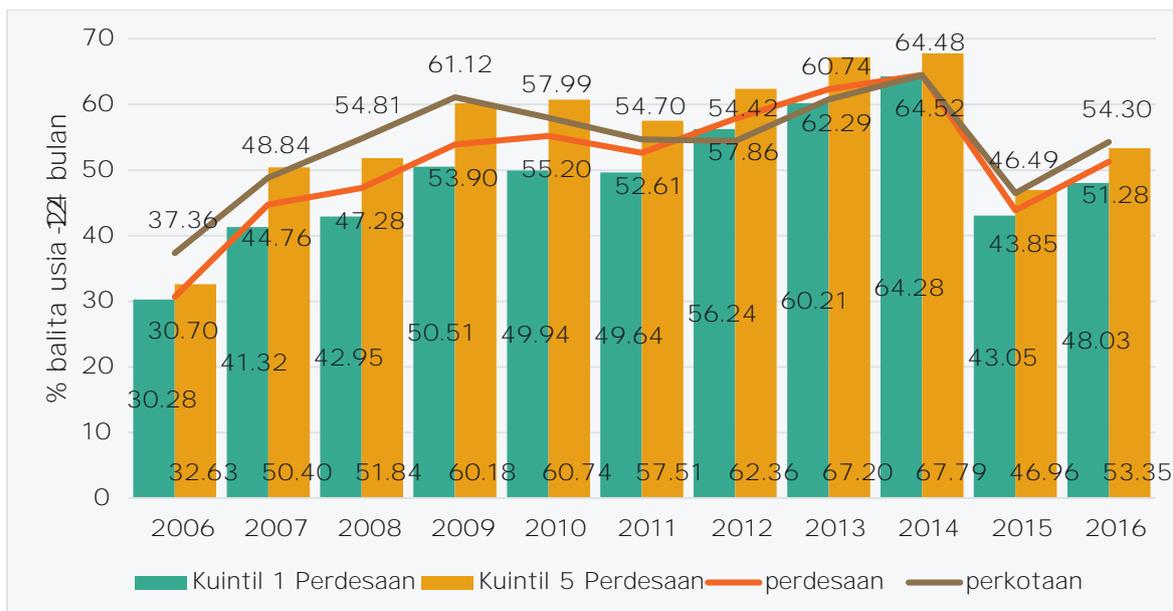
(Gambar19). Walaupun ibu di pedesaan pada kuintil terbawah masih sedikit tertinggal dari kuintil teratas dan target nasional 90 (Infodatin, 2014). Hal ini dapat didorong oleh banyaknya program yang bertujuan untuk menurunkan angka kemiskinan seperti peningkatan akses ibu untuk pemeriksaan, persalinan dan perawatan nifas di fasilitas kesehatan, dan akses perempuan terhadap program KB (Balitbangkes, 2013)



Gambar 19. Perbandingan Proporsi Kelahiran dibantu Tenaga Kesehatan di Perdesaan, 2006-2016

Sumber: Diolah dari Susenas, 2006-2016

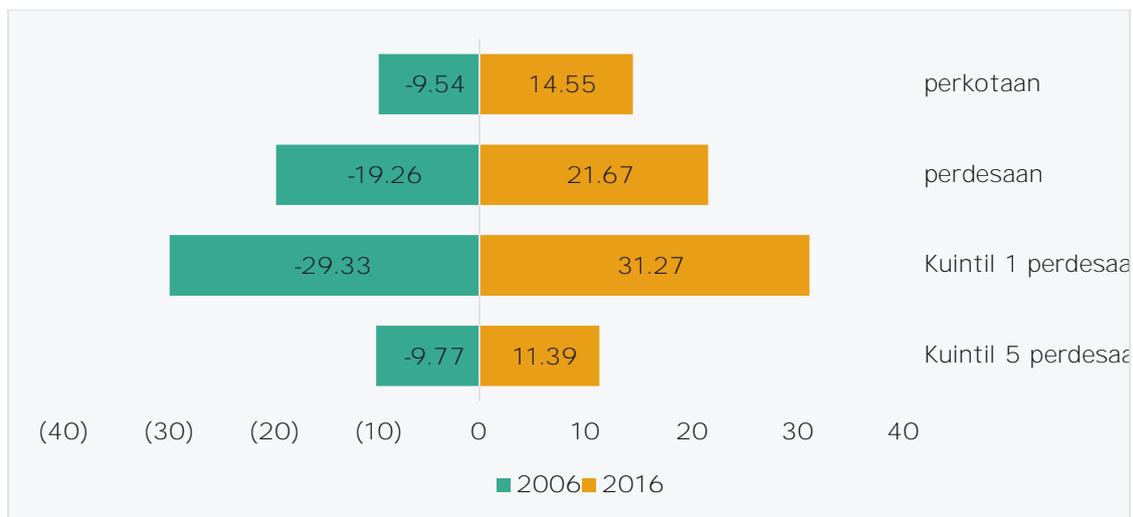
Dibandingkan dengan angka cakupan imunisasi lengkap nasional pada tahun 2013, daerah pedesaan dan perkotaan hingga tahun 2014 memiliki angka cakupan yang sama, yakni sekitar 60 (Balitbangkes, 2013). Akan tetapi semenjak tahun 2015 cakupan imunisasi secara keseluruhan menurun hingga lebih dari 20% prevalensi penduduk pedesaan kuintil teratas yang memiliki imunisasi lengkap lebih tinggi sekitar 15% dibandingkan penduduk pada kuintil terbawah pengeluaran (Gambar 20). Akses terhadap pelayanan imunisasi dasar lengkap lebih dipengaruhi oleh pengetahuan ibu dan dukungan keluarga maupun masyarakat di sekitarnya dibandingkan oleh status ekonomi (Hidayat, 2017).



Gambar 20. Perbandingan Proporsi Cakupan Imunisasi Lengkap Anak Usia 12-24 Bulan di Perdesaan, 2006-2016

Sumber: Diolah dari Susenas, 2006-2016.

Hingga tahun 2016, masyarakat termiskin di perdesaan mengalami peningkatan akses terhadap program bantuan kesehatan nasional. Terutama semenjak diberlakukannya BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) pada awal tahun 2014, perbedaan proporsi masyarakat di perdesaan dan perkotaan yang memiliki jaminan sosial semakin mengecil yang menunjukkan perbaikan akses terhadap program bantuan kesehatan nasional (Asuransi Kesehatan Keluarga Miskin) yang dibentuk pada tahun 2005 dan Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat) yang dibentuk pada tahun 2008 dianggap tidak mampu memberikan cakupan yang sesuai pada orang miskin sehingga dibentuk jaminan kesehatan yang sifatnya Jombanda (Jombangkata, 2012). Pada Gambar 2 terlihat adanya peningkatan akses penduduk perkotaan dan perdesaan terhadap jaminan kesehatan universal sebesar 2% dan 5% secara berturut-turut. Penduduk kuintil terbawah memiliki cakupan BPJS (Penerima Bantuan Iuran) terbesar dibandingkan dengan penduduk kuintil pengeluaran lainnya. Namun, jika melihat jumlah penduduk terkaya di perdesaan yang memiliki jaminan sosial juga meningkat dalam satu dekade terakhir, ketidaktepatan sasaran pemberian BPJS selain itu, jika dibandingkan dengan tahun 2006, peningkatan penerima BPJS PBI pada kuintil pertama tidak secepat yang terjadi pada kelompok pendapatan teratas. Hal ini menunjukkan masih kurang maksimalnya pencapaian target BPJS untuk masyarakat miskin di perdesaan.



Gambar 21. Perbandingan Proporsi Keluarga dengan Jaminan Kesehatan di Perdesaan, 2006-2016

Sumber: Diolah dari Susenas, 2006 dan 2016.

IV. SUMBER DAYA ALAM PERDESAAN

Sumber daya alam (SDA) merupakan modal penghidupan yang secara alami tersedia. SDA hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari sumber daya tak terlihat yang manfaatnya dirasakan oleh semua orang seperti udara, hingga sumber daya yang langsung dimanfaatkan untuk produksi seperti kayu dan tanah (DFPD, 2019). Di Indonesia, dengan komposisi tenaga kerja yang masih didominasi oleh sektor pertanian, sebagian besar lahan digunakan untuk kegiatan pertanian. Untuk itu akses terhadap lahan yang dapat dimanfaatkan menjadi sumber daya alam terpenting bagi masyarakat desa di sebagian besar wilayah Indonesia untuk mendukung penghidupannya (Baumann, 2002). Kerentanan bisa muncul ketika terjadi penguasaan sumber daya alam yang timpang. Hukum alam yang berlaku adalah dengan modal yang lebih kuat akan memiliki akses lebih besar terhadap penguasaan lahan, sebaliknya untuk orang dengan modal terbatas. Pada umumnya modal untuk usaha pertanian tidak terlalu banyak karena memerlukan penguasaan lahan dan ada faktor-faktor seperti faktor cuaca, gangguan hama, sehingga ketika orang miskin mendapat akses modal yang terbatas maka modal tersebut akan cenderung digunakan untuk mengembangkan mata pencaharian di luar pertanian (Magallon dan Vega, 2004).

Bagian ini akan membahas kondisi aset sumber daya alam desa dan membandingkannya dengan kondisi ketimpangan di perdesaan. Potensi dan pemanfaatan sumber daya alam menjadi fokus utama yang akan dibahas mengingat akses terhadap sumber daya alam yang akan mendukung penurunan ketimpangan pendapatan. Tampak jelas bahwa ada variasi tingkat kesejahteraan antara jenis topografi yang berbeda-beda desa dengan tingkat kesejahteraan relatif lebih baik umumnya berada di dataran rendah dan kawasan pesisir atau tidak berbatasan dengan hutan. Namun, pada wilayah ini ketimpangannya cukup tinggi di pedalaman, daerah yang berlokasi di sekitar kawasan hutan keatas ke kelompok kesejahteraan rendah sekaligus ke dalam kelompok ketimpangan rendah. Dalam hal pemanfaatan lahan, ketimpangan sangat nyata terjadi. Setengah dari keseluruhan lahan di Indonesia dikuasai oleh segelintir rumah tangga

pertanian menyisak sebagian besar rumah tangga pertanian lainnya yang rata-rata hanya mengelola kurang dari setengah hektar lahan pertanian.

4.1 Kesejahteraan dan Ketimpangan antardesa dengan Tipologi Wilayah yang Berbeda

Pengelompokan desa berdasarkan tipologi wilayahnya memperlihatkan kecenderungan kesejahteraan dan ketimpangan yang berbeda antardesa dengan kondisi kontur wilayah, lokasi relatif terhadap laut, dan lokasi relatif terhadap hutan yang berbeda-beda. Perbedaan antara tipologi wilayah dengan kondisi ekonomi masyarakat antara lain dijelaskan dari dimensi ekologi dan dimensi sosial. Hal ini termasuk potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan sebagai faktor produksi dan aspek budaya masyarakat yang tergambar dari pola migrasi, kebiasaan masyarakat masing-masing wilayah dalam mengelola sumber daya alamnya. Wilayah yang didukung infrastruktur yang memudahkan masyarakat untuk memanfaatkan berbagai pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan yang dapat meningkatkan kualitas sosial mereka. Selanjutnya, berbagai faktor lain memengaruhi interaksi ekonomi melalui ongkos produksi, pasar, dan pasar tenaga kerja yang menjelaskan struktur perekonomian suatu masyarakat di tiap lokasi yang berbeda (Ives, 2001; dan Hoover, 1948).

Dilihat dari topografi, lokasinya terhadap laut, dan lokasinya terhadap hutan, dari 60 ribu desa berstatus perdesaan di Indonesia, sebagian besarnya adalah desa di dataran rendah, bukan daerah pesisir, dan berlokasi di luar (Tabel 3). Keragaman kondisi geografis desa menunjukkan besarnya potensi sumber daya alam Indonesia yang ditopang oleh karakteristik masing-masing desa. Potensi sumber daya alam ini yang kemudian perlu dilihat apakah memiliki peranan terhadap ketimpangan yang terjadi di wilayah perdesaan. Desa ini kemudian akan diamati sebarannya berdasarkan kelompok tingkat kesejahteraan dan kelompok tingkat ketimpangannya.

Tabel 5. Tipologi Desa

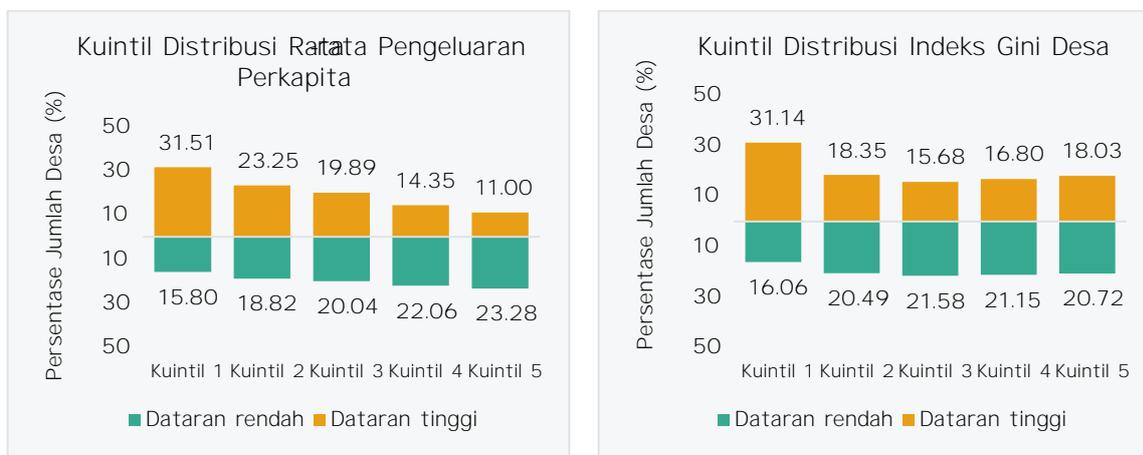
Tipologi	Keterangan	Perdesaan (%)	Perkotaan (%)
Topografi	Dataran rendah	73.29	92.95
	Dataran tinggi	26.71	7.05
Lokasi terhadap laut	Bukan pesisir	84.03	88.44
	Pesisir	15.97	11.56
Lokasi terhadap hutan	Di luar hutan	70.53	94.37
	Di dalam/sekitar hutan	29.47	5.63
Jumlah desa		59,575	15,692

Sumber: Diolah dari Podes 2014.

Desa di dataran rendah cenderung memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih baik namun kesenjangan ekonominya relatif lebih tinggi daripada desa di dataran tinggi. Gambar 22 menunjukkan berdasarkan rata-rata konsumsi per kapita masyarakat desanya, setengah dari desa di dataran rendah (45,34%) tergolong ke dalam kelompok desa kaya dan terkaya. Sebaliknya, lebih dari seperempat desa di dataran tinggi (31,51%) termasuk ke dalam kelompok desa termiskin dan hampir seperempat lainnya (23%) adalah desa miskin. Karakteristik dataran tinggi di Indonesia memberikan tantangan tersendiri bagi pembangunan

ekonomi. Wilayah dataran tinggi umumnya terpapar oleh hambatan pembangunan fisik jaraknya yang jauh dengan pusat perekonomian yang curam, kondisi tanah yang rapuh, dan curah hujan musiman yang tinggi. Hambatan lain terkait dengan kepadatan penduduk yang relatif rendah, isolasi, dan migrasi yang tinggi di wilayah tersebut (Hoover, 1948; FAO, 2002).

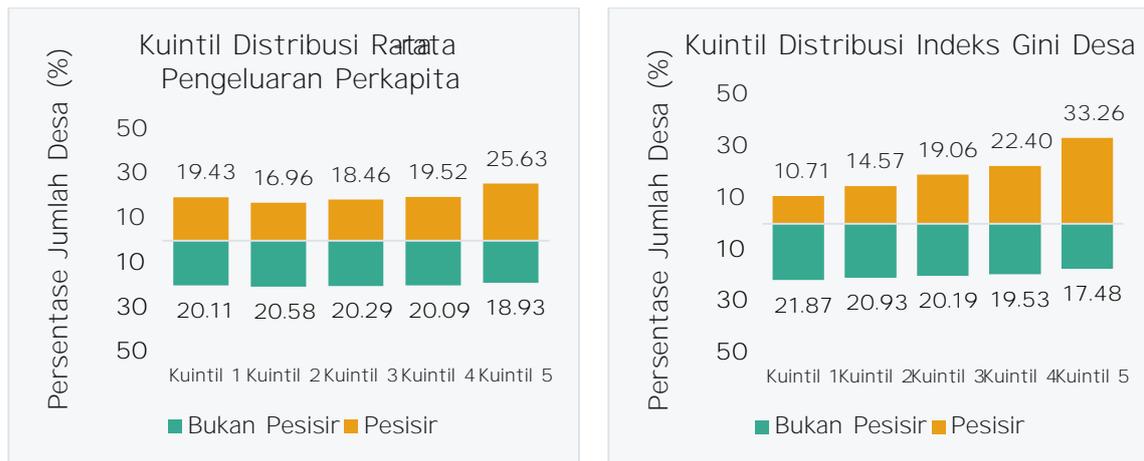
Seiring dengan tingkat kesejahteraan yang diraihinya, di lain pihak desa dataran rendah menghadapi ketimpangan ekonomi yang relatif lebih tinggi dengan desa dataran tinggi (Gambar 22). Jika desa-desa tersebut dibagi menjadi lima kelompok ketimpangan, desa-desa yang berlokasi di dataran rendah tersebar merata pada kelompok ketimpangan menengah-tinggi. Hanya sebagian kecil, yaitu 16,06% desa berdataran rendah yang berada di kelompok 20% tingkat ketimpangan terendah. Sementara itu, lebih 30% desa berdataran tinggi tergolong dalam kelompok desa dengan tingkat ketimpangan paling rendah.



Gambar 22. Kuintil Distribusi Rata-rata Pengeluaran Per kapita Penduduk Desa dan Kuintil Gini Desa, Menurut Topografi Wilayah 2014

Sumber: Diolah dari Podes 2014 dan Peta Kemiskinan 2015.

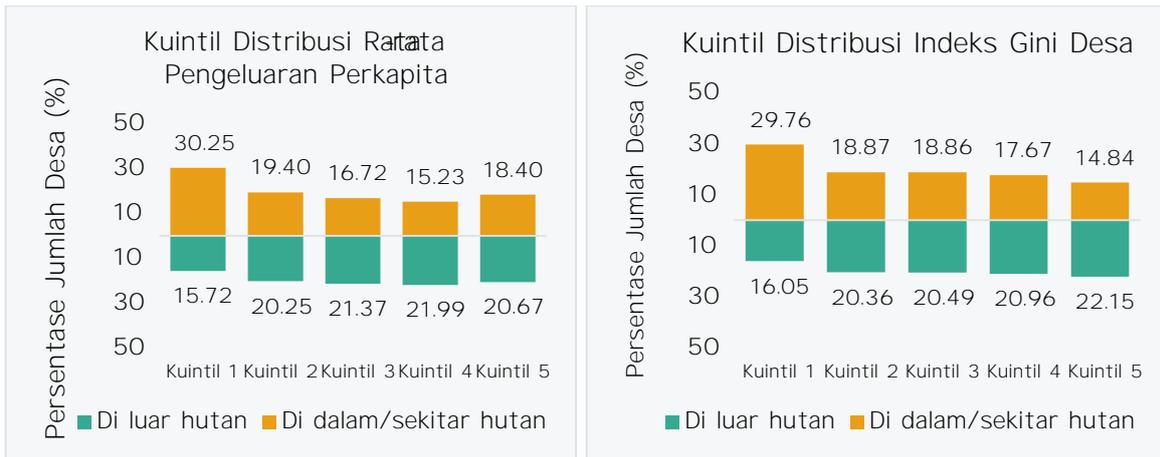
Jika dilihat berdasarkan lokasinya terhadap laut, terdapat banyak desa di kawasan pesisir yang masuk ke dalam kelompok desa terkaya sekaligus tertimpas. Sebagaimana digambarkan pada Gambar 22, desa-desa yang berlokasi di kawasan pesisir berada pada kelompok kesejahteraan tertinggi. Desa-desa pesisir lainnya tersebar dengan relatif merata ke dalam kelompok desa dengan tingkat kesejahteraan terendah, sedang tinggi, dengan persentase sebaran berkisar antara 17% hingga 1%. Salah satu hal yang dapat menjelaskan cukup tingginya jumlah desa pesisir yang masuk ke dalam kelompok kesejahteraan tertinggi adalah bahwa kemungkinan besar desa-desa tersebut masuk ke dalam bagian wilayah ibu kota atau pusat pertumbuhan yang umumnya berada di pesisir pantai dan cenderung mengalami percepatan pembangunan sosial-ekonomi dibandingkan dengan desa-desa yang berada di wilayah terpencil atau bukan pesisir (Chongvilaivan, 2016). Ki Sementar itu, dilihat dari ketimpangan ekonomi yang dihadapi desa-desa daerah pesisir lebih banyak yang masuk ke dalam kelompok desa dengan ketimpangan tinggi dibandingkan yang rendah.



Gambar 23. Kuintil Distribusi Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Penduduk Desa dan Kuintil Gini Desa, Menurut Lokasi Desa terhadap Laut 2014

Sumber: Diolah dari Podes 2014 dan Peta Kemiskinan 2015.

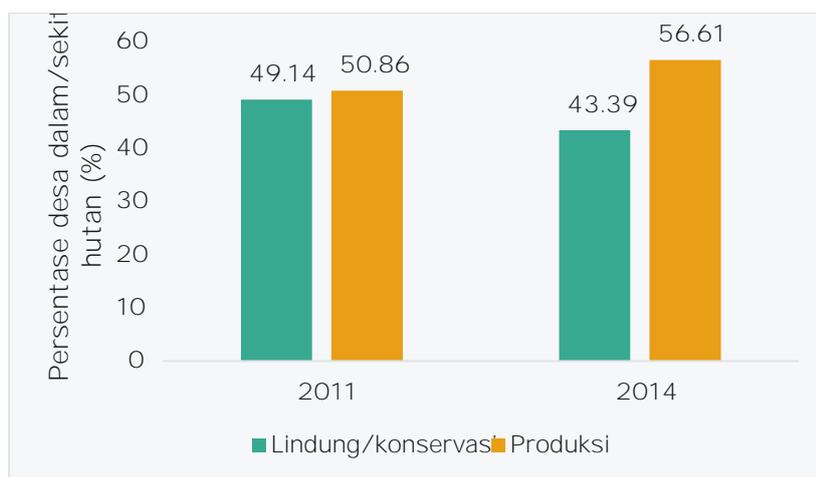
Dilihat dari lokasi desa relatif terhadap hutan, sekitar 30% desa yang berlokasi di dalam atau sekitar hutan masuk ke dalam kelompok desa dengan tingkat kesejahteraan terendah sekaligus tingkat ketimpangan terendah. Di luar kelompok dominan tersebut, desa yang berlokasi di dalam atau sekitar hutan tersebar secara relatif merata di antara kelompok desa dengan tingkat kesejahteraan dan ketimpangan rendah, sedang, tinggi, hingga tertinggi. Kondisi sebaliknya dihadapi oleh desa yang berlokasi jauh dari hutan; hanya sebagian kecil di antara desa-desa tersebut masuk ke dalam kelompok desa dengan tingkat kesejahteraan dan ketimpangan terendah. Di antara sebagian kecil desa tersebut, tingkat kesejahteraan dan ketimpangan yang terpaut jauh hanya terjadi pada kelompok desa dengan tingkat kesejahteraan terendah, yaitu masing-masing rata-ratanya hanya sebesar 16%. Hal ini mirip dengan kecenderungan yang dialami desa yang berlokasi di dalam atau sekitar hutan. Sementara itu, sebagian besar desa yang berlokasi jauh dari hutan tersebar antara kelompok desa dengan tingkat kesejahteraan rendah, sedang, tinggi, hingga tertinggi dengan rata-rata distribusi masing-masing kelompok mencapai sekitar 20% dan 22%. Gambar 24 Ketimpangan ekonomi yang rendah di antara desa-desa yang berlokasi di dalam/sekitar hutan salah satunya dijelaskan oleh akses rumah tangga miskin terhadap sumber daya hutan yang bisa diperoleh secara gratis. Perhitungan pendapatan yang memasukkan pendapatan yang bersumber dari pemanfaatan hutan akan menghasilkan ketimpangan yang lebih rendah dan sebaliknya jika pendapatan dari hutan tidak masuk dalam perhitungan (Gavendish, 1999; Fisher, 2004).



Gambar 24. Kuintil Distribusi Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Penduduk Desa dan Kuintil Gini Desa, Menurut Lokasi Desa terhadap Hutan 2014

Sumber: Diolah dari Podes 2014 dan Peta Kemiskinan 2015.

Menurut data Podes 2011, dari 75.267 desa yang diobservasi dalam studi ini, pada 2011 sebanyak 17.136 desa (22,8%) ada di dalam atau sekitar hutan. Sementara itu, menurut data Podes 2014, jumlahnya mengalami peningkatan pada 2014 menjadi 18.439 desa atau sekitar 24,5% dari total desa yang diobservasi. Gambar 25 menunjukkan terjadinya penambahan desa observasi yang berada di dalam/sekitar hutan. Deforestasi saat ini masih merupakan topik yang banyak diperdebatkan. Perdebatan umumnya terjadi akibat perbedaan definisi dan perhitungan dalam mengukur deforestasi. Namun, jika dilihat dengan lebih dalam, persentase desa yang berlokasi di dalam/sekitar hutan dan berfungsi sebagai hutan lindung mengalami penurunan dari 49,1% pada 2011 menjadi 43,4% pada 2014, sementara terjadi peningkatan persentase desa yang berada di dalam/sekitar hutan produksi, yaitu 50,8% pada 2011 menjadi 56,6% pada 2014. (Gambar 25)



Gambar 25. Desa yang Ada di dalam/sekitar Hutan menurut Fungsi, 2011-2014

Sumber: Diolah dari Podes 2011 dan 2014.

4.2 Pemanfaatan Sumber Daya Alam Desa: Ketimpangan Akses Lahan Pertanian dan Kebutuhan akan Pengelolaan Irigasi yang Baik

Sumber daya alam merupakan modal penghidupan yang penting bagi masyarakat desa. Akses terhadap sumber daya alam menentukan kemampuan masyarakat desa dalam memperoleh sumber makanan, bekerja dan mengakumulasi modal penghidupan lainnya, dan juga berfungsi sebagai pengaman terhadap guncangan baik yang berupa bencana alam maupun yang berasal dari ketidaksempurnaan pasar (Cotula, 2006). Di antara berbagai sumber daya alam, tanah menjadi perhatian utama karena lahan dan air adalah faktor produksi utama pertanian yang merupakan sektor dominan pedesaan. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dunia permintaan terhadap keduanya juga meningkat. Di banyak tempat di seluruh dunia lahan dan air kerap menjadi objek perebutan penguasaan. Tak berhenti disitu, persoalan menjadi semakin kompleks dengan kenyataan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat dan iklim membuat daya dukung lahan semakin berkurang dan sumber daya air semakin sempit. Terkait hal tersebut, perbaikan manajemen akses dan pemanfaatan lahan dan sumber air menjadi hal yang penting untuk segera dilakukan (FAO, 2011).

4.2.1 Akses Lahan yang Timpang

Akses terhadap penguasaan lahan menjadi faktor yang menentukan kemampuan rumah tangga pertanian dalam menjalankan penghidupannya dan meningkatnya kesejahteraannya (Doro *et al.* and Razafindravonona *et al.*, 2000; dalam Randrianarisoa dan Minten, 2001). Tabel 6 menunjukkan ketimpangan penguasaan lahan pertanian di Indonesia. Ketimpangan akses terhadap lahan di Indonesia terlihat dari penguasaan sebagian besar lahan luas yang besar (di atas dua hektare) oleh sekelompok kecil rumah tangga pertanian. Tabel tersebut juga memperlihatkan bahwa secara nasional, 52% lahan dikuasai hanya oleh 4% rumah tangga pertanian. Sedangkan di pedesaan, 5% lahan dikuasai oleh 13% rumah tangga pertanian.

Tabel 6. Penguasaan Lahan Nasional, 2013

	Kategori lahan				Total
	<0.5 ha	0.5 - 1 ha	1 - 2 ha	>2 ha	
Nasional					
Rumah tangga pertanian	56.24	17.39	14.17	12.2	100
Penguasaan lahan	12.42	13.27	20.72	53.59	100
Perkotaan					
Rumah tangga pertanian	74.27	12.81	7.44	5.48	100
Penguasaan lahan	22.03	15.47	16.91	45.59	100
Perdesaan					
Rumah tangga pertanian	52.6	18.32	15.53	13.55	100
Penguasaan lahan	11.31	13.01	21.16	54.52	100

Sumber: Diolah dari Sensus Pertanian 2013.

Dilihat dari sebarannya berdasarkan pulau besar di Indonesia, ketimpangan penguasaan lahan paling tinggi terjadi di Sulawesi, Sumatera, NTB dan NTT, serta Papua. Sementara itu di Kalimantan, penguasaan lahan rumah tangga pertanian terlihat lebih merata, baik di wilayah

perdesaan maupun perkotaan (Tabel 7) merupakan kasus khusus penguasaan lahan di wilayah ini justru didominasi oleh lahan dengan luas sebesar 75 rumah tangga pertanian di Jawa menguasai lahan pertanian sempit. Hal ini wajar karena wilayah ini terbatas sementara penduduknya cukup padat.

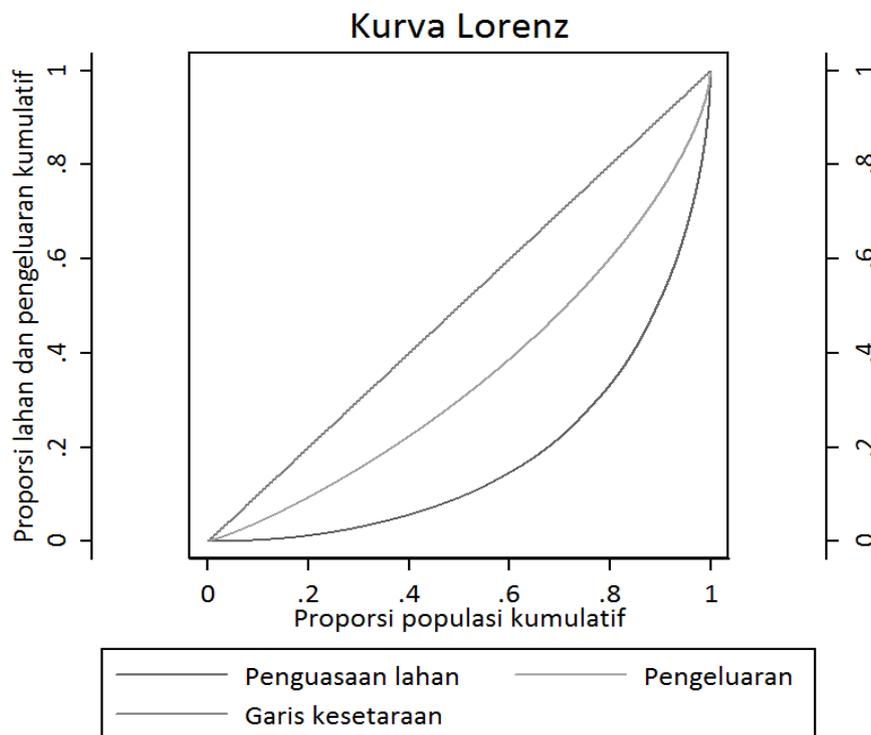
Tabel 7. Penguasaan Lahan Pertanian di Setiap Wilayah, 2013

		<0.5 ha	0.5 - 1 ha	1 - 2 ha	>2 ha	<0.5 ha	0.5 - 1 ha	1 - 2 ha	>2 ha
		Sumatra				Jawa			
TOTAL	Rumah tangga pertanian	30.27	18.92	25.26	25.53	76.21	15.94	5.90	1.94
	Penguasaan lahan	4.33	8.55	21.60	65.50	36.83	26.64	18.88	17.63
PERKOTAAN	Rumah tangga pertanian	51.19	15.51	16.41	16.88	81.53	12.07	4.52	1.87
	Penguasaan lahan	7.21	8.74	17.28	66.77	38.68	23.02	16.44	21.85
PERDESAAN	Rumah tangga pertanian	27.72	19.34	26.34	26.59	74.63	17.09	6.31	1.96
	Penguasaan lahan	4.07	8.53	22.01	65.39	36.38	27.55	19.49	16.58
		Kalimantan				Sulawesi			
TOTAL	Rumah tangga pertanian	47.88	23.83	19.06	9.21	25.32	16.13	23.58	34.95
	Penguasaan lahan	12.18	20.15	31.26	36.39	2.42	5.22	14.39	77.94
PERKOTAAN	Rumah tangga pertanian	79.00	12.17	6.07	2.74	43.71	13.42	17.54	25.31
	Penguasaan lahan	32.13	21.29	20.38	26.20	3.03	4.50	10.98	81.49
PERDESAAN	Rumah tangga pertanian	44.25	25.18	20.58	9.97	22.83	16.51	24.40	36.26
	Penguasaan lahan	11.17	20.10	31.81	36.91	2.35	5.32	14.83	77.50
		NTB & NTT				Papua and Maluku			
TOTAL	Rumah tangga pertanian	31.73	20.54	25.41	22.30	57.60	16.31	14.30	11.78
	Penguasaan lahan	4.52	10.27	24.88	60.32	10.25	13.89	23.67	52.17
PERKOTAAN	Rumah tangga pertanian	51.95	17.53	17.44	13.05	74.44	10.70	9.21	5.63
	Penguasaan lahan	7.52	12.10	23.16	57.22	17.48	15.30	24.85	42.35
PERDESAAN	Rumah tangga pertanian	29.89	20.82	26.13	23.14	56.39	16.71	14.67	12.22
	Penguasaan lahan	4.34	10.16	24.99	60.51	9.97	13.84	23.63	52.57

Sumber: Diolah dari Sensus Pertanian 2013.

Ketersediaan lahan yang semakin sempit mendorong kenaikan harga lahan di pasaran. akhirnya, hanya orang-orang yang lebih mampu secara ekonomi yang bisa mempekerjakan, orang-orang miskin hanya bisa menguasai lahan yang lebih sempit atau tidak memiliki lahan (Randrianarisoa and Minten, 2001). Penguasaan lahan di Indonesia jauh lebih timpang

dibandingkan tingkat konsumsi. Indeks Gini untuk konsumsi pada tahun 2013 adalah sebesar 0,3 yang jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan indeks penguasaan lahan yang sebesar 0,63 (Gambar 26 Janvry dan Sadoulet 1993) berpendapat bahwa dalam kasus berkembang ketimpangan dalam penguasaan lahan akan menguntungkan pemilik lahan dari dampak peningkatan pertumbuhan sektor pertanian. Argumen tersebut diperkuat dengan temuan Adam Jr. (2002) dengan kasus ketimpangan lahan di wilayah perdesaan Mesir.



Gambar 26. Distribusi Penguasaan Lahan di antara Rumah Tangga Sektor Pertanian

Sumber: Diolah dari Sensus Pertanian 2013 dan Susenas 2013.

4.2.2 Kebutuhan akan Manajemen Air yang Lebih Baik

Dalam hal sumber daya air, manajemen penggunaan sumber daya air untuk aktivitas produksi perlu untuk segera diperbaiki karena tingginya kerusakan jaringan irigasi. Kerusakan jaringan irigasi meningkat cukup drastis hanya dalam waktu singkat yang awalnya hanya ada di 250 desa pada 2011, menjadi 1.378 desa pada 2014. Dari desa-desa yang mengalami kerusakan jaringan irigasi, 80% di antaranya terjadi di desa-desa berkontur dataran rendah. Kerusakan jaringan irigasi menjadi indikasi manajemen penggunaan air untuk pertanian (Anggrudinia, 2015). Namun hal lain yang perlu diketahui adalah bahwa di banyak tempat di Indonesia kerusakan irigasi juga terkait dengan kegiatan alih fungsi lahan. Tingginya kerusakan jaringan irigasi di dataran rendah sejalan dengan perkembangan pembangunan dan kecenderungan alih fungsi lahan pertanian yang memang lebih banyak terjadi di wilayah dataran rendah. Hal ini menjadi fenomena yang sulit dihindarkan seiring dengan perubahan struktur ekonomi dan kependudukan, terutama di daerah-daerah di Pulau Jawa dan daerah di sekitar kota-kota besar yang memiliki tuntutan untuk memenuhi kebutuhan lahan permukiman dan kawasan industri (LANDAC, 2015). Sementara itu, berbagai peraturan perundangan yang berlaku, yaitu UU No. 11/1974 tentang pengairan, PP No. 121/2015, dan UU No. 16/2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, secara tegas mengharuskan semua komponen masyarakat untuk menjaga dan mengatur sumber daya air dan penggunaan lahan untuk menjaga kelestarian fungsinya.

Tabel 8. Persentase dan Jumlah Desa dengan Jaringan Irigasi yang Mengalami Kerusakan berdasarkan Kondisi Topografi, 2011 dan 2014

Topografi	Sungai	Saluran Irigasi	Danau/Waduk/sSitu/ Bendungan
2011:			
Dataran rendah	74.07%	81.20%	71.08%
Dataran tinggi	25.93%	18.80%	28.92%
Jumlah desa yang sungai, irigasi, dan waduknya tidak/belum dimanfaatkan untuk pengairan lahan pertanian	27,123	250	2,068
2014:			
Dataran rendah	78.36%	84.23%	76.56%
Dataran tinggi	21.64%	15.77%	23.44%
Jumlah desa yang sungai, irigasi, dan waduknya tidak/belum dimanfaatkan untuk pengairan lahan pertanian	30,082	1,756	2,717

Sumber: Diolah dari Podes 2011 dan 2014.

V. INFRASTRUKTUR FISIK DAN PENDUKUNG PEREKONOMIAN PERDESAAN

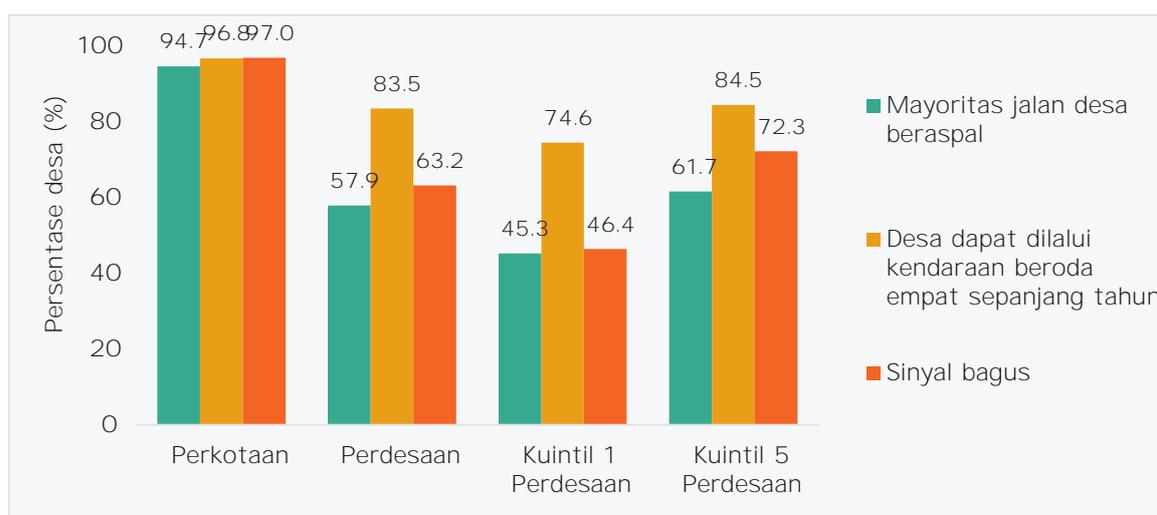
Infrastruktur memiliki peran sangat krusial dalam pembangunan perdesaan. Ia bisa mendukung aktivitas perekonomian desa, baik di sektor pertanian maupun nonpertanian. Selain itu, infrastruktur menjamin akses terhadap layanan dasar sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan infrastruktur perdesaan selalu menjadi hal yang menantang untuk dilakukan, mengingat Indonesia memiliki cakupan wilayah yang luas dan berbentuk kepulauan. Di samping itu, setiap wilayah memiliki kondisi dan potensi alam yang beragam dan unik. Kondisi wilayah seperti itu menuntut pembangunan infrastruktur yang bisa meningkatkan konektivitas antarwilayah di Indonesia. Teorinya adalah bahwa pembangunan infrastruktur akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada saat yang sama, pembangunan infrastruktur diharapkan mampu mengurangi kemiskinan. Namun, hal tersebut tidak berarti bahwa ketimpangan, baik ketimpangan antarwilayah maupun ketimpangan di dalam wilayah, dengan sendirinya berkurang. Dalam beberapa kasus pembangunan infrastruktur malah berdampak pada peningkatan ketimpangan pendapatan (Bajar dan Rajeev, 2015). Dampak pembangunan infrastruktur terhadap pengurangan ketimpangan tergantung pada jenis infrastruktur dan tingkat perkembangan ekonomi (Bajar dan Rajeev, 2015; United Nations, 2016). Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur yang inklusif mutlak diperlukan.

Dalam hal pembangunan infrastruktur ketimpangan antara perdesaan-perkotaan atau di antara wilayah perdesaan itu sendiri sangat nyata terdapat. Pada saat hampir seluruh wilayah perkotaan memiliki jalan terluas berupa aspal, juga memiliki jaringan telekomunikasi yang baik, sampai pada tahun 2015 masih ada setengah wilayah perdesaan yang permukaan jalan

tidak berhasil dan tidak memiliki sinyal telepon yang memadai. Desa dengan kualitas sinyal baik umumnya berada di kelompok perdesaan dengan rata-rata pengeluaran 20% tertinggi secara nasional. Oleh karena itu, wilayah perdesaan dengan jaringan telekomunikasi, cenderung memiliki jumlah orang miskin lebih sedikit. Selain itu, akses listrik masyarakat perdesaan sudah hampir menyamai perkotaan, setidaknya dalam aspek disparitas antar wilayah dan antar kelompok kesejahteraan belum tampak ada perbaikan berarti. Hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan infrastruktur fisik membuka peluang ekonomi lebih banyak dinikmati oleh masyarakat di dalam kelompok kesejahteraan atas. Keberadaan infrastruktur pendukung perekonomian seperti pasar dan kompleks pertokoan masih bias pada wilayah kelompok desa terkaya. Keberadaan lembaga keuangan perbankan (bank komersial dan bank perkreditan rakyat/BPR) masih terbatas, namun keberadaan koperasi di wilayah perdesaan lebih baik walaupun pun juga masih bias wilayah urban.

5.1 Jalan, Komunikasi, dan Listrik yang Membuka Kesempatan sekaligus Membawa Risiko Ketimpangan

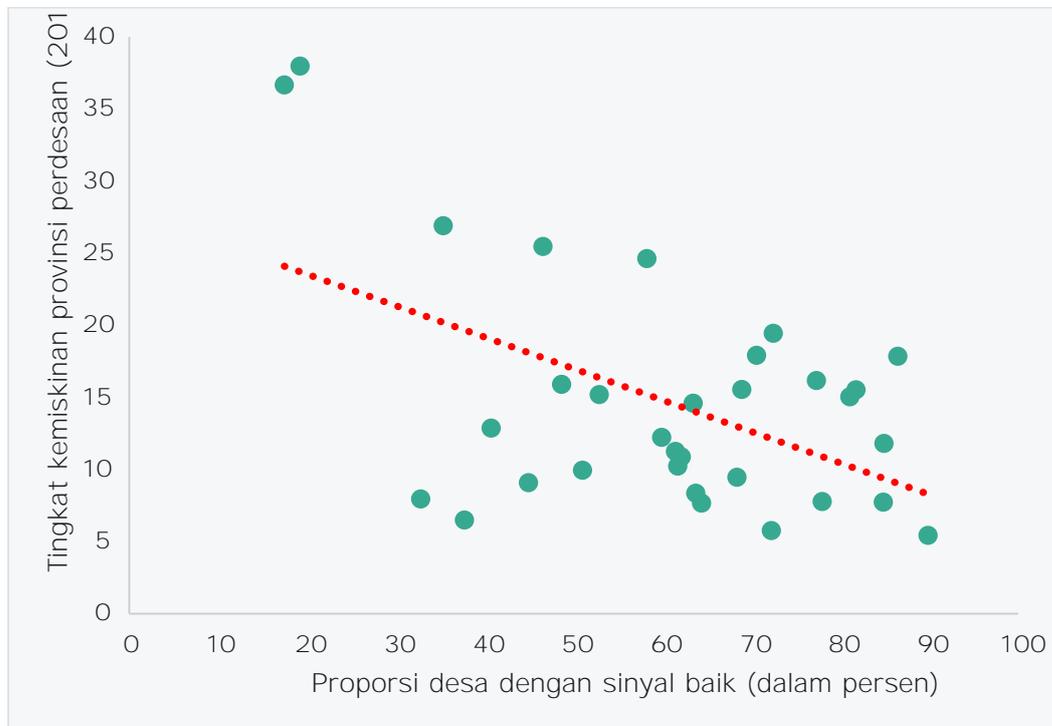
Arti penting kehadiran infrastruktur jalan dan komunikasi adalah untuk membuka akses terhadap kesempatan perekonomian yang lebih luas. Data yang dihasilkan Podes dan Peta Kemiskinan berikut menunjukkan bahwa desa dengan kondisi jalan yang lebih baik pada tahun 2011 memiliki tingkat kesejahteraan yang relatif lebih baik pada tahun 2015 (Gambar 27). Sejalan dengan studi sebelumnya, keberadaan infrastruktur jalan yang baik berdampak positif terhadap pendapatan masyarakat di Nepal (Chalmer dan Smith, 2016). Proyek pembangunan jalan desa juga berdampak penurunan tingkat kemiskinan di Bangladesh (Khandker, Bakht, dan Koolwal, 2006) dan Kamboja (Rungsi, 2008). Dampak dari adanya jalan desa terhadap pengurangan kemiskinan terjadi melalui kenaikan tingkat produksi dan upah, terjadinya penurunan biaya input dan transportasi, serta adanya persaingan. Selanjutnya pada Gambar 27 juga jelas terlihat bahwa desa di wilayah perkotaan memiliki infrastruktur yang lebih baik dengan rata-rata 94% memiliki jalan beraspal dan sinyal yang baik. Pada saat yang sama secara rata-rata sekitar 60% desa di wilayah perdesaan yang memiliki aspal dan sinyal yang bagus.



Gambar 27. Persentase Desa yang Memiliki Infrastruktur Jalan dengan Kondisi Baik pada 2011 dan Kelompok Kesejahteraannya pada 2015

Sumber: Diolah dari Podes 2011 dan Peta Kemiskinan 2015.

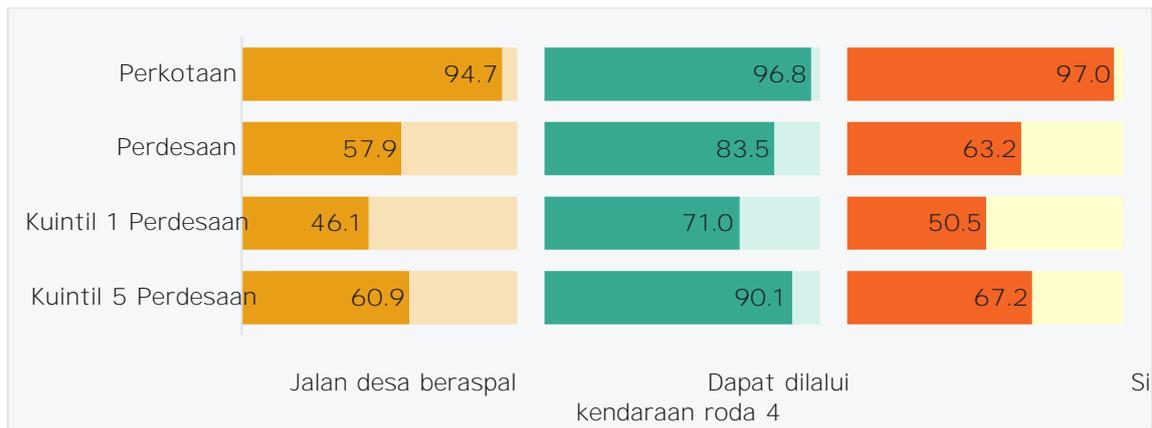
Pola yang sama ditunjukkan oleh korelasi antara kualitas sinyal komunikasi pada tahun 2011 dengan kondisi kesejahteraan desa pada tahun 2015 pada grafik berikut. Desa dengan kualitas sinyal yang baik umumnya berada di kelompok kesejahteraan menengah. Gambar 28 juga menunjukkan korelasi negatif antara keberadaan sinyal yang baik dengan tingkat kemiskinan di suatu desa. Artinya, desa dengan sinyal yang lebih baik memiliki kemungkinan tingkat kemiskinan yang lebih rendah.



Gambar 28. Hubungan antara Proporsi Desa dengan Kualitas Sinyal Komunikasi yang Baik pada 2011 dengan Tingkat Kesejahteraannya pada 2015

Sumber: Diolah dari Podes 2011 dan Susenas 2015.

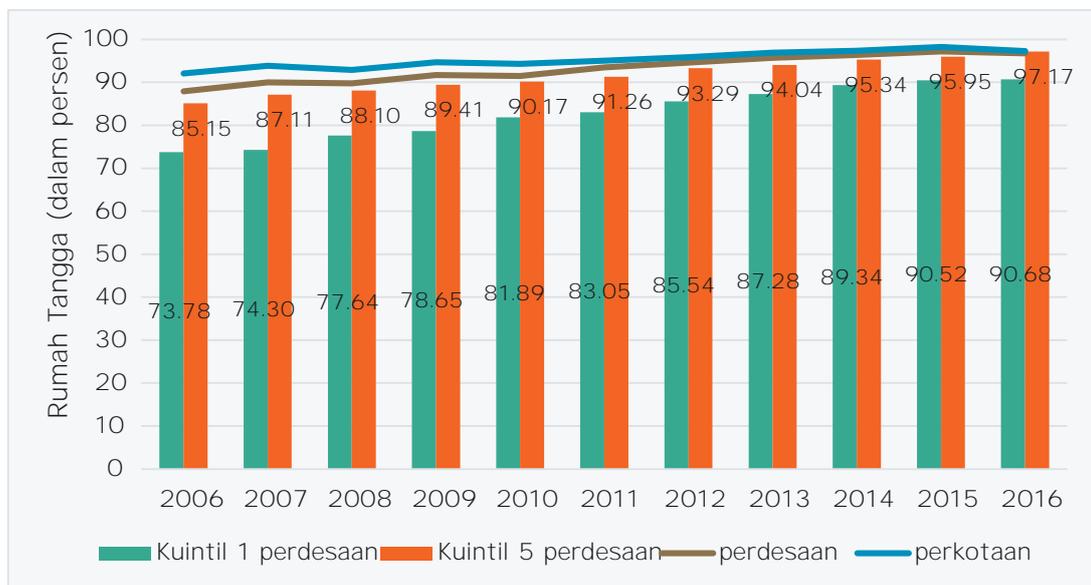
Ketika melihat kondisi ketimpangan pada tahun 2014, desa dengan jalan beraspal berkualitas baik justru memiliki ketimpangan pendapatan yang relatif lebih tinggi. Hal yang sama juga terjadi untuk kualitas sinyal yang merupakan indikator akses terhadap komunikasi. Desa dengan kualitas sinyal yang lebih baik pada 2011 memiliki tingkat ketimpangan yang juga relatif lebih tinggi pada tahun 2015. Salah satu permasalahan infrastruktur di Indonesia adalah adanya alokasi sumber daya yang tidak merefleksikan kebutuhan (ADB, 2014). Hal ini memiliki konsekuensi pada kecenderungan peningkatan ketimpangan dalam hal akses terhadap infrastruktur.



Gambar 29. Proporsi Desa yang Memiliki Infrastruktur Jalan dan Komunikasi yang Kondisinya Baik (dalam persen) Berdasarkan Kuintil Indeks Gini, 2014

Sumber: Diolah dari Podes 2011 dan Peta Kemiskinan 2015.

Data yang lebih baik diperoleh untuk akses terhadap infrastruktur listrik yang bisa dilihat hingga tingkat rumah tangga. Secara umum, akses rumah tangga di perdesaan terhadap listrik mengalami peningkatan dan semakin mendekati kondisi yang dimiliki oleh rumah tangga perkotaan, namun demikian capaiannya masih berada di bawah rumah tangga perkotaan. Di dalam perdesaan sendiri akses listrik yang lebih baik dirasakan oleh rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik, dan sebagai Gambar 30

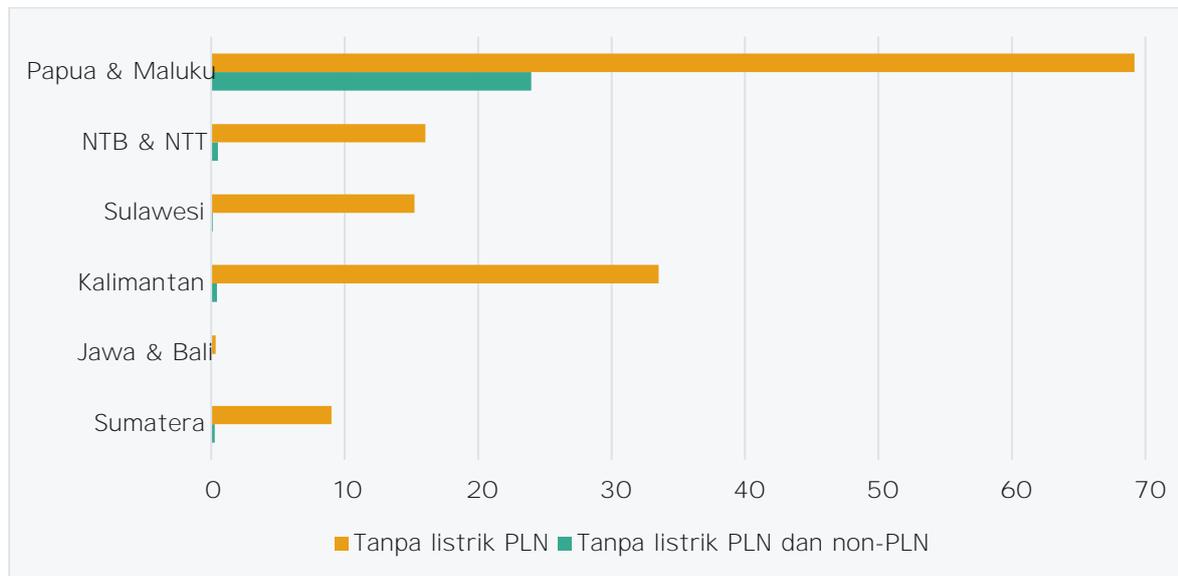


Gambar 30. Akses Listrik Berdasarkan Kelompok Kesejahteraan di Desa, 2006-2016

Sumber: Diolah dari Susenas 2006-2016.

Selain itu, sebaran desa tanpa aliran listrik antar wilayah di Indonesia juga memperlihatkan akses listrik yang timpang antara desa di daerah Pulau Jawa dan desa di luar Pulau Jawa. Desa di Pulau Jawa relatif tidak memiliki masalah dalam akses aliran listrik dari perusahaan listrik negara, lain halnya dengan desa di luar Pulau Jawa. Di antara semua wilayah, Papua dan Papua Barat adalah yang terburuk dengan sekitar 70 desa di wilayahnya yang tidak terjangkau a

listrik dari perusahaan listrik negara dan desa yang sama sekali tidak terjangkau aliran listrik (Gambar 31)



Gambar 31. Persentase Desa Tanpa Aliran Listrik, 2014

Sumber: Diolah dari Podes 2014.

Hasil perhitungan yang disampaikan di atas sekali lagi memberi gambaran bahwa infrastruktur memang membawa kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat pedesaan namun keberadaan infrastruktur belum tentu berdampak pada pengurangan ketimpangan. Banyak panel membuktikan dampak positif infrastruktur terhadap pertumbuhan. Bahkan sebagian ahli juga percaya bahwa pembangunan infrastruktur akan membawa pengaruh signifikan terhadap negara atau daerah berpendapatan rendah sehingga memungkinkan untuk menyusul daerah yang lebih maju (Raychaudhuri & De, 2010). Studi yang dilakukan oleh Calderon dan Sosa (2004) memperlihatkan kontribusi signifikan dari infrastruktur telekomunikasi, transportasi, dan listrik terhadap pertumbuhan ekonomi negara Amerika Latin (Calderon dan Sosa, 2004). Namun, terdapat beberapa prasyarat agar pembangunan infrastruktur bisa dilaksanakan secara merata oleh semua orang, sehingga fungsinya tidak hanya sebatas mendorong pertumbuhan juga bisa berkontribusi dalam pengurangan ketimpangan. Manfaat infrastruktur untuk mendukung upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi hal yang penting untuk dilakukan agar akses yang lebih terbuka terhadap pasar dan daerah lain bisa dirasakan manfaatnya secara merata. Kualitas sumber daya manusia yang rendah di kalangan kelompok miskin antara lain, oleh capaian pendidikan dan keterampilan mereka mengurangi kesempatan mereka untuk turut menikmati pertumbuhan (Datt dan Raychaudhuri, 2010). Hal lainnya adalah biaya yang dikeluarkan untuk dapat mengakses infrastruktur. Misalnya ditemukan bahwa akses terhadap listrik lebih banyak dinikmati oleh kelompok terkaya di desa (Cook, 2011).

5.2 Diskrepansi Infrastruktur Pendukung Perekonomian Pedesaan

Terkait infrastruktur yang dapat mendukung perekonomian pedesaan, beberapa aspek menjadi perhatian utama, yakni ketersediaan lembaga keuangan di desa serta keberadaan pertokoan dan pasar. Meskipun keberadaan lembaga keuangan belum tentu menjamin akses layanan keuangan

untuk semua masyarakat tersedia lembaga keuangan menjadi dasar untuk masyarakat memiliki pilihan dalam pembiayaan modal usahanya misalnya kredit keuangan mikro.

Akses terhadap layanan keuangan yang lebih baik akan mendukung pertumbuhan sehingga akan berdampak pada pengurangan kemiskinan dan ketimpangan. Salah satu cara untuk memperbaiki akses tersebut adalah dengan menyediakan lembaga keuangan di perdesaan. Dampak akses terhadap layanan keuangan pada pengurangan kemiskinan dan ketimpangan lebih terlihat pada intervensi layanan kredit. Sikko, dari Heriyaldi dan Yusuf (2013) yang menggunakan data longitudinal membuktikan bahwa kehadiran lembaga keuangan mikro di wilayah perdesaan berdampak positif terhadap peningkatan konsumsi masyarakat desa. Hal ini menguatkan argumen bahwa kehadiran lembaga keuangan di wilayah perdesaan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, keberadaan lembaga keuangan di perdesaan saat ini masih belum diikuti oleh pemahaman mengenai layanan keuangan (*literacy*) yang baik, terutama di masyarakat miskin (Djankovet *al.* 2008). Hilangnya titik temu antara keberadaan dan pengetahuan mengenai cara mengakses lembaga keuangan adalah kesenjangan yang dapat menjadi sumber permasalahan pemerataan pertumbuhan ekonomi.

Akses terhadap lembaga keuangan yang tidak merata ditunjukkan oleh sebaran keberadaan lembaga keuangan yang bervariasi di antara desa dengan tingkat kesejahteraan berbeda. Perbedaan antara bank komersial, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan koperasi, penetrasi bank komersial baik di desa dan kota dalam wilayah perdesaan ataupun perkotaan adalah yang paling rendah, sementara koperasi adalah yang paling tinggi; begitupun prevalensi koperasi untuk berada di desa dan desa termiskin merupakan yang tertinggi di antara dua jenis lembaga keuangan. Proporsi desa termiskin yang memiliki koperasi adalah 21.3%, sedangkan yang memiliki bank komersial dan BPR samasama sebesar 0.8% (Gambar 32). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat yang hidup di desa dan desa termiskin memiliki keterbatasan dalam pelayanan keuangan. Demikian, di antara berbagai jenis lembaga keuangan yang tersedia di desa, koperasi memiliki jangkauan yang lebih baik walaupun masih bias desa maju.



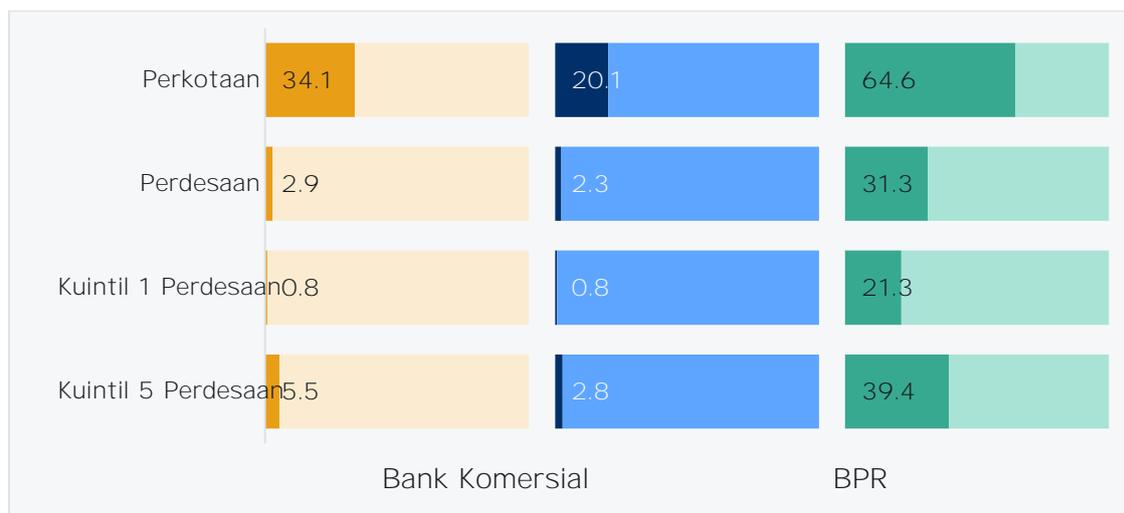
Gambar 32. Proporsi Desa yang Memiliki Infrastruktur Finansial 2011 Berdasarkan Kelompok Pendapatan Desa 2014 (dalam Persen)

Sumber: Diolah dari Podes 2011 dan Peta Kemiskinan 2015.

Diskrepansi yang besar juga ditemui dalam hal akses terhadap pasar dan pertokoan. Gambar 33 menunjukkan bahwa hampir setengah dari seluruh desa di daerah perkotaan Indonesia memiliki kompleks pertokoan dan sepertiganya memiliki pasar dengan bangunan permanen. Sementara itu, di perdesaan kompleks pertokoan dan pasar masing-masing hanya tersedia di kurang dari 7% dan sekitar 15% wilayah perdesaan. Jika dibandingkan antarkelompok kesejahteraan, tidak lebih dari 3% desa di wilayah perdesaan termiskin memiliki akses terhadap kompleks pertokoan, dibandingkan dengan desa di wilayah perdesaan terkaya yang hanya memiliki kompleks pertokoan. Sebaran pasar di wilayah perdesaan masih lebih merata dibandingkan sebaran pertokoan. Sebesar 13% desa di kelompok 20% desa termiskin memiliki akses terhadap pasar dengan bangunan permanen. Sementara itu, di antara kelompok terkaya, lebih dari 20% nya sudah memiliki pasar dengan bangunan permanen.

Dalam kajian ekonomi geografi, terutama yang berkaitan dengan penghidupan di perkotaan maupun perdesaan, pasar (ataupun pertokoan) merupakan salah satu komponen penting mengingat keberadaannya dapat menjadi kekuatan di balik penciptaan ekonomi dan menyediakan barang dan jasa bagi populasi di sekitarnya (FAO, 1995). Secara umum di wilayah perdesaan, pasar dapat pula berperan sebagai mekanisme utama untuk perakitan produk lokal yang hasilnya didistribusikan kembali sebagai sumber produksi di perkotaan.

Diskrepansi dalam hal akses terhadap pasar yang terjadi antara wilayah perkotaan dan perdesaan maupun antarperdesaan terkaya dan termiskin erat kaitannya dengan diskrepansi yang terjadi pada aspek infrastruktur fisik secara umum. Miyazaki dan Shonuma mengidentifikasi bagaimana pasar, dalam hal ini pasar pangan, berperan sebagai penghubung dalam proses pembangunan ekonomi di wilayah perdesaan di tujuh provinsi Indonesia pada tahun 2007 dan 2010. Perdesaan miskin cenderung rendah perkembangan pasar lain, perdesaan miskin juga terbebani oleh buruknya kondisi infrastruktur seperti jalan yang dapat mencegah integrasi pasar di sekitarnya. Dengan kondisi integrasi pasar yang relatif rendah, pilihan infrastruktur seperti irigasi berperan lebih penting dibandingkan jalan beraspal dalam menjaga pasokan pangan masyarakat lokal, terutama ketika terjadi kenaikan harga pangan.



Gambar 33. Keberadaan Komplek Pertokoan dan Pasar 2011 berdasarkan Kelompok Pendapatan Desa 2014 (dalam Persen)

Sumber: Diolah dari Podes 2011 dan Peta Kemiskinan 2015.

VI. MODAL SOSIAL MASYARAKAT DESA: PARTISIPASI, TOLERANSI, POLA RELASI

Pertemanan, jaringan sosial, keikutsertaan dalam suatu kelompok masyarakat, ataupun bentuk relasi sosial lain yang terjalin berlandaskan rasa saling percaya merupakan suatu modal sosial yang dapat menentukan kemajuan suatu masyarakat (Woolcock, 1998; Easterly, Ritzen, dan Woolcock, 2006; Green, Preston, dan Sabates-Helson, 2003). Penting diingat bahwa norma, kepercayaan, dan jaringan merupakan faktor produktif yang menjadikan proses koordinasi, komunikasi, dan transaksi antarindividu lebih efisien (Fisman, 2004); dengan pula halnya dengan permasalahan asimetri informasi dan ketidakpastian yang bisa dihadapi secara spesifik, kepercayaan antarindividu ini dapat mengurangi biaya transaksi dan hukum (transaction cost dan legal cost) dalam investasi maupun transaksi jual beli (Dearmon dan Gier, 2009), meningkatkan produktivitas dari sumber daya manusia (Bjornskov dan Meon, 2015) sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Cui, 2007).

Adanya variasi temuan terkait hubungan modal sosial dan pertumbuhan ekonomi antara negara maju dan negara berkembang mengindikasikan bahwa dampak modal sosial tergantung pada wilayah juga tingkat dan distribusi pendapatan (Knack dan Keefer, 1997; Putnam, 2000). Pada masyarakat dengan distribusi pendapatan yang lebih timpang, Razafindralandy (2015) menunjukkan bahwa tingkat modal sosial ditemukan lebih rendah. Namun perbedaan tingkat pendapatan, karakteristik masyarakat, juga keragaman budaya sosial bisa mengecilkkan kekuatan hubungan antara ketimpangan pendapatan dan modal sosial tersebut (Loakimidis dan Heijke, 2016).

Bagian ini akan membahas kondisi modal sosial masyarakat perdesaan dan keterkaitannya dengan ketimpangan ekonomi. Merujuk pada beberapa studi lain (Easterly, Ritzen, dan Woolcock, 2006; Ahlerup, Olsson, dan Yanagizawa, 2009), indikator yang biasa digunakan untuk mengukur modal sosial adalah partisipasi masyarakat dalam organisasi, kepercayaan antar individu, keragaman etnis dan agama, masalah sosial, dan dukungan informasi. Keterlibatan masyarakat perdesaan dalam kegiatan kemasyarakatan lebih tinggi daripada di perkotaan, namun disparitas gender masih nyata terlihat di wilayah perdesaan. Ini berbeda dengan partisipasi dalam pemilihan umum yang hampir tidak menunjukkan adanya variasi antar gender. Bahkan terjadi lonjakan cukup tinggi untuk partisipasi perempuan dalam pemilihan umum dari tahun 2007 ke 2014 di kalangan kelompok termiskin baik di perkotaan ataupun di perdesaan. Sekalipun aksi kolektif di perdesaan cukup tinggi, dukungan sosial antar masyarakat di perdesaan tidak lebih tinggi daripada di perkotaan. Di sisi lain tingkat primordialisme masyarakat secara umum sangat tinggi, kesamaan agama dan etnis masih menjadi kriteria utama dalam memilih pemimpin/perwakilan juga dalam bersosialisasi dengan masyarakat. Mengetahui temuan Dincer and Hotard (2011), keberagaman agama di dalam suatu wilayah berhubungan tidak langsung dengan ketimpangan ekonomi. Semakin beragam agama yang dianut masyarakat di suatu wilayah, semakin timpang pendapatan hingga di satu titik tertentu, keberagaman agama tersebut justru berasosiasi dengan tingkat ketimpangan ekonomi yang lebih rendah. Demikian, prevalensi terjadinya konflik antar masyarakat di perdesaan sedikit lebih tinggi daripada di perkotaan, terlebih di luar Pulau Jawa. Selain itu, tampaknya adanya asosiasi positif antara ketimpangan ekonomi dan konflik sosial, sebagaimana studi sebelumnya mengonfirmasi kemungkinan hubungan dua arah di antara keduanya.

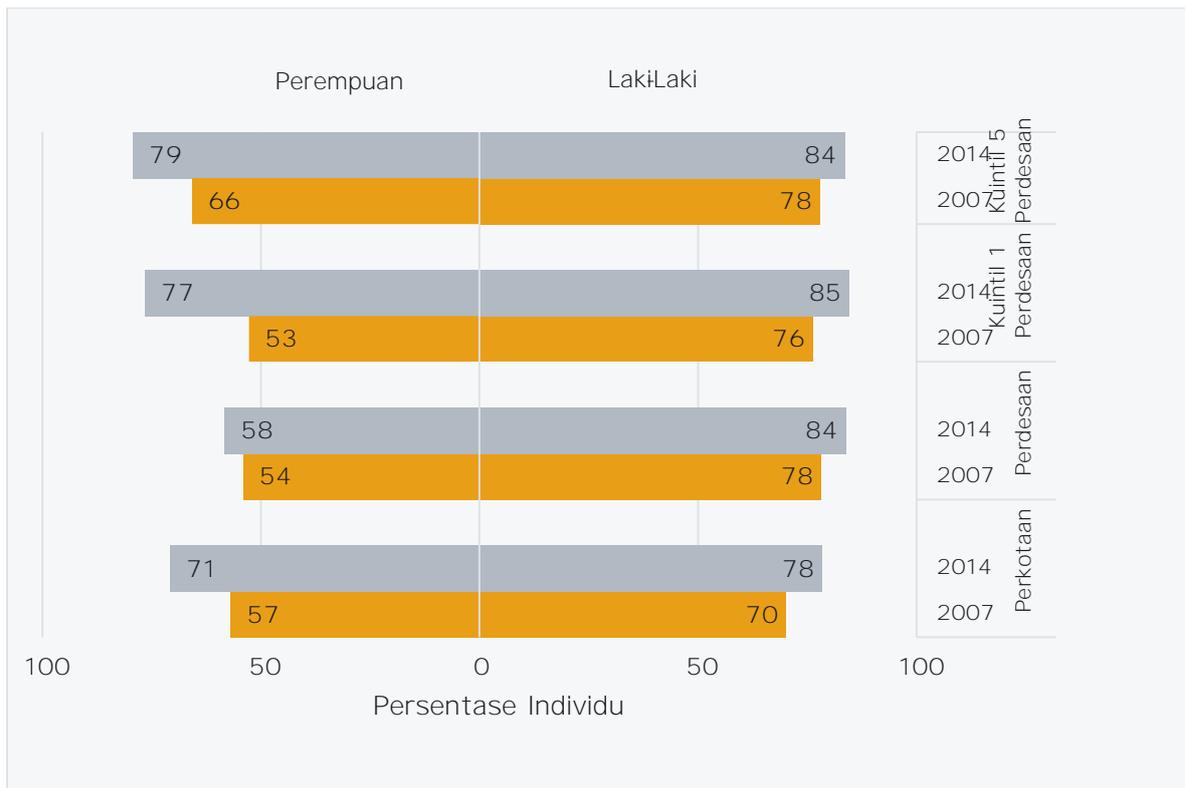
6.1 Partisipasi Sosial yang Tinggi, namun Kepercayaan Sosial yang Rendah

Sudah dikemukakan bahwa partisipasi dalam kegiatan sosial merupakan bentuk jejaring sosial yang dapat menjadi sebuah modal sosial yang akses terhadap dukungan sosial atau sumber daya lain yang tersedia menjadi lebih terdistribusikan. Gambar 3.4 berikut ini menunjukkan persentase orang di tiap kategori yang berpartisipasi dalam kegiatan atau organisasi kemasyarakatan, seperti arisan, kerja bakti, Karang Taruna, Siskamling, rapat desa, kegiatan P2000 dan lain-lain pada tahun 2007 dan 2014.

Secara keseluruhan, terjadi peningkatan proporsi masyarakat yang mengikuti kegiatan kemasyarakatan dari tahun 2007 ke tahun 2014. Proporsi laki-laki yang ikut terlibat dalam kegiatan/organisasi sosial lebih besar daripada perempuan. Sekitar 5% laki-laki ikut berperan dalam kegiatan sosial pada tahun 2007 dan meningkat menjadi sekitar 8% pada tahun 2014. Sementara itu, hanya sekitar 60% perempuan pada tahun 2007 yang turut serta dalam kegiatan sosial. Sekalipun meningkat pada tahun 2014 menjadi sekitar 71%, keterlibatan wanita dalam aktivitas sosial masih jauh di bawah pria.

Norris dan Inglehart (2003) menjelaskan bahwa perempuan sedikit berasosiasi dengan masyarakat karena mereka tidak bisa, tidak ingin, atau tidak pernah diminta untuk terlibat dalam kegiatan tersebut. Beberapa jenis kelompok atau organisasi kemasyarakatan memang tersegregasi berdasarkan jenis kelamin, seperti posyandu yang umumnya dikelola oleh perempuan, kerja bakti yang cenderung melibatkan laki-laki atau poskamling (keamanan lingkungan) yang hanya dilakukan oleh laki-laki. Selain itu, pemahaman konvensional mengenai pembagian peran tradisional antara laki-laki dan perempuan bisa juga berkontribusi atas rendahnya partisipasi perempuan dalam kegiatan kemasyarakatan dibandingkan laki-laki (Healy, Haynes, dan Hampshire 2007).

Dibandingkan dengan di perkotaan, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan masyarakat di perdesaan secara umum lebih tinggi. Hal ini karena kedekatan antar individu dalam masyarakat perdesaan dan rasa memiliki yang lebih besar daripada di perkotaan. Selain itu, hal ini juga terkait dengan perbedaan struktur ekonomi perdesaan yang lebih komunal daripada wilayah perkotaan (Bosworth, 2014). Dengan asumsi bahwa masyarakat urban semakin lebih terbuka secara ekonomi dan terbuka terhadap nilai modern, dikotomi tradisional atas peranan perempuan dan laki-laki pun mulai memudar (Spain, 2014; Lilius, 2016). Hal ini dapat diamati mengecilnya disparitas keterlibatan sosial antara laki-laki dan perempuan di wilayah perkotaan dibandingkan di perdesaan, terdapat pada tahun 2007 proporsi laki-laki yang mengikuti kegiatan kemasyarakatan di wilayah perkotaan 25% lebih banyak daripada proporsi perempuan. Sementara itu, pada 2014 ketika proporsi laki-laki meningkat 8% poin proporsi perempuan yang terlibat dalam kegiatan sosial meningkat 14% poin. Dengan demikian, di antara keduanya hanya terpaut 7% saja pada saat ini kontras dengan di wilayah perdesaan yang disparitas di antara keduanya justru melebar dalam kurun waktu tujuh tahun, dari 14% pada 2007 menjadi 26% pada 2014.



Gambar 34. Partisipasi di Setidaknya Satu Jenis Kegiatan Komunitas Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan dan Gender, 2007 dan 2014

Sumber: Diolah dari IFLS 2007 dan 2014.

Keterangan: Persentase di masing-masing kategori.

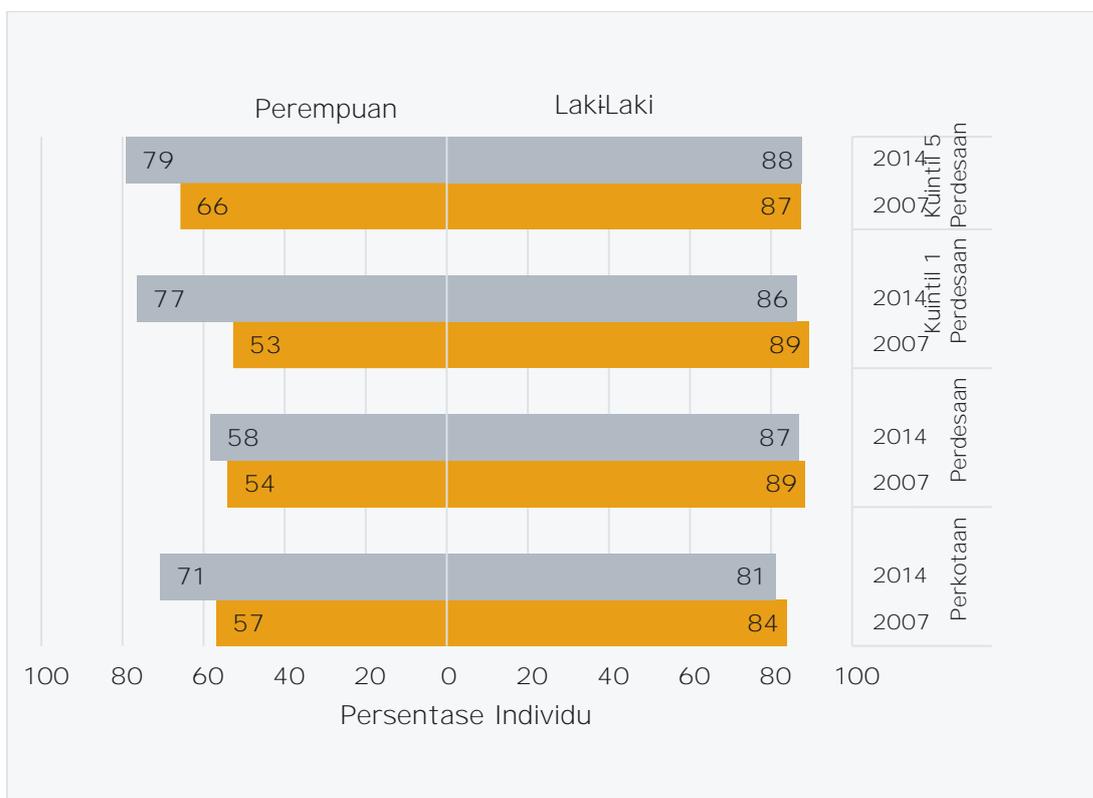
Terkait dengan tingkat kesejahteraan secara relatif, menarik diamati bahwa terdapat perbedaan pola keterlibatan sosial antara laki-laki dan perempuan. Di antara laki-laki tidak tampak perbedaan keterlibatan sosial yang berarti antara yang berkecukupan dan kelompok termiskin. Pada tahun 2007, sebesar 76% laki-laki di kuintil 1 mengaku berpartisipasi dalam kegiatan komunitas perdesaan; sedangkan di kuintil 5 sebesar 78%. Begitu pula pada tahun 2014 hanya terdapat perbedaan yang kecil, yaitu sebesar 85% kuintil 1 dan 84% di kuintil 5. Hal berbeda ditemukan antara sampel perempuan perdesaan terutama pada tahun 2007. Pada tahun ini, perempuan di kelompok teratas lebih besar daripada perempuan di kelompok terbawah dalam mengikuti kegiatan komunitas. Namun, perbedaan di antara keduanya jauh mengecil pada tahun 2014 menjadi sama (Gambar 34).

Keterlibatan dalam aktivitas publik berkaitan dengan kesejahteraan karena untuk membangun dan menjaga relasi sosial tersebut terdapat biaya sosial yang harus dipenuhi (Clever, 2005; Story and Carpiano, 2017). Fakta bahwa hubungan di antara kedua hal tersebut lebih nyata terlihat di antara perempuan daripada laki-laki menyiratkan bahwa biaya jejaring sosial yang harus dipenuhi perempuan lebih besar dibandingkan laki-laki.

Ketimpangan akses terhadap kegiatan sosial antara perempuan miskin dan kaya menunjukkan ketidakmampuan perempuan miskin dalam mengatasi hal terkait kendala biaya dan fisik (Kozel dan Parker, 2000; Story dan Carpiano, 2017). Lebih daripada itu, ketimpangan akses ini menggambarkan hambatan yang mereka hadapi untuk menjangkau bentuk modal kehidupan lain, yaitu modal keuangan, modal manusia, modal alam, dan modal sosial. Modal sosial menjadi sumber daya yang paling penting bagi orang miskin. Pemilikan terhadap keempat modal lain sangat terbatas (Warren, Thompson, dan Saeger, 2001). Mengingat melalui

ruang publik tersebut, masyarakat miskin dan rentan seharusnya dapat memanfaatkan relasi dan koneksi untuk memperoleh informasi untuk memperbaiki strategi penghidupan mereka, membuka kesempatan untuk ikut menyuarakan perspektif mereka, juga sebagai modal lain untuk menghadapi guncangan dan kerentanan (Story and Carpiano, 2017). Suatu misal melalui perkumpulan arisan, masyarakat miskin dapat memperoleh sejumlah uang yang bisa dimanfaatkan untuk memulai usaha baru atau pertemuan desa masyarakat dapat memperoleh informasi lowongan pekerjaan atau pelatihan gratis.

Selain partisipasi dalam aksi kolektif, partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, baik untuk memilih presiden, kepala daerah, atau DPR (Perwakilan Rakyat) juga cukup tinggi, yaitu sekitar 80 untuk laki-laki dan 60 untuk perempuan. Keikutsertaan dalam pemilu oleh laki-laki relatif stabil selama tujuh tahun periode 2000-2007. Sedangkan di antara perempuan, terjadi lonjakan cukup dramatis terutama di wilayah perkotaan (meningkat 40%) dan di perdesaan untuk perempuan kelompok miskin (meningkat 20%) (Gambar 35).



Gambar 35. Masyarakat yang Menggunakan Hak Pilihnya Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan dan Gender, 2007 dan 2014

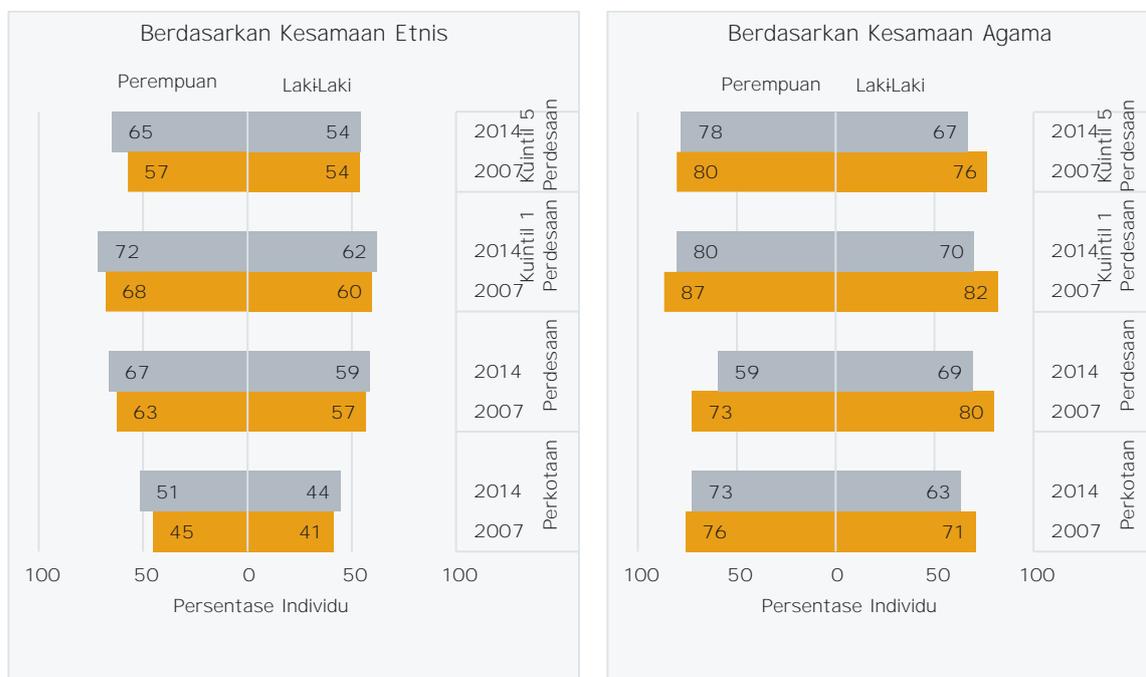
Sumber: Diolah dari IFLS 2007 dan 2014.

Keterangan: Persentase di masing-masing kategori.

Bibler, Mohan, dan Ryan (2014) menjelaskan satu rintangan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum adalah banyaknya perempuan yang tidak memiliki dokumen kependudukan resmi sebagai prasyarat untuk menjadi pemilih sah, seperti buku nikah, kartu keluarga, atau kartu tanda penduduk. Selain itu, kesibukan perempuan dalam menjalankan peran pengasuhan di area domestik menghalangi perempuan untuk mendapatkan waktu luang untuk pergi ke tempat pemungutan suara.

Lebih jauh lagi tentang preferensi dalam pemilihan umum, lebih banyak masyarakat memilih pemimpin/wakil rakyat berdasarkan kesamaan agama, dan sekitar 50% memilih berdasarkan kesamaan etnis. Dalam kurun waktu tujuh tahun, dari 2007 ke 2014, terjadi sedikit penurunan prevalensi masyarakat yang menjadikan agama sebagai kriteria utama pemilihan pemimpin/wakil rakyat, sebaliknya sedikit kenaikan pada kriteria kesamaan etnis. Berdasarkan gender, tampak lebih banyak proporsi perempuan yang menunjukkan primordialisme dalam menggunakan hak politiknya. Hal ini konsisten hampir di semua kategori lokasi atau tingkat kesejahteraan, kecuali di perdesaan dalam hal preferensi agama. Pada kategori ini, porsi perempuan lebih rendah dari laki-laki pada tahun 2007 dan lebih rendah pada tahun 2014. Dibandingkan di perkotaan, di perdesaan terdapat lebih banyak masyarakat baik laki-laki maupun perempuan yang mengakui cenderung memilih pemimpin berdasarkan kesamaan agama atau etnis, terlebih lagi di antara masyarakat perdesaan yang berada di kelompok paling miskin (Gambar 36)

Dengan cukupingnya hasrat primordialisme masyarakat seperti ini, penting diperhatikan bahwa banyak kandidat pemimpin yang masih menggunakan agama dan etnis sebagai modal untuk menarik suara masyarakat. Aspinall, Dettman, dan Warburton (2011) menemukan fenomena ini pada studi kasus pemilihan walikota Medan, Sumatra Utara. Mereka menjelaskan bahwa pada putaran terakhir ketika dua kandidat walikota memiliki agama dan suku/ras berbeda, dalam hal Islam versus Buddha tim sukses menggunakan dalih agama untuk memenangkan calon mereka. Strategi kampanye ini terbukti efektif dan kandidat muslim menang dengan margin yang cukup besar. Hal identik juga terjadi di Jakarta pada tahun 2012, ketika agama digunakan sebagai alat untuk menolak kandidat muslim dan beretnis Tionghoa (Putra 2016), kemudian hal yang sama berulang kembali pada tahun 2017 (Kartika 2017; Sulistiyanto, 2018). Pinski Liddle, dan Mujani (2012) membuktikan bahwa beragama Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia, benar dapat memberikan keuntungan secara politis, walaupun dibatasi oleh pengetahuan pemilih terhadap kebijakan ekonomi yang diusung oleh kandidat.



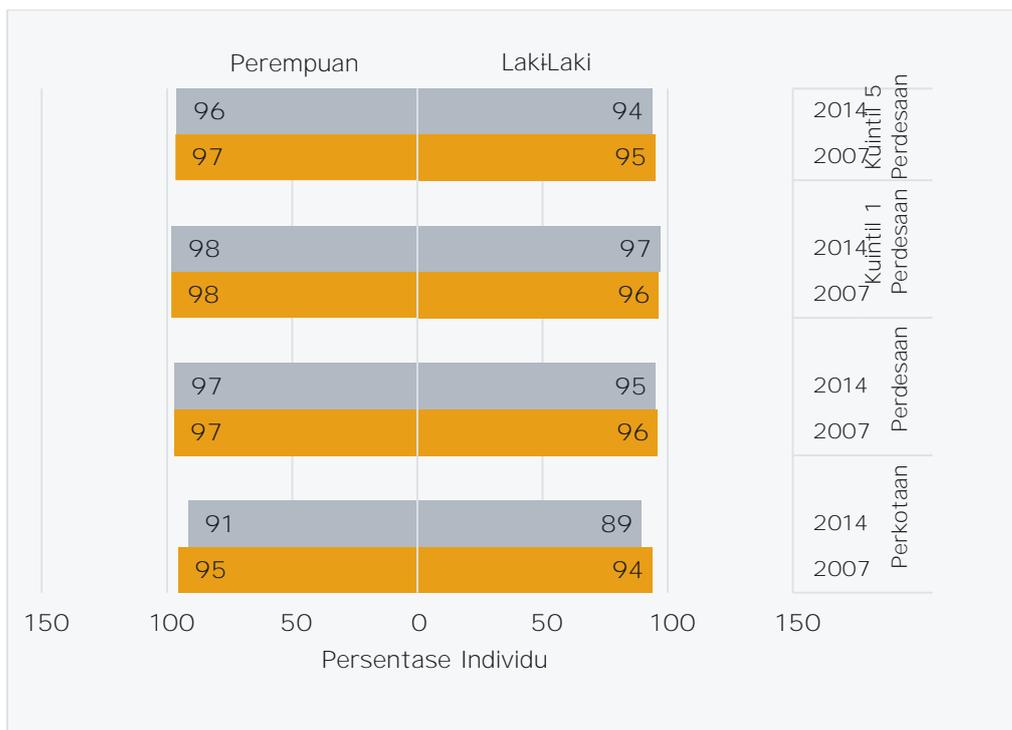
Gambar 36. Preferensi dalam Memilih Pemimpin/wakil rakyat Rakyat Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan dan Gender, 2007 dan 2014

Sumber: Diolah dari IFLS 2007 dan 2014.

Keterangan: Persentase di masing-masing kategori.

Besarnya porsi masyarakat yang menjadikan kesamaan etnis, terutama agama, sebagai kriteria utama pemilihan pemimpin/wakil rakyat menjadi merupakan bentuk penolakan sosial terhadap kelompok agama/etnis tertentu yang dapat mengancam kohesi sosial. (2011) menekankan besarnya peranan identitas agama yang diikuti dengan prasangka negatif terhadap kelompok agama lain dalam menciptakan bahkan memperburuk konflik kelompok di Indonesia. Meskipun demikian, identitas suatu kelompok atau prasangka dan stereotip terhadap kelompok tertentu merupakan suatu hal yang dinamis; tergantung pada kepentingan politis dari kelompok-kelompok yang terlibat (Wagner, Holtz, dan Kashima 2009).

Gambar 37 memberikan gambaran tentang prasangka yang ditujukan dan stereotip yang disematkan pada kelompok lain dalam wujud ketidakpercayaan dan penolakan terhadap kehadiran kelompok lain tersebut di dalam kehidupan suatu kelompok. Ditemukan bahwa secara umum hampir 95% masyarakat tidak percaya dengan orang yang terlahir dengan etnis berbeda atau memeluk agama yang berbeda, baik secara informal dalam bertetangga, atau dalam hal lebih formal seperti sewa menyewa. Ketidakpercayaan ini juga dimanifestasikan dengan upaya penolakan ketika tempat peribadatan umat agama lain dibangun di daerah sekitar rumahnya. Menarik untuk diamati bahwa tidak ada perbedaan signifikan dalam prevalensi eksklusivisme agama, antar lokasi, atau antar tingkat kesejahteraan. Begitu pun tidak ada perubahan tren dan pola waktu, dari 2007 ke 2014.



Gambar 37. Sikap tidak Percaya kepada Orang dengan Agama/Etnis Berbeda Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan dan Gender, 2007 dan 2014

Sumber: Diolah dari IFLS 2007 dan 2014.

Keterangan: Persentase di masing-masing kategori. Variabel diturunkan dari beberapa indikator, di antaranya adalah: ketidakpercayaan terhadap umat agama/etnis lain atau keberatan bertetangga dengan umat agama/etnis lain atau keberatan menyewakan tanah/rumah terhadap umat agama/etnis lain atau keberatan dengan dibangunnya tempat peribadatan agama lain di lingkungan tempat tinggal.

Dalam kaitannya dengan tingkat kesejahteraan, kemungkinan untuk terlahir terhadap orang dengan agama/etnis berbeda menjadi lebih besar di antara masyarakat desa yang berada

di 20% kelompok termiskin. Namun, perbedaannya dengan masyarakat di kelompok kesejahteraan teratas sangat tipis. Temuan ini tidak sesuai dengan beberapa studi lain yang mengonfirmasi keterkaitan antara toleransi terhadap kelompok lain dan tingkat kesejahteraan. Milligan (2011) melakukan analisis antarnegara dan individu dalam suatu negara tentang hubungan antara toleransi terhadap etnis/agama dan tingkat kesejahteraan. Hasilnya adalah sikap toleransi ditemukan berasosiasi positif dengan tingkat kesejahteraan sudah hubungannya tersebut lebih kuat diantara orang-orang berpenghasilan lebih tinggi.

Eksklusivisme merupakan bibit dari sikap radikalisme dalam beragama (Pattaz, 2004). Terkait dengan hal ini, terdapat variasi temuan studi mengenai asosiasi tingkat kesejahteraan dengan sikap radikalisme. Beberapa pihak meyakini bahwa kemiskinan meningkatkan risiko seseorang menjadi radikal (Mousseau, 2011). Di lain pihak, beberapa studi juga menemukan bahwa hubungan tersebut tidak tampak (Chiozza, 2010 dalam Rink dan Sharma, 2011). Bahkan, tidak sedikit juga yang menunjukkan hal sebaliknya, yaitu bahwa masyarakat kelas menengah lah yang lebih mendukung aksi terorisme berbasis agama (Blau, 2013) atau bahwa masyarakat dalam kelompok paling miskin memiliki kemungkinan lebih untuk mendukung aksi terorisme ketimbang kelompok-kelompok yang lebih sejahtera (Fair dan Shepherd, 2006). Dengan kata lain, terdapat hal lain yang lebih terkait dengan sikap primordialisme atau eksklusivisme di luar tingkat kesejahteraan.

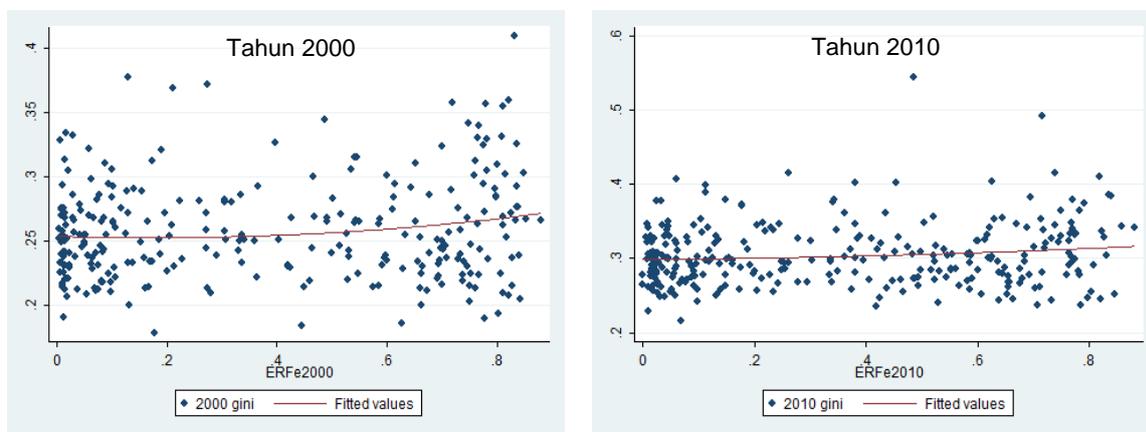
6.2 Hubungan Tidak Linier antara Keberagaman Identitas Sosial dan Ketimpangan Ekonomi

Putnam (1995) mendefinisikan modal sosial sebagai suatu aspek kehidupan bermasyarakat, yaitu jaringan, norma, dan kepercayaan, yang memungkinkan anggota dari suatu masyarakat melakukan aksi kolektif untuk mencapai tujuan bersama. Seberapa efektif masyarakat untuk mencapai tujuan bersama tersebut ditentukan oleh tingkat kohesi sosial atau sejauh mana masyarakat terintegrasi dan bersatu. Dalam hal ini, keberagaman di dalam masyarakat, baik secara kesukuan, agama, atau ras, bisa dipandang sebagai sumber yang berbeda. Menurut teori kontak, keberagaman mampu mengikis perbedaan di dalam/antar kelompok masyarakat dan mendorong semangat solidaritas antar grup atau yang disebut sebagai *social capital* sehingga mengurangi etnosentrisme. Di sisi lain, dalam teori konflik diyakini bahwa keberagaman akan mempertajam perbedaan antarkelompok oleh karenanya akan menguatkan solidaritas di dalam kelompok itu sendiri, atau *bonding social capital* sehingga justru akan meningkatkan etnosentrisme (Putnam, 2002). Etnosentrisme ialah yang membahayakan kohesi sosial, yang dikhawatirkan akan mengancam tercapainya tujuan bersama. Oleh karena itu, keberagaman sosial ini sering dikaitkan dengan capaian politik atau ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi atau pemenuhan kebutuhan publik. Umumnya ditemukan bahwa keberagaman sosial berdampak negatif terhadap capaian tersebut (Alessina dan Ferrara, 2005; Easterly, 2006). Namun, bagaimana itu berdampak pada distribusi pendapatan masih menuai banyak perdebatan.

Dincer dan Hotard (2011) menjelaskan bahwa keberagaman identitas sosial-agama dan ketimpangan ekonomi tidak berasosiasi dalam hubungan yang linear. Sebaliknya mereka membuktikan adanya hubungan terbalik (kuadratik) antara *Ethnic Fracturalization (ERF)* dan *Religion Fracturalization (RF)* dengan ketimpangan pendapatan di 58 negara di Afrika, Asia, dan Amerika latin. Artinya, semakin beragam agama dalam suatu wilayah, semakin timpang kesejahteraan masyarakatnya, namun pada titik tertentu keberagaman tersebut justru identik dengan ketimpangan yang lebih rendah. Lebih jauh lagi ditemukan bahwa ketimpangan pendapatan tersebut akan sampai pada titik maksimum (ERF dan RF) mencapai angka 40 (Q34) *Ethnic Religion Fracturalization* mengindikasikan keberagaman etnis-agama di suatu wilayah

yang diwujudkan dalam angka 0 sampai 1. Semakin mendekati angka 1, semakin beragam jenis etnis/agama di wilayah tersebut.

Gambar 38 di bawah ini menggambarkan *quadratic fitted line* yang menunjukkan prediksi korelasi antara ERF dengan indeks Gini berdasarkan sebaran data di tingkat kabupaten Indonesia di masing-masing tahun 2000 dan 2010. Hampir tidak diidentifikasi adanya pola kuadrat dalam hubungan antara keragaman etnis dan ketimpangan pendapatan antara kabupaten Indonesia di kedua tahun, sebagaimana ditemukan oleh Daner (2011). Sebaliknya, prediksi indeks Gini tampak tetap sekalipun nilai ERF semakin besar. Adanya kesamaan identitas yang cukup kuat untuk menyatukan berbagai etnis yang beragam tersebut dapat menjadi penjelas dari terpisahnya keragaman etnis dan ketimpangan moneter karena dengan demikian perbedaan belum menghasilkan perselisihan yang berpengaruh buruk terhadap perekonomian (Daner, 2011).

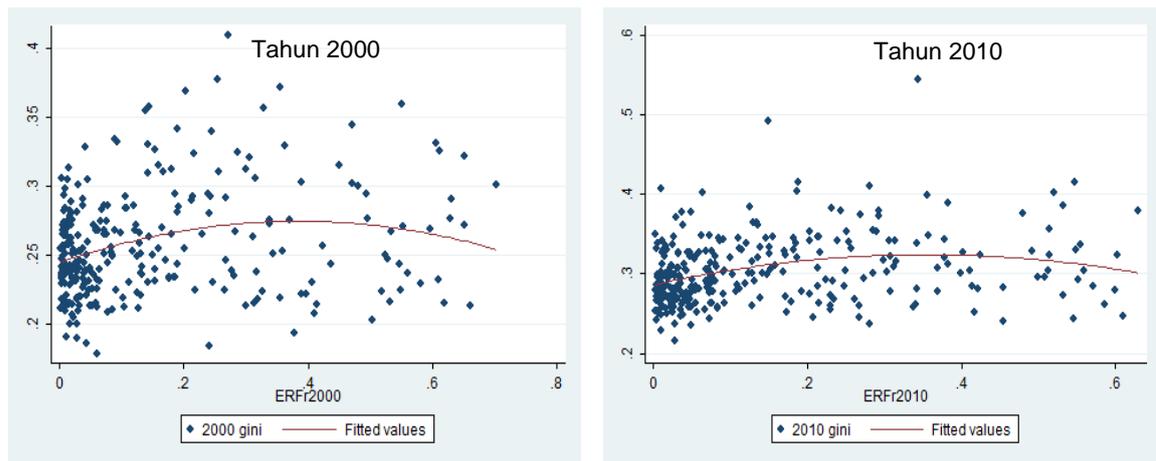


Gambar 38. Fitted Line antara Ethnic Fractionalization Index dan Indeks Gini

Sumber: Diolah dari Sensus 2000 dan 2010.

Pola kuadrat-terbalik, sekalipun tidak sempurna, didapati pada korelasi ERF dan Gini sebagaimana tampak pada Gambar 39 di bawah ini. Semakin beragam agama yang dipeluk oleh masyarakat di suatu kabupaten, semakin tinggi pula distribusi pendapatan di wilayah tersebut. Hingga pada satu titik maksimum tertentu, keragaman tersebut justru diasosiasikan dengan penurunan ketimpangan pendapatan. Pada tahun 2000, titik balik tersebut adalah ERF ketika indeks mencapai angka 0,384 dan ketika mencapai 0,354 pada tahun 2010. Artinya, kabupaten kabupaten dengan ERF lebih dari 0,384 (Q354) cenderung memiliki tingkat ketimpangan pendapatan yang lebih rendah.

Hubungan terbalik antara keberagaman dan ketimpangan mengindikasikan bahwa keberagaman tidak selalu berdampak buruk pada capaian ekonomi, yang ditunjukkan salah satunya oleh ketimpangan pendapatan ini. Argumen yang sering mengemuka adalah bahwa *big man* dan *patron-client* akan lahir inovasi yang berujung pada peningkatan produktivitas sumber daya manusia (dan Parolo, 2009), walaupun ini tidak secara langsung menjelaskan lebih rendahnya ketimpangan pendapatan pada daerah dengan keberagaman sangat tinggi. Ketimpangan pendapatan ini menjadi indikasi dari konflik antar kelas, maka penjelasan yang mungkin relevan adalah polarisasi kelompok, bahwa dampak buruk dari keberagaman akan lebih besar ketika hanya terdapat dua kelompok yang berbeda (Montalvo dan Reynal, 2014). Argumen ini berakar pada argumen Horowitz (1985) bahwa konflik sosial lebih jarang terjadi pada masyarakat yang sangat homogen atau sangat heterogen dimana *aktorisasi* menjadi tidak menguntungkan, dan benturan antar kelas tidak bisa dihindari (Montalvo dan Reynal, 2005).



Gambar 39. Fitted Line antara Religion Fracturalization Index dan Indeks Gini

Sumber: Diolah dari Sensus 2000 dan 2010.

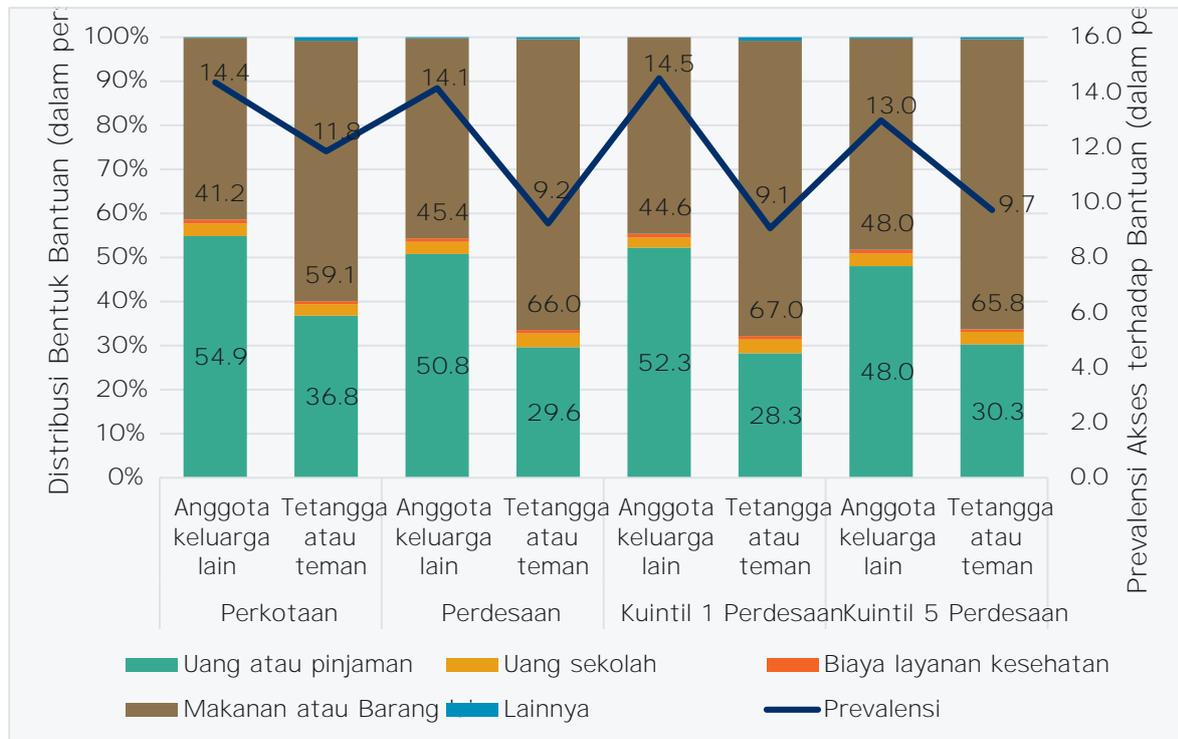
6.3 Dukungan Sosial antara Masyarakat Perdesaan Tidak Lebih Tinggi daripada Masyarakat Perkotaan

Dukungan sosial merupakan bagian dari sosial karena melalui jaringan sosial ini masyarakat dapat saling membantu untuk mengatasi masalah sehari-hari (Kawachi, Subramanian, dan Kim 2008 dan Dominguez dan Watkins, 2003). Dengan anggapan bahwa hubungan kekerabatan dan interaksi sosial di perdesaan lebih kuat daripada perkotaan, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 34 maka begitupun dukungan sosial di desa akan lebih kuat dibanding di kota. Pun demikian, dugaan ini tidak dibuktikan pada Gambar berikut. Hampir tidak ada perbedaan prevalensi seseorang mendapat bantuan informal dari anggota keluarga lain antara yang tinggal di perdesaan atau perkotaan yang termasuk dalam kisaran 1%. Bahkan masyarakat di perkotaan memiliki peluang 6% lebih besar untuk mendapatkan bantuan dari tetangga/teman dibandingkan masyarakat di perdesaan.

Beberapa studi berusaha mengidentifikasi dampak dari dukungan sosial perkotaan dan menemukan adanya dampak signifikan dari dukungan sosial tersebut, seperti terhadap pengurangan kerawanan makanan (King, 2017) atau kesehatan mental (Chadwick and Collins, 2015). Meskipun demikian, Chadwick and Collins (2015) menyebutkan bahwa ukuran kota berbanding terbalik dengan ketersediaan dukungan sosialnya. Semakin besar suatu kota semakin kecil dukungan sosial yang tersedia. Selain itu, King *et al.* (2004) mengungkapkan bahwa pada desa dengan tingkat migrasi dari desa ke kota yang tinggi, penurunan dukungan sosial cukup besar untuk menyebabkan depresi di kalangan masyarakat daerah pengirim migran. Bentuk penurunan dukungan sosial yang digunakan adalah hidup sendiri, jarang bertemu (kurang dari sebulan sekali) dengan tetangga, teman, atau saudara, dan tidak memiliki teman atau tetangga dekat. Artinya, gelombang migrasi bisa menjadi salah satu faktor yang mengendorkan ikatan sosial antara masyarakat desa sehingga ketersediaan sosialnya pun berkurang.

Perbedaan lain yang terlihat antara masyarakat perdesaan dan perkotaan adalah pada bentuk bantuan yang diberikan. Masyarakat perdesaan lebih cenderung mendapatkan bantuan dalam bentuk barang/makanan daripada uang atau pinjam di antara masyarakat perkotaan. Di perkotaan sekalipun proporsi dukungan dalam bentuk makanan/barang tetap lebih tinggi daripada di

perdesaan yaitu 58% dibandingkan 59% untuk bantuan dari anggota keluarga lain dan 59% dibandingkan 66% untuk bantuan dari teman/tetangga. Dengan adanya kemudahan transaksi finansial berbasis teknologi yang kemungkinan lebih dinikmati oleh masyarakat urban, fakta tersebut bisa menjadi indikasi bahwa keakraban sosial masyarakat perkotaan tidak terjalin secara langsung seperti di desa. Analisis memberi dalam bentuk barang/makanan lebih mungkin terjadi.



Gambar 40. Distribusi dan Prevalensi atas Dukungan Informal dari Masyarakat 2014

Sumber: Diolah dari IFLS 2014.

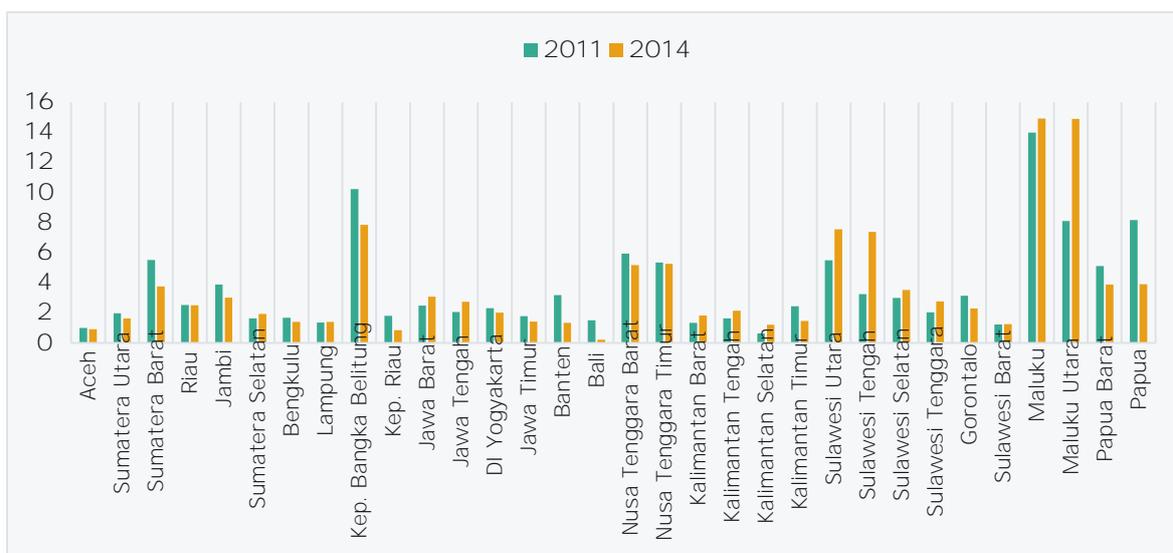
Selain itu, jenis bantuan yang tampak jelas terkait dengan sumber bantuannya yaitu bantuan uang/pinjaman lebih cenderung berasal dari keluarga/kerabat sedangkan barang dan makanan berasal dari tetangga/teman. Banyak temuan studi dari negara lain (seperti Saleh, Costa, 2015; Garasky, Norton, dan Greda, 2006; Morton, 2005) yang menunjukkan peranan dukungan sosial dalam bentuk instrumental (menyediakan dukungan sosial oleh Harpham, 2008) untuk mengurangi kerawanan makanan (King, 2017). Hal ini tetangga mengetahui siapa antara orang di sekitarnya yang lebih membutuhkan makanan kemudian bergerak untuk berbagi. Ketepatan target bantuan tersebut menjadikan dukungan masyarakat secara informal ini menjadi efektif untuk mengatasi kerawanan makanan. Mekanisme tersebut juga dimanfaatkan oleh pemerintah untuk memonitor ketepatan sasaran dari bantuan formal pemerintah dalam hal pangan, seperti Raskin.

6.4 Hubungan Dua Arah antara Konflik Sosial dan Ketimpangan Ekonomi

Blattman dan Miguel (2010) menyimpulkan bahwa konflik kekerasan berpengaruh terhadap keluaran ekonomi melalui merusak modal sumber daya manusia dan modal fisik. Peningkatan

belanja pemerintah dan investasi swasta, serta gangguan pada kehidupan ekonomi dan relasi sosial. Beberapa studi antarnegara yang mencoba menghubungkan konflik dengan pertumbuhan ekonomi adalah Collier (1999) yang menemukan hubungan negatif antara durasi perang sipil dan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, Imai dan Weinstein (2000) memperkuat kesimpulan studi Collier dan menemukan satu faktor pendukung penting lainnya, yaitu luas atau tidaknya daerah konflik. Perang sipil yang berlangsung di seluruh area memberikan dampak yang jauh lebih besar bila dibandingkan perang sipil yang berlangsung di satu area saja. Abadie dan Pazabal (2003) menemukan dampak negatif dari konflik terhadap PDB di Basque. Sementara itu, Lopez dan Wodon (2005) melihat dampak pemburuan (genosida) di Rwanda terhadap PDB per kapita dan menemukan bahwa genosida diikuti oleh turunnya PDB per kapita, tetapi tidak untuk jangka waktu panjang.

Di Indonesia, intensitas konflik kekerasan terlihat semakin tinggi terjadi di beberapa provinsi setelah Orde Baru, walaupun setelah tahun 2002 menurun. Tren Tadjoeidin dan Murshed (2007) mengelompokkan konflik kekerasan yang terjadi di Indonesia menjadi dua: episodik dan rutin. Konflik episodik adalah konflik etnis dan separatis yang secara tipikal berasosiasi dengan jumlah kejadian yang rendah dan dampak korban jiwanya besar, sedangkan konflik rutin memiliki karakteristik sebaliknya. Gambar 41 menunjukkan kondisi terkini dari konflik sosial yang terjadi di provinsi di Indonesia. Beberapa provinsi yang mengalami insidens tinggi selama tahun 2011 dan 2014 adalah Kep. Bangka Belitung, NTB, NTT, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua.



Gambar 41. Insiden konflik per Provinsi 2011 dan 2014 (Persentase dari total Konflik)

Sumber: Diolah dari Podes 2011 dan 2014.

Tabel 9 menunjukkan jenis konflik yang terjadi di wilayah Indonesia selama setahun dari tengah tahun 2013 hingga 2014. Pola konflik yang sama terjadi baik di wilayah nasional, perkotaan maupun perdesaan. Hanya saja sedikit perbedaan antara wilayah Jawa dan Luar Jawa yaitu wilayah Luar Jawa memiliki insidens konflik kelompok masyarakat yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah Jawa. Hal ini berbeda dengan studi Kai Barron dan Pradhan (2009) yang melihat aspek konflik yang sama namun menemukan bahwa wilayah Jawa mengalami insidens yang lebih tinggi dibandingkan dengan Luar Jawa. Perbedaan data yang digunakan Barron *et al* (2009) adalah Potensi Desa 2003. Studi ini menggunakan data

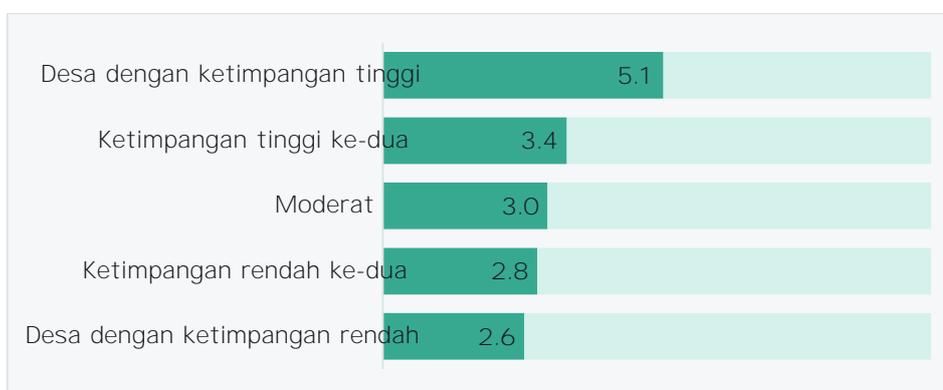
terkini yaitu data tahun 2014. Hal ini pula yang menggambarkan bahwa pola konflik di Indonesia sudah mulai berubah dari yang sebelumnya berbentuk konflik episodik sebelum tahun 2005 menjadi konflik rutin setelah tahun 2005 hingga sekarang (Tadjoeddin, 2016).

Tabel 9. Jenis Konflik berdasarkan Wilayah

Jenis konflik 2014	Persentase Konflik (%)				
	Nasional	Perkotaan	Perdesaan	Jawa	Luar Jawa
Antar kelompok masyarakat	41.97	41.74	42.07	38.85	43.23
Antar desa/kelurahan	34.88	27.33	38.31	32.76	35.74
Kelompok masyarakat dengan aparat keamanan	3.18	2.22	3.61	1.38	3.91
Kelompok masyarakat dengan aparat pemerintah	2.75	1.38	3.37	1.26	3.35
Pelajar/mahasiswa	10.43	20.13	6.02	19.89	6.61
Antar suku	1.76	1.69	1.78	0.46	2.28
Lainnya	5.03	5.51	4.82	5.40	4.89
Jumlah	3,019	944	2,075	870	2,149

Sumber: Diolah dari Podes 2014.

Terdapat hubungan dua arah antara kemiskinan dan konflik. Konflik dapat menyebabkan kemiskinan (Elbadawi dan Sambanis, 2002) karena konflik berpotensi mengurangi jumlah modal (modal fisik dan manusia) serta berkurangnya investasi di masa depan. Berkurangnya kedua hal ini pada akhirnya akan berpeluang menyebabkan rendahnya kondisi sosial ekonomi di masa depan, dan memperbesar peluang jatuh ke kemiskinan. Di sisi lain, kemiskinan berpotensi memperbesar peluang terjadinya konflik. Biaya atas kesempatan yang hilang konflik relatif kecil di negara yang miskin dan tingkat pertumbuhannya rendah (Elbadawi dan Sambanis, 2002). Sementara itu, pemimpin dari negara dengan tingkat ekonomi rendah cenderung untuk menimbulkan konflik agar dapat terpilih kembali untuk masa jabatan berikutnya (Hess Orphanides, 1995). Cobarrubias (2003) dan Braithwaite (2011) juga menyebutkan bahwa negara dengan tingkat perekonomian yang rendah berpeluang untuk terjebak dalam siklus kemiskinan dan konflik.



Gambar 42. Desa yang Mengalami Konflik pada 2011 Berdasarkan Kelompok Ketimpangan Desa 2015 (%)

Sumber: Diolah dari Podes 2011 dan Peta Kemiskinan 2015.

Berdasarkan data Podes 2011 dan Peta Kemiskinan 2015, terlihat bahwa desa yang berada di kelompok ketimpangan tinggi cenderung mengalami konflik (Gallbar 42). Ini menguatkan studi sebelumnya yang mencoba melihat konflik dan ketimpangan dari dua arah. Studie Taajjoeddin (2016) mengkonfirmasi bahwa ketimpangan yang terjadi di Indonesia memicu terjadinya konflik sedangkan Elbadawi (1999) melihat bahwa konflik memiliki potensi peningkatan kemiskinan mengingat konflik mengurangi modal fisik dan manusia serta kerugian yang ditimbulkannya.

VII. KESIMPULAN DAN STUDI LANJUTAN

Studi ini menemukan bahwa perdesaan Indonesia sebenarnya semakin sejahtera dalam satu dekade terakhir. Namun, peningkatan kesejahteraan itu tidak diiringi dengan distribusi kesejahteraan yang merata. Ketimpangan yang ditunjukkan oleh perbedaan pertumbuhan pendapatan antar kelompok kesejahteraan di antaranya dapat dijelaskan oleh penguasaan modal yang lebih didominasi oleh kelompok terkaya sehingga yang lebih banyak menikmati keuntungan dari kemajuan ekonomi dan pembangunan perdesaan Indonesia. Salah satu sumber pertumbuhan ekonomi perdesaan adalah adanya transformasi struktural yang ditandai dengan peningkatan proporsi masyarakat desa yang beralih dari sektor pertanian nonpertanian. Meskipun demikian, peralihan sektor ini diduga hanya bisa diakses oleh masyarakat yang memiliki kapasitas modal penghidupan yang mumpuni sehingga keuntungannya pun terkonsentrasi pada masyarakat kelompok terkaya tersebut.

Analisis tabulasi silang antar indikator modal penghidupan dan kelompok kesejahteraan (20% terkaya dan 20% termiskin) di perdesaan mengungkap ketimpangan dalam penguasaan di kesemua jenis modal penghidupan, di beberapa indikator. Disparitas gender sangat nyata di semua indikator modal sosial, kecuali penggunaan hak politik. Di sisi lain, perempuan perdesaan mampu mengejar ketertinggalan dalam akses terhadap pendidikan, bahkan di antara kelompok yang miskin. Sedangkan secara regional, ketimpangan paling nyata terjadi dalam aspek ketersediaan infrastruktur fisik dasar dan pendukung perekonomian.

Dalam satu dekade periode studi ini (2006), beberapa kemajuan sudah dicapai oleh perdesaan. Dalam hal kapasitas sumber daya manusia terjadi perbaikan akses pendidikan di perdesaan, bahkan dengan percepatan yang jauh lebih tinggi daripada perkotaan. Disparitas akses antar kelompok kesejahteraan semakin mengecil dalam hal layanan dasar kehamilan dan persalinan. Begitupun dalam layanan imunisasi dasar, tidak diamati perbedaan antara desa dan kota. Sedangkan dalam penyediaan infrastruktur dasar, akses rumah tangga di perdesaan terhadap listrik terus mengalami peningkatan dan semakin mendekati kondisi rumah tangga perkotaan.

Di sisi lain, masih terdapat banyak tantangan yang harus diatasi dalam wilayah perdesaan, terutama hal yang berkaitan dengan sumber daya alam. Ketimpangan tajam terjadi dalam hal penguasaan lahan. Setengah dari keseluruhan lahan di perdesaan dikuasai oleh segelintir rumah tangga pertanian; sebagian besar rumah tangga pertanian rata-rata mengelola kurang dari setengah hektar lahan pertanian. Ketimpangan penguasaan lahan ini bahkan lebih buruk daripada ketimpangan pendapatan sebagaimana tercermin pada indeks Gini lahan yang bernilai 0,63, sementara indeks Gini konsumsi bernilai 0,3 (2013). Selain itu, mengingat akses corak penghidupan erat terkait dengan tipologi geografis suatu wilayah, kedua hal tersebut turut berkontribusi dalam menghasilkan disparitas kesejahteraan antardesa.

Sekalipun sudah terjadi perbaikan capaian pendidikan di perdesaan dalam satu dekade terakhir, ketimpangan akses pendidikan masih terjadi antarkelompok kesejahteraan; masyarakat desa dalam kelompok kesejahteraan atas lebih banyak menikmati kesempatan untuk menempuh pendidikan tinggi. Oleh karena itu, sampai pada tahun 2016 mayoritas masyarakat termiskin desa masih tidak memiliki ijazah atau hanya memiliki ijazah SD, sedangkan yang telah selesai menamatkan pendidikan 12 tahun tidak lebih dari 13 persen saja. Dalam hal capaian pendidikan, ketimpangan hanya nyata antarkelompok kesejahteraan, tapi antara perdesaan-perkotaan dan antarregional Indonesia.

Di antara tantangan dalam penyediaan infrastruktur fisik adalah ketimpangan ketidakterdapatannya dalam sebaran lembaga keuangan ataupun pasar dan pertokoan. Bank komersial masih dominan berlokasi di wilayah perkotaan dengan tingkat kesejahteraan tinggi. Segalipun proporsi desa yang memiliki koperasi masih lebih tinggi dibandingkan yang memiliki bank komersial, keberadaannya sebagai lembaga keuangan masih terbatas di perdesaan termiskin pun masih terbatas; begitupun ketersediaan pasar dan pertokoan masih belum merata di wilayah perkotaan atau perdesaan maju. Selain itu, di tengah lonjakan rumah tangga pengguna listrik, ketimpangan terhadap akses listrik masih terjadi, baik antarkelompok regional atau antarkelompok kesejahteraan di perdesaan itu sendiri.

Tantangan tidak kalah berat juga bersumber dari penguasaan modal sosial di dalam masyarakat perdesaan. Dikotomi tradisional dalam peranan gender kemungkinan menghalangi peran aktif perempuan dalam kegiatan kemasyarakatan. Selain itu, antarkelompok kohesi sosial muncul dari sikap primordialisme masyarakat dengan kesamaan agama dan etnis masih menjadi kriteria utama dalam memilih pemimpin lokal, juga dalam bersosialisasi dengan masyarakat. Sikap primordialisme ini akan sangat berdampak di tengah keragaman identitas masyarakat. Dalam hal ini, ditemukan adanya hubungan terbalik antara keragaman agama dan ketimpangan ekonomi. Artinya, semakin beragam agama yang dianut masyarakat di suatu wilayah, semakin timpang pula pendapatannya; tinggi di satu titik tertentu, keberagaman agama tersebut justru berasosiasi dengan tingkat ketimpangan ekonomi yang lebih rendah. Pada akhirnya, hal yang harus diwaspadai adalah konflik sosial. Pada periode pelaksanaan studi ini, ditemukan bahwa konflik antarkelompok masyarakat di perdesaan sedikit lebih tinggi daripada di perkotaan, terlebih di luar Pulau Jawa. Selain itu, tampak ada asosiasi positif antara ketimpangan ekonomi dan konflik sosial, yang bisa jadi merupakan hubungan dua arah sebagaimana dikonfirmasi oleh studi sebelumnya.

Sebagai penutup, pembangunan perdesaan yang inklusif mutlak diperlukan untuk memastikan bahwa masyarakat miskin dan rentan ikut menikmati peluang perbaikan kehidupan dan ikut merayakan peningkatan pertumbuhan perdesaan. Kertas kerja pertama ini merupakan sebuah upaya untuk memilah aspek yang menjadi sumber dari ketidakterdapatannya kesejahteraan perdesaan Indonesia. Setidaknya, dari studi ini diharapkan akan ditemukan faktor-faktor yang kemungkinan menghalangi masyarakat kelompok termiskin untuk melakukan mobilitas sosial ke tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi, dan menghambat proses pengurangan ketimpangan perdesaan.

Studi ini mengidentifikasi beberapa hal yang diduga terkait atau turut bersumbangsih dalam ketimpangan ekonomi perdesaan, diantaranya adalah rendahnya capaian pendidikan kelompok termiskin perdesaan, dominasi kelompok terkaya dalam penguasaan lahan pertanian, pembangunan infrastruktur fisik yang lebih terbatas di desa-desa, serta antarkelompok kohesi sosial yang bersumber dari keberagaman identitas yang diiringi dengan sikap primordialisme dan berujung pada konflik sosial. Temuan ini selanjutnya akan disempurnakan oleh kertas kerja kedua yang akan menguji kekuatan kontribusi dari masing-masing faktor tersebut dan dibandingkan besarnya dalam menjelaskan perubahan ketimpangan perdesaan. Berdasarkan temuan dari kertas kerja kedua tersebut, implikasi kebijakan yang dapat diformulasikan

Barrett, C.B., L. Christiaensen, M. Sheahan, dan A. Shimeles (2017). Structural Transformation of Rural Africa *Journal of African Economies* 26(1): 111-135.

Barron, P., K. Kaiser, dan M. Pradhan (2007). *World Development* 37(3): 697-713.

Baumann, P. (2002). *The Sustainable Livelihoods Approach and Improving Access to Natural Resources*. Rome: Food and Agricultural Organization.

Barro, R. J. (1987). *European Economic Review* 53(3), pp.373-384.

Bhattacharya, R. (2007). *World Development* 35(1): 31-33.

Bhattacharya, R. (2007). *World Development* 35(1): 31-33.

Borjas, G. (2002). *American Journal of Political Science* 57(1): 30-48.

Borjas, G. (2002). *Journal of Economic Literature* 40(1): 57-77.

Borjas, G. (2002). *Finance and Development* (September): 19-24.

Borjas, G., dan K. Kobayashi, dan E. Elgar (2009). *Reviews Social Policy & Administration* 48(9): 282-299.

BPS (2017). *Statistik Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Chetty, R. (2016). *Journal of Public Economics* 141: 1-28.

Castryck, F. (2016). *The World Bank*. Washington, DC: The World Bank.

Carletto, G., K. Covarrubias, B. Davis, M. Krausova, K. Stamoulis, P. Winters, dan A. Zezza (2007). *Journal of Agricultural and Development Economics* 4(1): 141-193.

Chetty, R. (2016). *The Economic Journal* 126(478): 1870-1910.

Chetty, R. (2016). *Journal of Public Economics* 141: 1-28.

Chetty, R. (2016). *Social Science & Medicine* 128: 223-230.

Charlery, L. C., M. Qaim, and C. Smith (2012) *Journal of Development Effectiveness* 2(2): 262-286.

Resources Determinant of
o k) k

Chongvilaivan, A. dan J. Kim (2012) *Social Indicators Research* 126(1): 798.

7 u @ World #
Development 33(6): 899-906.

Collier, P., V.L. Elliot, H. Hegre, A. Hoeffler, M. Reynal dan N. Sambanis (2003) *Conflict Trap: Civil War* World Bank and Oxford University Press.

h \ Oxford Economic Papers 1(1):
16883.

h @ Energy for Sustainable
Development 15(3), pp. 304-313.

0 0 0 h †
water for agriculture. O Agriculture Organization.

7 @)

† o u @ Emerging
Markets Finance and Trade 5(6), 1243-1261, DOI:10.1080/1540496X.2016.1264299

DablaV - M M V o 7
@ @ IMF Staff Discussion Note 8
International Monetary Fund.

Djankov, S., P. Landa, E. Seira, and S. Sharma (2008) *World Bank Policy
Research Working Paper* No. 4647

) 8 U k @ Journal of
Economic Perspectives 16(3): 89-108.

) K M 8 Journal of Economic Behavior &
Organization 71: 210-220.

de = o u @ 8
2013/1. Ottawa: International Development Research Centre.

) o † k
Rural China *China Economic Review* 17: 17-30.

K - o -Farm Incomes in Reducing Rural
h @ # y) k - †

Dey, I. dan R.N. Chaudhuri (2008) *Indian J Public Health* 52(4), pp.218-221.

Dincer, O. C. dan M. J. Hotard *Economic Journal* 117(3): 414-430.

among African American and Latin American Low *USocial Problems* 50: 111-135.

Economics and Politics 18(2): 103-120.

No.200. UNU World Institute for Development Economics Research.

The Journal of Conflict Resolution 46(3): 363-374.

Econometrica 71(1): 353-364.

Studies in Conflict & Terrorism 29(1): 5-14.

Policy Research Working Paper 7528 The World Bank.

FAO (1995) *Agricultural Organization*.

FORC/IYM 2002.

nization: 7

Environment and Development Economics 9(2): 135-154.

Nutrition 1: 83-103.

Social Science & Medicine 187: 268-275.

Ginting, E., dan P. Aji (2015) (2). Asian Development Bank.

- 8) K h k o
Compar 33(4): 4570.
- Harpham, T. (2008) U # *Social Capital* #
and Health 51-62.
- = K = o k M
 DC: World Bank.
- Healy, K., M. Haynes, dan A. Hampshire (2007) o #
 @ *International Journal of Social Work* 15(2): 1108.
- Heriyaldi, H. and Yusuf, A. (2013) Does Micro Finance Institution Improve Welfare? A Double
 Difference Analysis of Indonesian Community Level Data *Working Papers in Economics and
 Development Studies (WoPDS)* 201307, Department of Economics, Padjadjaran
 University
- = @ *IZA Discussion Paper Series* (1219) Bonn: U
 The Institute for the Study of Labor (IZA).
- = 8) \ -t 7 The h
American Economic Review 85(4): 828-46.
- = K K U K k "
Lance 371: 414-16.
- = - u O -Hill Book Company Inc.
- =) O - 8 #
- = 8 † U lenghe, Responses and y
 Policy in the Asia *Background Paper* International Organization for Migration.
- = 8 # *Population and Development Review* 31: 593-@
- @ M K U † CID *Working*
Papers (51) Center for International Development, Harvard University.
- @ U = Jakarta: Pusat Data dan Informasi, Kementerian
 Kesehatan.
- @ " # 7 #age
 u y M *Pension* 34(4): 2230.
- Interlenghi, G., d.S., dan R. Salvesta @ *Social Support and*
 = 7 @ *Public Health*
Nutrition 18: 292-933.
- @ - k U M
 @ *Jurnal Bekala Epidemiologi* (3): 36-70.

- 2002.
- Reduction to Growth *Including the Poor*. M. Lipton and J. van der Gaag (Washington, D.C.: World Bank, 1993).
- International Institute of Social Studies.
- Comparative Civilizations Review* 7(1): 789.
- Social Capital and Health*. New York: Springer.
- American Journal of Public Health* 87(9):1491-1498.
- World bank Policy Research Working Paper* 3875.
- Kim, J.M., R. Stewart, I. S. Shin, J.S. Yoon, Social Support and Late *International Journal of Geriatric Psychiatry* 19(9): 8431.
- Social Science & Medicine* 189: 10513.
- Quarterly Journal of Economics* 112(4): 1251288.
- Gender, Place & Culture* 23(12): 1763773.
- Equitable and Sustainable Development (LANDac).
- World Development* 124.
- Capital Are They Negatively *Journal of Developing Areas* 50(1): 215235.
- African Economics* 14(4): 58602.
- Economics Letters* 105:18385.

Nakamura T., dan Y. (2006). *Journal of Agricultural Economics*, 160(2), 269-280.

Maldonado, J. H., dan C. Gonzalez (2006). *Land use by rural households in the Andes: a model of land use by rural households*. Presentation at the Annual Meeting of the American Agricultural Economics Association.

U.S. Department of Agriculture (2006). *Land use by rural households in the Andes*. Washington: National University.

U.S. Department of Agriculture (2006). *Land use by rural households in the Andes*. *The Journal of Nutrition*, 136(2), 411-414.

U.S. Department of Agriculture (2006). *Land use by rural households in the Andes*. Institute and University of Nottingham.

U.S. Department of Agriculture (2007). *Land use by rural households in the Andes*. *World Bank Policy Research Working Paper* 4173, March 2007.

U.S. Department of Agriculture (2007). *Land use by rural households in the Andes*. UK: Northampton, MA: Edward Elgar.

U.S. Department of Agriculture (2007). *Land use by rural households in the Andes*. *Urban Migration in China and Indonesia*. *Canadian Studies in Population*, 34(1), 129-130.

U.S. Department of Agriculture (2007). *Land use by rural households in the Andes*. *Comparative Sociology*, 8(1), 59-69.

U.S. Department of Agriculture (2007). *Land use by rural households in the Andes*. Implications of Infrastructure Provision for Food Markets and Household Consumption. *JICARI Working Paper* (81). Japan International Cooperation Agency.

U.S. Department of Agriculture (2007). *Land use by rural households in the Andes*. *IZA Journal of Labor and Development*, 1(1), 1-18.

Montalvo, J. G. dan M. Reynal (2006). *Journal of Development Economics*, 79(2), 293-323.

U.S. Department of Agriculture (2007). *Land use by rural households in the Andes*. *Geographical paper* (189). The University of Reading.

U.S. Department of Agriculture (2007). *Land use by rural households in the Andes*. *Rural Sociology*, 70(1), 9-12.

U.S. Department of Agriculture (2007). *Land use by rural households in the Andes*. Washington DC: World Bank.

U.S. Department of Agriculture (2007). *Land use by rural households in the Andes*. *Journal of Peace Research*, 44(1), 3-7.

Saad7 8 h @
 8 *DESA Working Paper*(100)United Nations Department of Economic and Social
 Affairs.

o † V " o u U
 Oxford University Press.

o -Run Economic Effects of Changes)
Economic Synopsis(47), pp.2.

o o K O k M
 Office.

k o h) - tion Networks#
 De.,P. dan K. Iyengar (eds.) (2010)*Developing Economic Corridors in
 South Asia*Asian Development Bank.

o @ o k @) o † O h
 (72)Institute of Development Studies.

o) *Annual Review of Sociology*(49): 585-98.

o † u k U # =
 # y *Social Science & Medicine*181: 112-21.

o h @ K
*Southeast Asian Affairs*2018: 153-66.

o o U † O †
 -) *SMERU Working Paper*The SMERU Research
 Institute.

o o u) h †
 Jakarta, Indonesia: UNFPA.

o h # k u - \
 # *Working Papers in Economics and Econometrics*(377)Australian National
 University.

o 8 = o o
 @ " SMERU Working PaperJakarta: The
 SMERU Research institute.

Suryaha K U † @
 Releas O *Indonesia Enhancing Productivity Through
 Quality Jobs*Asian Development Bank:100.

o M - @ - *Journal of
 Development Economics*63: 379-98.

u o k # . *ADB Papers on Indonesia*(10).
 Asian Development Bank.

Tadjoeddin, M. Z., A. Yumna, S. Gultom, F. Rakhmadi, F. Hidayat, dan A. Suryahadi. (2016) *SMERU Working Paper* Jakarta, Indonesia: SMERU Research Institute.

Tadjoeddin, M. Z., dan S. IM. Economic Determinants of Everyday Violence in Indonesia: An Empirical Investigation of Javanese Districts, *Journal of Peace Research* 44(6): 687-709.

u # u " " u @ u h †
u # " " # h 7
period FY17 u † "

u # " " Development Policy Review 2014. Jakarta, u u
Indonesia: World Bank Office Jakarta.

u # " " 7 Policy Research
Paper World Bank.

y V # u) 8 h - -2015 †
Policy Brief (2). United Nations Conference on Trade and Development.

y V) h #) V
Development Program Indonesia Country Office.

y V United Nations Development Strategy and Policy
Analysis Unit Development Issues (1). United Nations Development Strategy and Policy
Analysis Unit

† V U - U o 7
Gradient in Self = O ° Social Science and
Medicine 96:115-22.

† † h = 8 M #
k † o @ Journal for the
Theory of Social Behavior (3): 363.

Warren, M., R., J. P. Thompson, o o apital in Combating k
h

† k 8 y o u

U K U j u @ -
U China Economic Review 11:101-25.

1993 o @ k u
Bulletin of Indonesian Economic Studies (2): 242-54.

LAMPIRAN

Tabel A1. Deskripsi Umum Sumber-Sumber Data

Sumber data	Jumlah sampel	Tahun tersedia	Tingkat keterwakilan terendah	Unit analisis	Topik	Pemakaian dalam penelitian ini (topik dan tahun)
Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)	2016 mencakup 300.000 rumah tangga yang tersebar di seluruh Indonesia	1963 - 2017	Kabupaten/kota	Rumah tangga	Demografi, pendidikan, pekerjaan, penghasilan, kesehatan, tempat tinggal, perlindungan sosial, kepemilikan aset. Topik-topik khusus (modul kekhususan)	2006 . 2016
Sensus Penduduk (SP)	Seluruh penduduk yang tinggal dalam wilayah teritorial Indonesia	1961, 1971, 1980, 1990, 2000, 2010 (sepuluh tahunan)	Desa	Individu/penduduk	Data dasar kependudukan, struktur anggota rumah tangga, pendidikan, budaya, disabilitas, fertilitas, mortalitas, migrasi, ketenagakerjaan, dan fasilitas perumahan	2000 dan 2010
Sensus Pertanian (ST)	Seluruh usaha pertanian, baik pada rumah tangga biasa, perusahaan berbadan hukum, maupun selain rumah tangga biasa dan perusahaan berbadan hukum. Pada 2013 mencakup sekitar 26,1 juta rumah tangga pertanian; 4.165 perusahaan; dan 5.922 unit usaha pertanian lainnya	1963, 1973, 1983, 1993, 2003 dan 2013 (sepuluh tahunan)	Desa	Rumah Tangga pertanian	Keterangan rumah tangga usaha pertanian, Penguasaan/pengusahaan/kegiatan tanaman pangan (padi dan palawija), Pengusahaan tanaman hortikultura, pengusahaan tanaman perkebunan, Penguasaan/pengusahaan ternak, Pengusahaan kegiatan perikanan, Pengusahaan tanaman kehutanan dan kegiatan kehutanan lainnya, Keterangan penguasaan lahan rumah tangga	2013
Potensi Desa (Podes)	Seluruh desa di Indonesia. Pada 2014, mencakup 73.709 desa	1980 - 2014 (3 kali dalam 10 tahun)	Kabupaten /Kota	Desa	Infrastruktur, populasi dan kesehatan reproduksi, lingkungan, pendidikan	2011 dan 2014
Indonesian Family Life Survey (IFLS)	Mencakup 30.000 individu di 13 provinsi di Indonesia	1993, 1997, 2000, 2007, 2014	Nasional	Individu, rumah tangga, desa/ kelurahan		2000, 2007, dan 2014
Peta Kemiskinan dan Penghidupan Indonesia/ <i>Poverty and Livelihood Map Indonesia</i>	Mencakup 77.012 desa/ kelurahan di seluruh Indonesia	2005 dan 2010	Desa/ kelurahan	Desa/kelurahan, kecamatan/kabupaten		2015
Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar)	Mencakup 290.000 rumah tangga	2013	Provinsi	Individu, rumah tangga,	Status nutrisi individu usia kurang dari 60 bulan	2013

Sumber: Berbagai sumber

The SMERU Research Institute

Telepon : +62 21 3193 6336

Faksimili : +62 21 3193 0850

Surel : smeru@smeru.or.id

Situs web : www.smeru.or.id

Facebook : [@SMERUInstitute](https://www.facebook.com/SMERUInstitute)

Twitter : [@SMERUInstitute](https://twitter.com/SMERUInstitute)

YouTube : [The SMERU Research Institute](https://www.youtube.com/TheSMERUResearchInstitute)